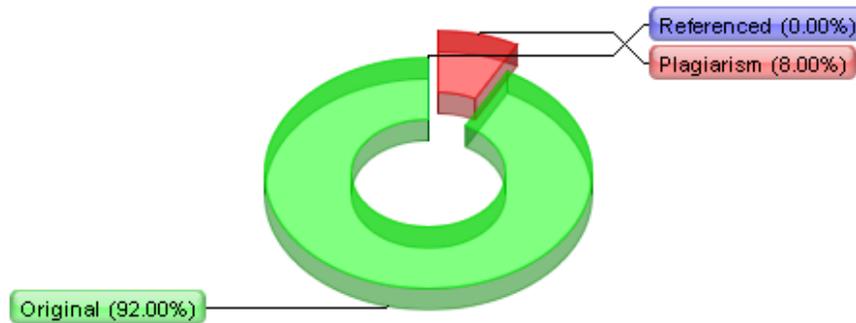


Plagiarism Detector v. 1740 - Originality Report 08/06/2020 20:33:31

Analyzed document: FENOMENA PEMILU 2004 DI KALSEL- Tinjauan Teoritis dan Empiris.pdf
Licensed to: Pascasarjana ULM_License02

Comparison Preset: Word-to-Word. Detected language: Indonesian

Relation chart:



Distribution graph:



Top sources of plagiarism:

	% 3		wrds:	http://ar.mian.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2014/03/02_format%20jou...
	% 2		wrds:	https://zendyelektronik.blogspot.com/2014/10/pemilihan-umum-dan-sistem-pemilihan...
	% 2		wrds:	https://muhammadazzikra15.blogspot.com/2016/04/konsep-pemilihan-umum.html

487
[Show other Sources:]

Processed resources details:

79 - Ok / 8 - Failed
[Show other Sources:]

Important notes:

Wikipedia: [not detected]	Google Books: [not detected]	Ghostwriting services: [not detected]	Anti-cheating: [not detected]
---	--	---	---

Active References (Urls Extracted from the Document):

No URLs detected

Excluded Urls:

No URLs detected

Included Urls:

No URLs detected

Detailed document analysis:

PMMXLU
ntrpetiJtli
1JLl\riE !.,rtat;

l.-
:t. :,'

:. !',
i.'.. -hi-. ;',. :.,i

ila

FENOMENA PEMILU 2004 DI KALSEL:

Tinjauan Teoritis dan Empiris

BudiSuryadi, S.Sos,Itrisi & Bahrudin AliAkhmad, Msi

Cetakan Pertama, April 2006

Panata sampul dan isi: Bana Fikriyah

Cetakan pertama: April, 2006

141 hlm, 14x20cm

Penerbit Pustaka Banua

Jl Gatot Soebroto IX, Arthaloka I No 7 Banjarmasin

Telp : (0511) 3254638. Hp. ffi 1 933735/05

Dicetak oleh:

Pustaka Banua

Jl Gatot Soebroto IX, Arthaloka I No 7 Banjarmasin

Telp : (0511) 954638. Hp. 081 933735705

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

ISBN 979-3381-14-0

t

Dnhnn Isi

KATA PENGANTAR - v

DAFTAR ISI - vii

PENGANTAR PENULIS - ix

BABITEORI_I

SISTEM PEMILIHAN UMUM _ 3

PARTAI POLITIK _ 15

STRATEGI KAMPANYE PEMILU - 27

EFEKTIVITAS ORGANISASI _ 43

BAB 2 STUDI KASUS _ 53

BABAK KE 2 ERA MULTI PARTAI POLITIK - 55

REFORMASI ATAU ELIMINASI PARTAI POLITIK _ 63

SISTEM PEMILU 2004 - 81

WACANA SISTEM DISTRIK _ 85

&

&* 7*;/n zoot li &,/*/ , e,?a* €*ata@*V*/;ra

SISTEM SAMPEL SOSIALISASI PEMILU 2004 - 89

SURAT SUARA RUSAK/TIDAK SAH _ 95

SISTEM SAMPEL SELEKSI CALON DPD _ 97

. KPU VS PANWASLU _ 99

HAK POLITIK PENYANDANC CACAT PADA PEMILU

2004 - rol

ELIMINASI KONFLIK KAMPANYE PARTAI POLITIK

- lo5

PERSEMAIAN KONTRAK POLITIK _ IO9

KUOTA 307o PARLEMEN BACI PEREMPUAN DAERAH

: II3

GOLONGAN PUTIH _ II9

EVELUAST KTNERIA KPU 2004 - Izt

EVALUAST KTNERIA PANWASLU KALSEL - t2s

KRITIK TERHADAP UU PEMILU 2004 _ I3I

DAFTAR PUSTAKA _ I3g

t

Sisrsm Pemilihnn Umum

, -Q2tt** pemilu selain sebagai mekanisme mengganti pemimpin atau pejabat pembuat keputusan tetapi juga untuk mengakomodasi setiap kepentingan-kepentingan

masyarakat sehingga terjadi ketertiban dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penyelenggaraan program-program pemerintahan.

Persoalan pemilihan pemimpin atau pejabat pembuat

keputusan bukanlah persoalan sederhana. Dalam prakteknya

memang masih ada negara-negara yang melakukannya dengan

cara turun temurun namun bagi masyarakat yang maiemuk

hal ini tidak dapat dipertahankan, selain karena kompleksitas

keragaman masyarakat iuga disebabkan kompleksitas masalah

yang ada di masyarakat. Sehingga untuk mengakomodasikan hal ini maka diciptakanlah sistem pemilihan umum.

Sistem pemilihan umum bagi partai politik sebagai iem-batan untuk menduduk'kan

 **Plagiarism detected: 0,03%** <http://ar.mian.fisip-unmul.ac.id/si...>

id: 1

wakilnya pada lembaga-lembaga legislatif sedangkan pemilu bagi

masyarakat sebagai sarana

untuk memilih dan menentukan pemimpin atau pejabat pembuat keputusan. Dan hanya lervat pemilihan umumlah seorang pemimpin atau pejabat

 **Plagiarism detected: 0,03%** <http://ar.mian.fisip-unmul.ac.id/si...>

id: 2

pembuat keputusan memperoleh legitimasi dari masyarakat.

&

&.oo***.7"-J" zool t AK,.L./; €,ryAnoo €"*r*u'U.-ff*9AA

Hampir semua sariana politik sepakat bahwa pemilu merupakan satu kreteria penting untuk mengukur kadar demokrasi sebuah sistem politik. Dahl (t985), Carrer dan Herz (1982), Mayo (l 982), Ranney (t 990), dan Sundhaussen (1992), adalah beberapa diantaranya. Mereka sepakat bahwa kadar demokrasi sebuah pemerintahan dapat

diukur, antara lain, dari ada tidaknya pemilu yang mengabsahkan pemerintahan itu. (Fatah dalam furnal LIB-ut, t 997).

Rata-rata semua sistem politik yang ada di negara menjalankan sistem pemilu dalam proses penggantian pemimpin atau pejabat pembuat keputusan, kecuali sejumlah

kecil saja yang tidak, seperti Brunei Darussalam dan sejumlah Negara Monarkhi di Timur Tengah.

Sistem pemilihan adalah seperangkat metode yang mengatur warga negara memilih para wakilnya.

 **Plagiarism detected: 0,15%** <https://alhanisberbagiilmu.blogspot...> + 2 resources!

id: 3

Dalam suatu lembaga perwakilan rakyat, seperti lembaga legislatif atau DPR/DPD, sistem pemilihan ini bisa berupa seperangkat metode untuk mentransfer suara pemilih ke dalam suatu kursi di lembaga legislatif atau parlemen. Namun, ketika pemilihan itu terjadi pada seorang

kepala pemerintahan sebagai representasi tunggal, seperti presiden, gubernur, bupati/wali kota, dan sebagainya, sistem pemilihan itu bisa berwujud

 **Plagiarism detected: 0,02%** <https://alhanisberbagiilmu.blogspot...>

id: 4

seperangkat metode untuk menentukan seorang pemenang

berdasarkan jumlah suara yang diperolehnya,

 **Plagiarism detected: 0,06%** <https://alhanisberbagiilmu.blogspot...>

id: 5

dalam bahasa yang sederhana, sistem pemilihan ini pada dasarnya berkaitan dengan cara pemberian suara,

perhitungan suara dan pembagian kursi. (Subekti, 1998).

WW,*

I

'3),,/, &o,y",l,; 88,,; oy"/,; g'9Jolnu,/i," 6{/; 6:fu1**/, ay'.lu;

Oleh karena sistem pemilu sebagai seperangkat metode maka sistem pemilihan ini, menurut Subekti (1999), seperti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, setidaknya mengandung 3 (tiga) variabel pokok, yaitu penyuaan (

 **Plagiarism detected: 0,03%** <https://alhanisberbagiilmu.blogspot...>

id: 6

balloting), distrik pemilihan (electoral district),

dan

formula pemilihan. Pertama, peneraan dimaksudkan dengan tata cara yang harus diikuti pemilih yang berhak dalam memberikan suara. Kedua, daerah pemilihan dimaksudkan dengan ketentuan yang mengatur beberapa daerah dimasyarakat untuk setiap daerah pemilihan. Ketiga, formula pemilihan, dimaksudkan dengan

 **Plagiarism detected: 0,02%** <https://alhanisberbagiilmu.blogspot...>

id: 7

rumus yang digunakan untuk menentukan siapa

yang memenangkan daerah pemilihan.

Dalam Ilmu

 **Plagiarism detected: 0,05%** <https://zendyelektronik.blogspot.co...> + 2 resources!

id: 8

Politik dikenal bermacam-macam sistem pemilihan umum dengan berbagai variasinya, akan tetapi

 **Plagiarism detected: 0,07%** <http://ar.mian.fisip-unmul.ac.id/si...> + 3 resources!

id: 9

secara umum ada 3 model sistem pemilihan, yaitu:

a. Single-member constituency (satu daerah pemilihan memilih satu

wakil; biasanya disebut sistem distrik).

b.

 **Plagiarism detected: 0,06%** <http://ar.mian.fisip-unmul.ac.id/si...> + 4 resources!

id: 10

Multi-member constituency (satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil; biasanya dinamakan sistem perwakilan berimbang atau sistem

proporsional). (lean Blondel, I 995)

c.

 **Plagiarism detected: 0,03%** <http://ar.mian.fisip-unmul.ac.id/si...>

id: 11

Sistem campuran (campuran dari sistem distrik dan sistem proposional).

Sistem distrik

 **Plagiarism detected: 0,09%** <http://ar.mian.fisip-unmul.ac.id/si...> + 6 resources!

id: 12

Sistem distrik adalah suatu sistem pemilihan umum di

mana wilayah suatu negara yang menyelenggarakan pemilu menentukan distrik-distrik pemilihan yang jumlahnya sama

i

&.n,*ro. 7.*,/ , zool ,/,: &o/r.l &n/ruo, aV* ,,:t;9.un 6*f iru

dengan iumlah

 **Plagiarism detected: 0,06%** <http://ar.mian.fisip-unmul.ac.id/si...> + 5 resources!

id: 13

kursi yang diperebutkan atau tersedia di parlemen. Tiap distrik hanya memilih "seorang wakil

" (karena

itu disebut juga sebagai single member constituency) untuk mewakili distrik bersangkutan di parlemen. Calon yang

 **Plagiarism detected: 0,03%** <https://belajarpkndenganhendri.word...> + 2 resources!

id: 14

terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak

atau

mayoritas (karena itu disebut juga sebagai sistem pemilihan mayoritas) di distrik bersangkutan yang disebut the first past the post. Dalam sistem ini yang dipilih oleh public bukan partai tetapi langsung si calon. Sehingga muncul ungkapan we choose the singer not the sorg. Si calon akan bersaing langsung, sedangkan partainya hanya mendukung atau

 **Plagiarism detected: 0,05%** <https://alhanisberbagiilmu.blogspot...> + 2 resources!

id: 15

bersaing secara tidak langsung. Dalam sistem ini makin banyak calon yang tampil

makin besar kemungkinan suara

yang terbuang. Misalnya ada 5 calon untuk distrik I yaitu si A, B, C, D dan E dengan iumlah pemilih di distrik yang bersangkutan sebanyak lo0 orang. Bila si A memperoleh 2t suara, si B 20 suara, si C 20 suara, si D 20 suara dan si E l 9

suara maka si A lah yang menjadi wakil terpilih dari distrik l tersebut di parlemen. (Saragih dalam Jurnal LIB-UI, 1997).

Sistem distrik merupakan sistem pemilu

 **Plagiarism detected: 0,07%** <http://ar.mian.fisip-unmul.ac.id/si...> + 2 resources!

id: 16

yang paling tua

dan didasarkan kepada kesatuan geografis, di mana satu kesatuan geografis mempunyai satu wakil di

parlemen. Sistem

distrik sering dipakai dalam negara yang mempunyai sistem dwi partai, seperti Inggris serta bekas jafahannya (India dan Malaysia) dan Amerika. Namun, sistem distrik juga dapat dilaksanakan pada suatu negara yang menganut sistem multi

partai, seperti Malaysia. Di sini

 **Plagiarism detected: 0,04%** <http://ar.mian.fisip-unmul.ac.id/si...> + 2 resources!

id: 17

sistem distrik secara alamiah mendorong partai-partai untuk berkoalisi, mulai dari

menghadapi pemilu. (Syarbaini dkk, 2002).

i

gto,/, &;y*/,/, &&" , ay'L; g*)ol*u,/io 6fl; a/lt.**4 ey'/',"

Menurut Budiardio (t996)

 **Plagiarism detected: 0,52%** <http://ar.mian.fisip-unmul.ac.id/si...> + 7 resources!

id: 18

, sistem distrik mempunyai beberapa keuntungan dan kelemahan, sebagai berikut:

Keuntungan sistem distrik:

"1. Karena kecilnya distrik, maka wakil yang terpilih dapat dikenal oleh penduduk distrik, sehingga hubungannya dengan penduduk distrik lebih erat. Dengan demikian dia akan lebih condong untuk memperjuangkan kepentingan distrik. Lagi pula, kedudukannya terhadap partainya akan lebih independen, oleh karena dalam pemilihan semacam ini faktor kepribadian seseorang merupakan faktor yang penting. Sekalipun demikian, dia tentu tidak bebas sama sekali dari pengaruh partai, sebab dukungan serta fasilitas partai diperlukannya baik untuk nominasi maupun untuk kampanye.

2. Sistem ini lebih mendorong ke arah integrasi partai-partai politik karena kursi yang diperebutkan dalam setiap distrik pemilihan hanya satu. Hal ini akan mendorong partai-partai untuk menyisihkan perbedaan-perbedaan yang ada dan mengadakan kerja sama, sekurang-kurangnya menjelang

pemilihan umum, melalui stembus accoord.

3.

 **Plagiarism detected: 0,04%** <http://ar.mian.fisip-unmul.ac.id/si...> + 3 resources!

id: 19

Fragmentasi partai atau kecenderungan untuk membentuk partai baru dapat sekedar

dibendung;

 **Plagiarism detected: 0,03%** <https://wilyhikaru22.blogspot.com/2...>

id: 20

malahan sistem ini bisa mendorong ke arah

penyederhanaan

 **Plagiarism detected: 0,04%** <http://ar.mian.fisip-unmul.ac.id/si...> + 3 resources!

id: 21

partai secara alamiah dan tanpa paksaan. Maurice Duverger

berpendapat bahwa dalam negara seperti Inggris dan Amerika, sistem ini telah menunjang bertahannya sistem dwipartai.

#l:altr l:

d

&,o**n 3"^;1, Zool l; a%./r[&o/ooo. €cuiti/@,oE^finu

 **Plagiarism detected: 0,13%** <http://ar.mian.fisip-unmul.ac.id/si...> + 6 resources!

id: 22

Lebih mudah bagi suatu partai untuk mencapai kedudukan mayoritas dalam parlemen, sehingga tidak perlu diadakan koalisi dengan partai lain. Hal ini mendukung stabilitas nasional. Sistem ini sederhana dan murah untuk

di-selenggarakan.

Kelemahan sistem distrik:

l.

 **Plagiarism detected: 0,18%** <http://ar.mian.fisip-unmul.ac.id/si...> + 6 resources!

id: 23

Sistem ini kurang memperhitungkan adanya partai-partai kecil dan golongan minoritas, apalagi jika golongan-golongan ini terpencar dalam beberapa distrik.

2. Sistem ini kurang representatif dalam arti bahwa partai yang calonnya kalah dalam suatu distrik, kehilangan suara-suara yang telah mendukungnya. Hal ini berarti

bahwa

ada sejumlah suara yang tidak diperhitungkan

sama sekali; dan kalau ada banyak partai mengadu kekuatan, maka jumlah suara yang hilang dapat mencapai jumlah

 **Plagiarism detected: 0,03%** <https://zendyelektronik.blogspot.co...>

id: 24

yang besar. Hal ini akan dianggap tidak

adil oleh partai dan golongan yang dirugikan.

3.

 **Plagiarism detected: 0,23%** <http://ar.mian.fisip-unmul.ac.id/si...> + 5 resources!

id: 25

Ada kemungkinan si wakil cenderung untuk lebih memperhatikan kepentingan distrik serta warga distriknya, daripada kepentingan nasional.

4. Umumnya dianggap bahwa sistem distrik kurang efektif dalam masyarakat yang heterogen karena terbagi dalam lielompok etnis, religius dan tribal, sehingga menimbulkan anggapan bahwa "suatu

kebudayaan nasional yang terpadu secara ideologis

dan etnis mungkin merupakan prasyarat bagi suksesnya sistem

ini.

4.

5.

t

'fi)o,/, &,*yo,/,; &8^, a/t'; g-7iol.,u,/i. d://; dlt**,i, a{L;

Secara lebih spesifik pembagian varian teknik dalam sistem distrik dapat dilihat pada bagan berikut ini, yaitu:

Bagan I:

m-Cirsriastttre6sil

F-vfltockvotd

FB-(p-"-rvit-Ctei

F\Plilitir"att" V-otT

reE*ono";dSstfii

Sistem proporsional

Sistem proporsional atau suara

 **Plagiarism detected: 0,19%** <http://ar.mian.fisip-unmul.ac.id/si...> + 5 resources!

id: 26

berimbang adalah suatu

sistem pemilihan dimana wilayah dari negara yang menggunakan sistem proporsional tersebut dibagi atas daerah-daerah pemilihan dan kepada daerah-daerah pemilihan ini dibagikan sejumlah kursi yang diambil dari kursi yang tersedia di parlemen untuk diperebutkan dalam suatu pemilihan umum di daerah tersebut. Pembagian kursi

biasanya didasarkan pada faktor imbang jumlah

 **Plagiarism detected: 0,06%** <https://belajarpkndenganhendri.word...>

id: 27

penduduk. Kursi-kursi tersebut dibagikan kepada partai-partai politik sesuai dengan imbang yang diperoleh masing-masing

organisasi peserta pemilu di dalam pemilu bersangkutan. Dalam perhitungan untuk memperoleh kursi bagi masing-masing peserta pemilu biasanya ditentukan oleh batas suara yang diperlukan (porsinya), misalnya 400.000 suara untuk satu kursi, demikian seterusnya untuk kursi berikutnya. Sehingga pemenang dari daerah pemilu tersebut lebih dari satuorang, sehingga sistem ini biasanya disebut

f,

&r*n"* ?"nrlr 20ol li dKo/"J, €*r;o"o.n &n ,;*;9).n6*lii

multi member constituency. (Saragih dalam Jurnal LIB-UI, t 997\ -

Sistem proporsional

 **Plagiarism detected: 0,1%** <http://ar.mian.fisip-unmul.ac.id/si...> + 2 resources!

id: 28

atau sistem perwakilan berimbang (PR) merupakan sistem yang muncul belakangan, sehingga sistem perwakilan berimbang ini pada dasarnya dibangun berdasarkan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan pada sistem

distrik. (Asfar, 2002)-

Menurut Budiardio (1996), sistem proporsional atau sistem

 **Plagiarism detected: 0,39%** <http://ar.mian.fisip-unmul.ac.id/si...> + 5 resources!

id: 29

perwakilan berimbang mempunyai beberapa keuntungan dan kelemahan, sebagai berikut:

Keuntungan sistem proporsional (PR):

1. Sistem proporsional dianggap lebih demokratis dalam arti lebih egalitarian karena asas one man one vote dilaksanakan secara penuh, praktis tanpa ada suara yang "hilang". Akibatnya ialah bahwa semua golongan dalam masyarakat, termasuk yang

kecil pun, mempunyai peluang untuk menampilkan wakilnya dalam parlemen. Dalam hal ini memenuhi rasa adil (sense of iustice).

2. Sistem ini dianggap representatif, karena jumlah kursi partai dalam parlemen sesuai dengan jumlah

suara yang diperolehnya dari masyarakat dalam pemilu.

3. Tidak ada distorsi perolehan suara antar

partai.

&

2.

'g)"/; &""y,.,h,88*, o,y'/" ; g"%orb,,*o 6//; 6y'll*.4 ay'./,;

Kelemahan sistem proporsional (PR):

1.

 **Plagiarism detected: 0,31%** <http://ar.mian.fisip-unmul.ac.id/si...> + 6 resources!

id: 30

Kelemahan yang paling besar adalah bahwa sistem ini mempermudah fragmentasi partai. Jika timbul konflik dalam suatu partai anggotanya cenderung memisahkan diri dan mendirikan partai baru, dengan perhitungan bahwa ada peluang bagi partai baru itu untuk memperoleh beberapa kursi dalam parlemen melalui pemilu. Jadi, kurang menggalang kekompakan dalam tubuh partai. Sistem ini kurang mendorong partai-partai untuk berintegrasi atau kerja sama satu sama lain dan mencari serta memanfaatkan persamaan-persamaan yang ada, tetapi sebaliknya cenderung mempertajam perbedaan-perbedaan.

Umumnya dianggap sistem ini mempunyai akibat memperbanyak jumlah partai.

 **Plagiarism detected: 0,15%** <http://ar.mian.fisip-unmul.ac.id/si...> + 6 resources!

id: 31

Sistem proporsional memberikan kedudukan yang kuat pada pimpinan partai melalui sistem daftar, karena pimpinan partai (sesudah berkonsultasi dengan cabang-cabang) menentukan daftar calon. Wakil yang terpilih kemungkinan renggang ikatannya dengan warga yang telah memilihnya. Pertama, karena

wilayah lebih besar (bisa sebesar propinsi)

 **Plagiarism detected: 0,16%** <https://zendyelektronik.blogspot.co...> + 3 resources!

id: 32

, sehingga sukar untuk dikenal banyak orang. Kedua, karena dalam pemilihan semacam ini peran partai lebih menonjol ketimbang kepribadian seseorang, sehingga si wakil akan lebih terdorong untuk memperhatikan kepentingan partai serta masalah-masalah umum atau nasional, ketimbang kepentingan distrik serta warganya.

4.

&

&,*n ro 3"n;/, Zooa l; OKIA"l &nj-.,o €*;AUan6nl;*'

 **Plagiarism detected: 0,06%** <http://ar.mian.fisip-unmul.ac.id/si...> + 3 resources!

id: 33

5. Karena banyaknya partai yang bersaing, sulit bagi satu partai untuk meraih mayoritas (50

o/o + l)

dalam parlemen, yang diperlukan untuk membentuk pemerintah. Partai yang terbesar terpaksa

. berkoalisi dengan beberapa partai lainnya untuk memperoleh mayoritas. Koalisi semacam ini-jika diselenggarakan dalam sistem parlementer-

 **Plagiarism detected: 0,19%** <https://zendyelektronik.blogspot.co...>

id: 34

sering tidak lama umurnya, dan hal ini tidak membina stabilitas politik. Dalam sistem presidensial perubahan dalam komposisi di parlemen tidak mempengaruhi masa jabatan eksekutif. Di Amerika bisa saja Congress mengalami perubahan dalam komposisinya, sehingga misalnya badan itu dikuasai oleh partai Demokrat, tetapi presiden serta kabinetnya dari partai

republic tetap bertahan selama empat tahun.

Secara spesifik varian teknik dalam sistem proporsional dapat dilihat pada bagan berikut ini, yaitu:

Bagan 2:

EisrFf,

@
@

|

'?3o,/; &,iy,/;, &8""', oy'L; g'?)"1.*,/;. e//; e//l**"4 ey'(";

Sistem campuran

 **Plagiarism detected: 0,1%** <http://ar.mian.fisip-unmul.ac.id/si...>

id: 35

Sistem campuran merupakan campuran model dari

sistem distrik dan sistem proposional sehingga kadang-kadang disebut dengan semi distrik atau semi proporsional.

Formula sistem campuran merupakan kombinasi kelebihan

 **Plagiarism detected: 0,03%** <https://wilyhikaru22.blogspot.com/2...>

id: 36

dari sistem distrik dan sistem proporsional.

Sistem ini pada dasarnya memberikan representasi bagi kelompok-kelompok minoritas, di mana kelompok-kelompok minoritas tidak hilang suaranya atau masih adanya keterwakilan di parlemen.

Prinsip-prinsip utama metode sistem campuran ini adalah adanya suara kumulatif, adanya pembatasan suara dan adanya

single non transferable vote. Adanya suara kumulatif adalah

masing-masing pemilih mempunyai suara sebanyak kursi yang

tersedia terkecuali adanya larangan mengakumulasi suara pemilih. Pembatasan suara adalah para pemilih diberi suara lebih kecil dari jumlah kursi yang tersedia di distrik tersebut.

 **Plagiarism detected: 0,13%** <http://ar.mian.fisip-unmul.ac.id/si...>

id: 37

Single non transferable vote adalah suatu bentuk khusus pembatasan suara di mana masing-masing pemilih hanya memiliki satu suara dalam suatu distrik yang umumnya tersedia tiga sampai lima wakil. (Asfar, 2002).

Secara spesifik varian teknik dalam sistem campuran dapat dilihat pada bagan berikut ini, yaitu:

Bagan 3:

r@
@FARALEL(MI,AI

'r,t+l#iifl,rrirl

i

&

&"n *no ?, ,./,,2004,/i aA)L"l &o7,,o- &*zith@* 6*1i,,)

Adanya berbagai keuntungan dan kelemahan dari sistem

distrik dan sistem proporsional di atas maka berarti tidak ada sistem yang ideal dan baik bagi suatu negara. Penerapan

sistem pemilu sangat tergantung dari karakteristik negara tersebut dan lamanya kehidupan politik berkembang di masyarakat. Oleh karena tidak ada sistem pemilu yang ideal

bagi suatu negara sehingga beberapa negara mencoba melakukan gabungan kedua sistem distrik dan sistem proporsional dalam proses penyelenggaraan pemilunya dalam rangka mencari dan menemukan sistem pemilu yang

ideal dan baik, seperti Indonesia saat ini, Singapura, Jepang,

Perman dll.

Penerapan Polirik

Perubahan berikutnya dalam kerangka konsep sistem politik adalah partai politik. Secara teoritis,

partai politik berada pada posisi input dan konversi. Posisi

input dalam arti mengagregasikan (mengumpulkan) kepentingan masyarakat yang diwakilinya sedangkan pada posisi konversi partai politik mengartikulasikan kepentingan masyarakat, hal ini terjadi melalui mekanisme pemilihan umum mendudukan wakilnya di lembaga legislatif untuk memperiukan aspirasi masyarakat yang diwakilinya agar menjadi produk kebiakan.

Secara historis, partai politik pertama-tama lahir di negara-negara Eropa Barat. Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikuti sertakan dalam proses politik, maka partai politik telah lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung

 **Plagiarism detected: 0,04%** <https://alhanisberbagiilmu.blogspot...> + 2 resources!

id: 38

antara rakyat di satu pihak dan pemerintah di pihak

lain. Partai politik umumnya

 **Plagiarism detected: 0,05%** <https://alhanisberbagiilmu.blogspot...> + 3 resources!

id: 39

dianggap sebagai manifestasi dari suatu sistem politik yang sudah modern atau

yang sedang dalam proses memodernisasikan diri. Maka dari itu, dewasa ini di negara-negara baru pun partai politik sudah menjadi lembaga politik yang biasa dijumpai. (Meriam Budiardjo, 199t).

.fi..1?:...:ii1.]ltifi

,1. ;:S,\$:d

t

&L *** n,, 7e n i /u P 0 0 t;/ oX) 1, . /, &,2;.

"

r. &w. ; t; o @. * V *y ;, ;

Partai berasal dari bahasa Latin, partire, yang bermakna membagi. Awal mula partai adalah sesuatu yang sangat asing bagi masyarakat Eropa abad ke tuiuh belas. Bahkan masyarakat Amerika di abad ke delapan belas memvonis partai sebagai kekuatan subversif dan disintegratif bagi kesatuan negara baru tersebut. (Cipto, 1996).

Menurut Surbakti (1999), ada tiga teori yang menjelaskan asal usul partai politik: Pertama,

 **Plagiarism detected: 0,12%** <https://besardenganideku.blogspot.c...> + 2 resources!

id: 40

mengatakan partai politik dibentuk oleh kalangan legislatif (dan eksekutif) karena ada kebutuhan ?ara anggota parlemen (yang ditentukan berdasarkan pengangkatan) untuk mengadakan kontak dengan

masyarakat dan membina dukungan dari masyarakat.

Kedua,
menjelaskan

 **Plagiarism detected: 0,09%** <https://besardenganideku.blogspot.c...> + 2 resources!

id: 41

krisis situasi historis terjadi manakala suatu sistem

politik mengalami masa transisi karena mengalami perubahan

masyarakat dari bentuk tradisional yang berstruktur

seederhana

menjadi masyarakat moden yang berstruktur kompleks. Ketiga,

 **Plagiarism detected: 0,05%** <https://besardenganideku.blogspot.c...>

id: 42

melihat modernisasi sosial ekonomi, seperti pembangunan teknologi komunikasi berupa media massa dan

transportasi ,

perluasan dan peningkatan pendidikan, industrialisasi

urbanisasi, perluasan kekuasaan negara seperti birokrasisasi,

pem.bentukkan

 **Plagiarism detected: 0,1%** <https://besardenganideku.blogspot.c...>

id: 43

berbagai kelompok kepentingan dan organisasi

profesi, dan peningkatan kemampuan individu yang mempengaruhi lingkungan, melahirkan suatu kebutuhan akan

suatu organisasi politik yang mampu memadukan dan

memperjuangkan berbagai aspirasi tersebut.

Lebih dari tiga-perempat bangsa-bangsa yang merdeka yang ada sekarang memiliki satu atau beberapa partai politik.

Pada akhir tahun 1960-an hanya 31 negara yang tidak berpartai politik. Negara-negara yang tidak berpartai itu, yang terutama

a

'%,,,/; cY,,it,,/i, c7,. '7:,, o-/1"; g':3,,1" ,,,/" ,, e/t; e/11,..,t, o'/L;

terdapat di Timur Tengah, Asia Selatan dan Tenggara serta Afrika. Sub Sahara terdiri dari 2 ienis: Pertama, yang dikuasai

oleh rezim-rezim dinasti tradisional seperti negara-negara kecil

di Teluk Persia atau kerajaan-kerajaan seperti Iran, Arab Saudi

dan Ethiopia; Kedua, yang dikuasai oleh rezim-rezim militer

seperti Yunani dan Thailand dimana partai politik ditindas. (Kasnawi dan Taha, 1999).

Secara definisi menurut Jean Blondel (1995), partai politik adalah kelompok keanggotaan terbuka dan yang focus dengan spectrum soal-soal kebilakan. Carl I Friedrich (1967),

 **Plagiarism detected: 0,08%** <https://alhanisberbagiilmu.blogspot...> + 3 resources!

id: 44

partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi

pimpinan partainya, dan berdasarkan penguasaan ini memberikan

 **Plagiarism detected: 0,03%** <https://alhanisberbagiilmu.blogspot...> + 3 resources!

id: 45

kepada anggota partainya kemanfaatan yang

bersifat idiil

dan materiil. Burke dikutip Rodee (2000), partai politik merupakan sekelompok manusia yang secara bersama-sama menyetujui prinsip tertentu untuk melayani kepentingan nasional.

Berdasarkan definisi-definisi ini menunjukkan pengertian yang beragam. Tetapi untuk memudahkan pemahaman mengenai partai politik atau setiap organisasi terkategori sebagai partai politik, apabila: Pertama, terwujud dalam kumpulan orang-orang yang memiliki identitas, bisa berupa nama, bendera, dan yang terpenting ideologi yang menjadi dasar nilai bagi pedoman dan aktivitas partai politik; Kedua, ketika sekelompok orang-orang bergabung, tentunya bukan sekedar kumpulan biasa, tetapi sebagai kelompok yang terorganisasi, artinya mereka membentuk asosiasi yang

t1.

&

&no-*,o '!A-./,, zoot .L aKthe/: &.,,,",".. efr.orit^ @, . 6-,V,;;

memenuhi syarat-syarat organisasi; Ketiga, keberadaan partai politik diakui memiliki hak oleh sebagian besar masyarakat untuk mengorganisasikan dirinya, sekaligus mengembangkan dirinya dengan berbagai aktivitas. Secara sederhana, partai politik bisa mengatasnamakan kelompok masyarakat tertentu yang merupakan pendukung atau anggota-anggotanya; Keempat, partai politik berupaya mengembangkan aktivitas-aktivitas melalui mekanisme kerja yang mencerminkan pilihan rakyat. Partai politik dalam berbagai kegiatan, bekerja berdasarkan prinsip representative government, pemerintah yang mencerminkan pilihan rakyat. Hal ini dimungkinkan oleh

keberadaan partai politik, yang harus selalu berhubungan dengan rakyat. Dengan posisi seperti ini, partai politik diharuskan mengembangkan mekanisme hubungan yang aspiratif, responsif dan partisipatif terhadap rakyat, -terutama pendukungnya-, sehingga apapun yang menjadi pilihan aktivitas politik partai merupakan gambaran suara rakyat; Kelima, aktivitas inti partai politik adalah melakukan seleksi bagi rakirat, baik dari kalangan partai politik maupun di luar partai politik-yang dipilih sebagai kandidat, untuk menduduki jabatan-jabatan publik dalam pemerintahan. (Fathurrohman dan Sobri, 2002).

 **Plagiarism detected: 0,09%** <https://besardenganideku.blogspot.c...> + 3 resources!

id: 46

FUNGSI PARTAI POLITIK

Fungsi utama partai politik ialah mencari dan

mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu.

 **Plagiarism detected: 0,03%** <https://ferryhadmadari.wordpress.co...>

id: 47

Berikut ini dikemukakan sejumlah fungsi lain

partai politik,
sebagai berikut:

,

t

%

"/,;

8;,,,r,l;,.9 8; e'/'" ; g'"% o 1,,,t,,8//i 6y'il -.",1 e'/L ;

Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik ialah

 **Plagiarism detected: 0,15%** <https://besardenganideku.blogspot.c...> + 4 resources!

id: 48

proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat. Melalui proses sosialisasi politik inilah para anggota masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat. Proses ini berlangsung seumur hidup yang diperoleh secara

sengaja melalui pendidikan

formal, non formal dan informal maupun secara tidak sengaja

melalui kontak dan pengalaman sehari-hari,

 **Plagiarism detected: 0,04%** <https://ferryhadmadari.wordpress.co...>

id: 49

baik dalam kehidupan keluarga dan tetangga maupun dalam kehidupan

masyarakat.

Partai politik melakukan pendidikan politik

 **Plagiarism detected: 0,03%** <https://ferryhadmadari.wordpress.co...>

id: 50

melalui kegiatan kursus, latihan kepemimpinan, diskusi dan

keikut-sertaan dalam berbagai forum pertemuan. untuk menyebarkan nilai, norma dan simbol yang dianggap idel dan baik.

Rekrutmen Politik

Rekrutmen politik adalah

 **Plagiarism detected: 0,11%** <https://besardenganideku.blogspot.c...> + 4 resources!

id: 51

seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya.

Rekrutmen politik sangat penting untuk kesinambungan sebuah sistem politik dan melalui proses ini akan terus ada orang-orang yang berperanan untuk melanjutkannya.

 **Plagiarism detected: 0,1%** <https://besardenganideku.blogspot.c...> + 4 resources!

id: 52

Partisipasi Politik '

Partisipasi politik ialah kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum dan dalam ikut menentukan pemimpin

pemerin-

r':1siill,

.ifi*:g,

&

d/,u,,-.,.,.,. i7",."/,, eoot ,1; aX,l,./, er2.7,,,o.,. &ozit),Oon 6.,V;;;

tahan. Kegiatan yang dimaksud, antara lain: mengaiukan tuntutan, membayar paiaik, melaksanakan keputusan, mengajukan

 **Plagiarism detected: 0,11%** <https://ferryhadmadari.wordpress.co...> + 2 resources!

id: 53

kritik dan koreksi atas pelaksanaan suatu kebiijakan umum, dan mendukung atau menentang calon pemimpin tertentu, mengaiukan alternatif pemimpin dan memilih wakil rakyat dalam

pemilihan

 **Plagiarism detected: 0,03%** <https://ferryhadmadari.wordpress.co...>

id: 54

umum. Dalam hal ini, partai politik

mem-
funyai fungsi untuk membuka kesempatan, mendorong dan
mengaiak para anggota dan anggota masyarakat

 **Plagiarism detected: 0,07%** <https://besardenganideku.blogspot.c...> + 2 resources!

id: 55

lain untuk
menggunakan partai politik sebagai saluran kegiatan mem-
pengaruhi proses politik. Jadi, partai politik merupakan wadah
partisipasi

politik.

Pemandu Kepentingan

Fungsi pemandu kepentingan merupakan gabungan dari
fungsi agregasi politik dan artikulasi politik. Fungsi ini ada
dalam rangka beragamnya kepentingan-kepentingan yang
tumbuh di masyarakat. Sehingga kepentingan-kepentingan
itu perlu dikumpulkan atau dipilah-pilah (agregasi)
kemudian dijadikan alternatif atau diperjuangkan (artikulasi)
dalam pembuatan kebijakan umum.

Komunikasi Politik

Komunikasi politik ialah

 **Plagiarism detected: 0,1%** <https://besardenganideku.blogspot.c...> + 3 resources!

id: 56

proses penyampaian informasi
mengenai politik dari pemerintah kepada masyarakat dan
dari masyarakat kepada pemerintah. Dalam hal ini, partai
politik berfungsi sebagai komunikator politik

yang ridak

hanya menyampaikan segala keputusan dan penielasan

 **Plagiarism detected: 0,03%** <https://ferryhadmadari.wordpress.co...>

id: 57

pemerintah kepada masyarakat atau dari masyarakat kepada

20

l

)" /,; &;,ro /,; &8^, or'L; g-'ZJ,,l. /,;* *//; dlt*o/, oy'L;.

pemerintah, tetapi iuga merumuskan sedemikian rupa agar
penerima informasi dapat memahami dan memanfaatkannya.

Pengatur Konflik

Dalam setiap masyarakat terdapat beragam pendapat dan
perbedaan pendapat dimaksudkan untuk mengatur dan menge-
lola konflik ini agar tidak bersifat destruktif terhadap sisrem
politik melalui kegiatan-kegiatan dialog antara fihak-fihak yang
berbeda sehingga ditemukan solusi-solusi untuk kompromi.

Pengawasan Politik

Suatu pemerintahan dibentuk adalah untuk menyelenggarakan fungsi negara dan untuk melayani kepentingan masyarakat. Artinya segala tidak tunduk aparatur penyelenggara negara diarahkan untuk kepentingan masyarakat tersebut. Agar perilaku aparatur penyelenggara tetap terarah atau tidak menyimpang dan terakomodasinya kepentingan masyarakat tersebut maka diperlukan adanya pengawasan dari partai politik melalui institusi partai politik atau wakil partai politik yang duduk di lembaga legislative.

KLASIFIKASI PARTAI POLITIK

Surbakti (1999), mengklasifikasikan partai politik

 **Plagiarism detected: 0,07%** <https://teukuamal.blogspot.com/2015...>

id: 58

berdasarkan kriteria tertentu, seperti asas dan orientasi, komposisi dan fungsi anggota, basis sosial dan

tujuan.

Dibawah ini akan diuraikan klasifikasi partai politik berdasarkan kriteria tersebut, sebagai berikut:

14i*

&."* ...* 7"";/, z o ot,/, cffi./"/. &n/.o,,o. &* ;t;'U., 6 *I ;,,)

Asas dan Orientasi

Berdasarkan asas dan orientasinya, partai politik diklasifikasikan menjadi tiga tipe. Adapun ketiga tipe ini meliputi partai politik pragmatis, partai politik doktriner dan partai politik kepentingan.

Partai politik

 **Plagiarism detected: 0,11%** <https://besardenganideku.blogspot.c...> + 2 resources!

id: 59

pragmatis ialah suatu partai yang mempunyai program dan kegiatan yang tidak terikat kaku pada suatu doktrin dan ideologi tertentu. Artinya perubahan waktu, situasi dan kepemimpinan akan

juga mengubah

program, kegiatan dan penampilan partai politik tersebut.

Partai

 **Plagiarism detected: 0,03%** <https://teukuamal.blogspot.com/2015...>

id: 60

doktriner ialah suatu partai politik yang memiliki

sejumlah program dan kegiatan konkret sebagai penjabaran

ideologi.

 **Plagiarism detected: 0,04%** <https://teukuamal.blogspot.com/2015...>

id: 61

Ideologi yang dimaksud ialah seperangkat nilai politik yang dirumuskan secara

konkret dan sistematis dalam bentuk-bentuk

 **Plagiarism detected: 0,05%** <https://teukuamal.blogspot.com/2015...>

id: 62

program kegiatan yang pelaksanaannya diawasi secara ketat oleh aparat partai.

Partai kepentingan merupakan suatu partai politik

 **Plagiarism detected: 0,1%** <https://besardenganideku.blogspot.c...> + 2 resources!

id: 63

yang dibentuk dan dikelola atas dasar kepentingan tertentu, seperti petani, buruh, etnis, agama atau lingkungan hidup yang secara

langsung ingin berpartisipasi dalam pemerintahan.

Komposisi dan Fungsi Anggota

Berdasarkan komposisi dan anggota partai politik dapat digolongkan menjadi dua, yaitu partai

 **Plagiarism detected: 0,05%** <https://besardenganideku.blogspot.c...>

id: 64

massa atau lindungan dan partai kader. Yang dimaksud dengan partai politik massa

atau lindungan (patronage) ialah partai politik yang mengandalkan kekuatan pada keunggulan jumlah

 **Plagiarism detected: 0,03%** <https://besardenganideku.blogspot.c...>

id: 65

anggota dengan cara memobilisasi massa sebanyak-banyaknya, dan

?t3,,L c9;,,,r,,,,r;. o7a9;,, e,/L; g'Z,/,,,L,. cid/; 61t1,,,/, e//,,

mengembangkan diri sebagai pelindung bagi berbagai kelompok dalam masyarakat.

Partai kader ialah suatu partai

 **Plagiarism detected: 0,04%** <https://besardenganideku.blogspot.c...>

id: 66

yang mengandalkan kualitas anggota, keketatan organisasi, dan disiplin anggota

sebagai sumber kekuatan utama. Seleksi anggota dalam

 **Plagiarism detected: 0,08%** <https://besardenganideku.blogspot.c...>

id: 67

partai kader biasanya sangat ketat, yaitu melalui kaderisasi yang berjenjang dan intensif, serta penegakan disiplin partai yang konsisten dan

tanpa pandang bulu. Struktur organisasi partai ini sangat

hirarkhis sehingga ialur perintah dan tanggung jawab sangar ielas. Karena sifatnya yang demikian partai kader acapkali disebut sebagai partai yang sangat elitis.

Basis Sosial dan Tujuan

Almond menggolongkan partai politik berdasarkan basis sosial dan tujuan yang dibagi menjadi empat tipe, yaitu:

1. Partai politik yang beranggotakan lapisan-lapisan sosial dalam masyarakat, seperti kelas atas, menengah dan bawah;

2.

 **Plagiarism detected: 0,1%** <https://besardenganideku.blogspot.c...> + 2 resources!

id: 68

Partai politik yang anggotanya berasal dari kalangan kelompok kepentingan tertentu, seperti petani, buruh dan pengusaha;

3. Partai politik yang anggota-anggotanya berasal dari pemeluk

agama tertentu, seperti Islam, Khatolik, Protestan dan Hindu, dan;

4. Partai politik yang anggota-anggotanya berasal dari kelompok budaya tertentu, seperti suku bangsa, bahasa dan daerah tertentu.

reEaT

&

& *-

" - " 7e n i /u 2 0 0 4,/i eK,. A * /, dJ,,ri,,, o n oZ *,, t,, U., 6'.V ;" ;

SISTEM KEPARTAIAN

Duverger (1967), menggolongkan sistem kepartaian

sebagai berikut,

 **Plagiarism detected: 0,03%** <https://alhanisberbagiilmu.blogspot...> + 5 resources!

id: 69

yaitu sistem partai tunggal (one party system),

sistem dwipartai (two party system) dan sistem banyak partai (multy party system).

Sistem satu partai atau sistem partai tunggal, dimaksudkan

dengan bahwa dalam suatu negara hanya ada satu partai politik. Atau dengan beberapa variasi tertentu sistem ini menuniukkan adanya satu partai politik yang dominan di antara

beberapa partai politik kecil lain yang ada dalam negara tersebut. Misalnya, RRC yang menerapkan sistem partai tunggal, yaitu partai komunis dan negara-negara Eropa Timur.

Dalam negara dengan sistem satu partai, fungsi partai politik untuk mengkritik rezim yang memerintah tidak dapat jalan dikarenakan rezim yang memerintah itu adalah representasi partai politik tersebut. Selain itu dalam setiap pemilihan umum rakyat tidak mempunyai alternatif lain selain memilih partai yang tunggal tersebut.

Sistem satu partai politik dalam suatu negara memiliki kebaikan dan keburukan, sebagai berikut:

Kebaikan sistem satu partai politik:

1. Pemerintah berjalan dengan stabil
2. Program-program pemerintah berjalan dengan efektif
3. Pembinaan ideologi negara dapat terselenggara

dengan efektif.'

Keburukan sistem satu partai politik:

1. Tidak ada pengawasan terhadap jalannya pemerintahan

,,,;,2;.:S::=

&

?8,,/, 4,,r/,/. d/ &,. : //;; 9'.8"t,,,"t " d //, . *t-"/. ? /(.,

Berlaku sistem ekonomi terpimpin dan monopoli oleh

n ega ra

Tidak terjaminnya kebebasan berkumpul dan berpendapat rakyat

Terjadinya kekerasan politik oleh negara berupa intimidasi dan ancaman terhadap rakyat
Kontrol yang kuat oleh negara terhadap jalannya kehidupan politik rakyat.

Sistem dua partai atau sistem dwipartai, biasanya dirnaksudkan dengan adanya dua partai politik di dalam suatu negara. Atau dengan beberapa variasi tertentu menunjukkan adanya beberapa partai politik tetapi hanya dua partai politik yang berperan dominan.

Dalam sistem dua partai, partai yang ada dipisahkan

antara partai yang berkuasa dan partai oposisi. Partai yang

berkuasa maksudnya partai yang memenangkan pemilu sedangkan partai oposisi maksudnya partai yang kalah dalam pemilu dan memosisikan diri sebagai oposisi. Misalnya, Amerika Serikat dan Inggris.

Dalarn sistem dua partai tidak ada keburukan yang terjadi, walaupun ada keburukan dalam prakteknya lebih dikarenakan perilaku individu politiknya tetapi biasanya hal ini dapat diselesaikan melalui mekanisme-mekanisme yang transparan dan konsensus semua pihak. Adapun kebaikan-kebaikan sistem dua partai, yaitu:

1. Pemerintahan berjalan stabil
2. Setiap program pemerintah dapat berjalan efektif

2.

f

J.

4.

5.

rial1:..=

'ij:*i

eflnoo,n,,, 7n*;/. zrtrru ,/; aX,/,,,/. o7-7,,,on d7,-,.yi/it e,. 6,,7*a

3. Adanya pengawasan oleh rakyat terhadap penyelenggara negara melalui partai oposisi

4. Terjadinya persaingan atau kompetisi antar partai untuk merebut simpatik rakyat

5. Terselenggaranya fungsi partai politik

6: Kecenderungan menguatnya basis politik partai ter-

hadap program-program yang mensejahterakan rakyat. Sistem banyak partai atau disebut juga dengan istilah

sistem multi partai, yang digunakan untuk menunjukkan adanya banyak partai politik dalam suatu negara.

Kebiasaannya sistem multi partai terdapat pada negara-negara yang mempunyai struktur masyarakat majemuk (terdiri berbagai suku bangsa, ras, golongan dan agama).

Negara-negara yang menganut sistem multi partai, seperti Italia, Perancis, dan Indonesia pada saat sekarang.

Dalam Sistem multi partai memiliki beberapa keburukan

sedangkan aspek kebaikannya kurang begitu dieksplorasi dikarenakan dianggap tidak terlalu penting dan kurang menonjolkan kesejahteraan rakyat. Adapun keburukan sistem multi partai sebagai berikut:

Pemerintahan cenderung tidak stabil
Sangat sulit tercapainya partai mayoritas dalam setiap pemilu
Rakyat terpecah-pecah ke dalam basis partai
Program pemerintah tidak berjalan efektif karena sering pemerintahan berganti

5. Terjadinya perrentangan ideologi yang taian anrar parrai politik.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

;srii:
ii,,#p

&

Srnnreqi Knmpnrrryr Pemilu

Ob"tru pemilu secara perseorangan atau partai politik
1-/ bergerak karena ingin terpilih atau keluar sebagai

pemenang. Namun hal itu tidaklah mudah karena pesaing

iuga bergerak dengan usaha yang tidak kalah kerasnya.
Karena itu dengan permasalahan yang berbeda terutama

dalam kadar intensitasnya baik yang menyangkut iumlah
dukungan yang sudah ada, ketersediaan SDM dan dana serta

tujuan masing masing kontestan, kemenangan pada
giliranya ditentukan oleh strategi kampanye masing masing.

Strategi kampanye yang terkait dengan pendekatan apa
yang dipakai sesuai dengan masalah dan tujuan yang ingin
dicapai didalam kampanye, agar lebih mengefektifkan dan
mengefisienkan tindakan terencana komunikasi tersebut
dalam kurun waktu tertentu.

Pada pemilu yang demokratis, dituntut adanya
kesadaran yang optimal dari pemilih dalam meniatuhkan
pilihanya. Pendekatan.komunikasi yang tepat dalam hal ini

bersifat persuasif.

Pada komunikasi persuasi yang kreatif, sasaran turut giat menyusun tanggapan. Baik persuader maupun sasaran sama-sama responsif, bukan reaktif terhadap satu sama lain;

.....!='*

i.i,.t

&

&.*.3*.;1,ZOol,LoK-/o./,&.;n1;,*o*&*ita@o-S*rl;,,,;

perilaku itu konstruktif, interpretatif dan dipikirkan, jadi tidak pasif dan tak dipikirkan.

Setiap proses persuasi adalah tindakan, baik persuader maupun sasaran memilih cara menanggapi dengan cara yang tidak selalu dapat diduga. Ini berarti sasaran terlibat aktif dalam persuasinya sendiri. fadi iika ingin sasaran menanggapi maka persuader harus mengimbau dengan bahasa yang dipahaminya.

William Mc Guire dikutip Nimmo, (1993)mengembangkan teori bagaimana orang menginterpretasikan imbauan persuasif. Menurutnya ada 6 langkah pemerosesan informasi dalam komunikasi persuasi, yakni: Keberadaan imbauan persuasif, sasaran memperhatikan, memahami isinya,menerima isinya, tetap bertahan pada imbauan dan akhirnya bertindak berdasarkan imbauan itu.

Keenam langkah dapat dipandang sebagai tahap tahap dimana persuader (propagandis, pengiklan dan orator) dan sasaran (anggota kelompok, individu yang terisolasi, atau kolaborator) bersama sama menyusun makna bersama tentang pesan. Setiap tahap menialani proses yang rumit, yang dapat dideteksi pada setiap langkah yang melibatkan unsur proses komunikasi.

Pada saat persuader menyaiikan pesan, mungkin dia berlomba dengan penyaii pesan yang menghambar dari editor, kolonnis, atau tokoh politik yang disajikan melalui media massa. Iadi, ada hubungan antara sumber dan saluran disatu pihak serta rerensi dipihak lain.

Selain itu dapat ditangkap bahwa pada setiap tahapan penyusunan makna, terdapat kemungkinan resistensi baik

i/,F...].q=

' :8,,,L on"7,,,/,; &8^, e./1,; g:%ol,u,/on 6//,; all,,,"o./, e.//,,

karena adanya kompetisi sumber, pesan, saluran, maupun

penerima yang mengakibatkan munculnya akibat yang diharapkan dan akibat nyata yang dapat bersifat kontras.

Karena hal di atas, maka pada setiap kampanye persuasif diperlukan strategi dalam memenangkan kompetisi sebagai sumber yang terpercaya, pesan yang paling menarik, saluran yang paling efektif dan efisien, dan ketepatan sasaran, sehingga tercapai efek yang diharapkan.

Hal yang pertama dilakukan dalam merumuskan strategi adalah mengenali sasaran. Karena dari karakteristik sasaran inilah, ditentukan siapa komunikator yang dipilih, apa isi pesannya, bagaimana cara menyampaikannya, serta saluran yang digunakan.

Khalayak dapat dikenali dari kerangka berpikir dan pengalamannya. Dari kesediaannya menerima pengaruh khususnya inovasi. Dari Status sosial dan ekonominya. Dari gaya hidupnya tradisional atau modern. Dari tingkat kelakuannya.

McQuail & Windahl (1993) melihat khalayak dapat dikenali dari pengetahuan, sikap dan perilakunya yang dapat berubah oleh kegiatan kampanye. Sementara Ferguson dikutip Venus, (2004) berpendapat : khalayak dapat dikenali dari Keyakinan, sikap, nilai, kebutuhan dan kepribadiannya. Sedangkan Antar Venus (2004) melihat khalayak dapat dikenali dari bagaimana khalayak menanggapi pesan-pesan kampanye. Setelah khalayak dikenali langkah selanjutnya dalam perumusan strategi kampanye adalah penyusunan pesan, yaitu menentukan isi dan strukturnya.

Hal yang terkait dengan isi pesan adalah materi pendukung pesan, ilustrasi/visualisasi pesan pendekatan

;;;;,asf1r.:

2Pii:

€, **^ .,.,o ?.*;/, zfiol ,L oK,L'l &,,io,on €/i,,iti,Uo, 6*li,*

rasa takut, pendekatan emosional, kreativitas dan humor serta pendekatan kelompok rujukan. Sangat mempengaruhi perubahan sikap orang yang menerima pesan tersebut. Karena itu isi pesan kampanye yang memenuhi syarat tersebut, diharapkan akan lebih mudah dievaluasi dan sasaran makin cepat menentukan sikap.

Wilbur Schram dikutip Aripin, (1984) mengajukan syarat syarat berhasilnya pesan kampanye sebagai berikut :

a. Pesan harus direncanakan dan disampaikan sedemikian rupa sehingga pesan itu dapat menarik

perhatian sasaran yang dituju.

- b. Pesan haruslah menggunakan tanda-tanda yang didasarkan pada pengalaman yang sama antara sumber dan sasaran, sehingga kedua pengertian itu bertemu.
- c. Pesan harus membangkitkan kebutuhan pribadi dari sasaran dan menyarankan cara-cara untuk mencapai kebutuhan itu.
- d. Pesan harus menyarankan sesuatu jalan untuk memperoleh kebutuhan yang layak pada situasi kelompok pada saat sasaran digerakan.

Pesan yang menarik terkait dengan intensitas dan persoalan pokoknya. Dia memberikan harapan terhadap apa yang dibutuhkan oleh sasaran. Juga dia menarik jika kontras, availability (mudahnya diperoleh). Dalam struktur pesan ada tiga aspek pembahasan yakni sisi pesan, susunan penyajian dan pernyataan kesimpulan.

3#,,

'%,,,/i 8;,,y,,,/i. c7a7*. e,/7; g it8,,/,,,/i, c*/:h aeft/-.*,/ ey'L;

Hal yang pertama terkait dengan apakah argumentasi disampaikan satu sisi saja atau dua sisi. Ketika Juru kampanye hanya menyampaikan pesan-pesan yang mendukung posisinya maka yang digunakan pola pesan satu sisi. Dan

jika Juru kampanye menyampaikan sebagian dari kelemahan posisinya maka yang digunakan pola pesan dua sisi.

Menurut Venus (2004) argumentasi dua sisi jauh lebih efektif ketika berhadapan dengan khalayak yang mempunyai

ciri :

- a. Berpendidikan tinggi atau cerdas.
- b. Menyadari adanya dua sisi yang berseberangan dari

suatu isu.

- c. Khalayak belum sepakat dengan posisi juru

kampanye.

Beberapa penelitian dibidang persuasi menemukan bahwa argumentasi dua sisi lebih efektif dalam penerimaan pesan, karena dalam pesan tersebut dimasukan argumentasi

yang mendukungnya sekaligus yang menentangnya.

Sebaliknya pelaku kampanye sebaiknya menggunakan argumentasi satu sisi ketika:

- a. Khalayak sudah dalam posisi mendukung posisi juru kampanye.
- b. Khalayak mudah bingung atau sulit memahami isu yang ada.
- c. Khalayak tidak menyadari adanya argumentasi yang berseberangan.

:.:]:}:::..:}

::3

t

&.. " ..,.,.,.,. 7"*:/, e o o t.,/; oAn /.,o/, c4,7,,",, cfl.,,t;'A,, 6 *1,;,)

Dalam hal penyajian pesan dapat disaiikan dalam bentuk klimaks, antiklimaks dan piramidal. Bila kampanye menginginkan penyaiian klimaks, maka argumentasi terbaik

ditempatkan dibagian akhir pesan. Sebaliknya untuk antiklimaks argumentasi terbaik ditempatkan diawal Pesan kampanye. Sementara pada penyaiian piramidal, maka argumentasi terbaik ditempatkan dibagian tengah Pesan kampanye.

Ketika tingkat perhatian khalayak lemah maka penyaiian

menggunakan antiklimaks Hal ini dapat dimengerti karena khalayak dengan tingkat ketertarikan yang rendah akan mem-

berikan porsi perhatian yang rendah pula. Sementara khalayak

yang memiliki perhatian dan minat yang tinggi disaiikan secara

antiklimaks. Sementara iika dilihat dari aspek penyaiian kesimpulan, bisa disaiikan secara ekspilisit atau implisit.

Dalam kaitanya dengan penyaiian kesimpulan ini Hofv an, Janis dan Kelley dikutip Venus,(2Oo4) menyimpulkan sebagai berikut:

- a. Secara umum, penyaiian kesimpulan secara eksplisit akan meningkatkan kemampuan iurukampanya dalam melakukan perubahan pada diri khalayak.
- b. Bagi khalayak yang kurang cerdas,pelaku kampanye akan lebih mudah mengubah pendapat mereka

dengan menyaiikan kesimpulan secara eksplisit.

c. Ketika khalayak mempersepsi pelaku kampanye akan memanipulasi mereka atau menarik keuntungan dari

mereka atau khalayak merasa dilecehkan dengan adanya kesimpulan yang tegas untuk mereka, maka

iurukampanye sebaiknya membiarkan khalayak membuat kesimpulan sendiri.

,,,BZ,i

'iE,,,h \$i,"t.../;, aYo%t ey'L; g'93,,,1,,,L,, (t//; c,9:/11,, "4 a./1,"

Untul isu atau pesan kampanye yang memunculkan keterlibatan yang tinggi dari khalayak atau gagasan yarrg bersifat personal sebaiknya iurul ampanye membiarkan kralayak membuat kesimpulan sendiri. Sementara untuk gagasan yang impersonal penyaiian

kesimpulan yang tegas akan membuat komunikasi lebih efektif.

Ketika berhadapan dengan isu isu yang kompleks maka akan lebih efektif bila kesimpulan dinyatakan secara ekspilisit..sedangkan pesan pesan yang lebih sederhana harus mempertimbangkan karakteristik khalayak sebelum menetapkan perlunya pernyataan kesimpulan yang eksplisit.

Langkah selanjutnya dalam merumuskan strategi kampanye adalah menyeleksi saluran kampanye. Mc Luhan dikutip Venus, (2004) secara tegas menyatakan bahwa teknologi komunikasi baru tidak hanya mengubah jumlah ketersediaan informasi di masyarakat tapi juga mempengaruhi isi pesan yang ditransmisikanya. Dengan kata lain bentuk media yang mempresentasikan informasi akan menentukan makna pesan yang disampaikan dan iuga derajat ambiguitas pesan tersebut.

Terkait dengan kemampuan media massa dalam mempengaruhi sikap, pendapat dan perilaku khalayak, Klapper dikutip Quail,(1987) membedakan enam jenis perubahan yang mungkin terjadi akibat penggunaan media massa yakni :

a. Menyebabkan perubahan yang (konversi).

diinginkan

d.

e.

'%,,,/,; &,,,t,,,L, ,le7;, .t./; g-:::8"r" ,,,/, . 6y'/; aful*" ,/, ay"L,

- b. Exposer my be and often repeated
- c. Treatment my be fulled
- d. Specialiced Appear is possible
- e. Possible Greater prestige

Kelebihan yang pertama, dimana medium ini memberikan kesempatan kepada pembaca untuk memilih materi materi yang sesuai dengan kemampuan dan kepentingannya. Dan pembaca lebih laniut dapat membacanya setiapkali dia ingin dan kapan dia ingin berhenti" Juga ia dapat membuat resume apabila dianggap perlu.

Kelebihan kedua, dimana medium ini tidak terikat oleh waktu dalam mencapai khalayaknya. Dan mereka secara bebas dapat kembali membaca pada material yang pernah dibacanya Dengan kata lain pembaca dapat tetap menyegarkan ingatannya dan dapat menikmati kembali kepuasan yang pernah dinikmatinya.

Kelebihan yang ketiga, dimana medium ini dapat mengembangkan suatu topik sampai kesuatu tingkat yang diinginkanya.,misalnya melalui medium elektronik.

Kelebihan yang keempat, dimana medium ini mempunyai banyak kemungkinan pemunculan yang lebih luas dan kebebasan gaya yang lebih besar dalam memenuhi selera pembaca.

Kelebihan yang kelima, dimana medium ini punya prestige sebagai medium tertua hasil dari sebuah kebu dayaa n

Sementara Radio menurut Lazarleld, Barelson dan gaudet dikutip Doob mempunyai macam keunikan :

...:::,iirliiii

.,lll

I

&o* ,.ro 7.*;/u zoon r/; tffi.Ln/, &,ry*urnn drt*;t;'9o*6-7 ""

- a. Khalayak menerimanya sebagai suatu kesempatan seremonia I.
- b. Para pendengar mempunyai suatu a sense of personal acces, corak partisipasi yang hidup.
- c. Adanya suatu approach? untuk a face to face contsct.
- d. Radio mempunyai keuntungan yang unik ,yakni

kecepatannya dalam penyebaran berita.

e. Pendengar pendengara radio dapat membentuk

dirinya dalam suatu group, karena secara simultan para pendengar itu menggabungkan diri dalam mendengarkan materi yang sama.

Film sebagai alat komunikasi massa iuga memiliki keunikan :

- a. Kebanyakan persoalan dan hal hal yang bersifat abstrak, dan samar samar serta sulit dapat disuguhkan pada khalayak secara lebih baik dan efisien.
- b. Medium Film lebih mudah diingat karena sifat audio visualnya.
- c. Lebih mudah diterima tanpa banyak pertanyaan.
- d. Mempunyai asfek emosional yang sangat besar.

Sedangkan Televisi lebih menyempurnakan penemuan penemuan Teknologi Komunikasi sebelumnya. Adapun kelebihan yang dimiliki televisi adalah :

- a. Memiliki kelebihan yang dimiliki medium radio dan Film.
- b. Mengatasi kelemahan yang dimiliki keduanya.

?t?:ihz l!

3oi

f,

—

'%,,,L 8,,,7o,/,,, a9.e7"', a/L; E"%oln,,,Lo .ty'/; 6y'fu-*4 ey'L;

c. Langkah terakhir untuk merumuskan strategi kampanye adalah menetapkan iuru kampanye yang tepat. Dalam hal ini, pijakan utama sama seperti pada langkah perumusan sebelumnya yaitu berpijak pada karakteristik khalayak.

iuru kampanye yang berbeda dengan Pesan yang sama untuk khalayak yang sama dalam suasana yang sama pula,

dapat menimbulkan efek yang berbeda. Artinya, tidak semua iurukampanye mempunyai daya tarik yang sama. Khalayak memiliki iurukampanye kesayangan dan keper-

cayaan. Kadang kadang pengaruhnya lebih kuat dari Pesan yang disampaikan ke khalayak sangat menghargai

iurukampanye yang berkompeten, yang dikenal, yang dikagumi dan cukup disegani.

Kepercayaan khalayak kepada iurukampanye tergantung

kepada hal hal berikut:

- a. Kemampuan dan keahlian mengenai pesan yang disampaikan.
- b. Kemampuan dan ketrampilan dalam menyusun dan menyajikan pesan, menyeleksi media, dan mengenali khalayak.
- c. Memiliki keperibadian dan budi pekerti yang baik dan disegani.
- d. Memiliki keakraban atau hubungan baik dengan khalayak.

Seorang iuru kampanye adalah sebagai komunikator, haruslah peduli dengan kredibilitas dirinya sendiri, dimana

liri

ef, , , , , . i? . * ; / , , zoo* / ; alG / , . / . cZ / o , , on c / ** ; n , A , . V . I **

kredibilitas berkaitan dengan persepsi khalayak tentang keefektifan seseorang sebagai pembicara. Jika dia kredibel, maka pesan-pesan yang disampaikan kemungkinan besar akan didengarkan dan diterima.

Menurut Hovland, Janis dan Kelley dikutip Windahl (1992) ada tiga aspek yang mempengaruhi kredibilitas sumber, yakni :

- a. Keterpercayaan (Trustworthiness).
- b. Keahlian (Expertise).
- c. Daya tarik (Attractiveness).

Keterpercayaan berkaitan dengan penilaian khalayak bahwa sumber informasi dianggap tulus, jujur, baik, adil, obyektif, memiliki integritas pribadi serta memiliki tanggung

jawab sosial yang tinggi.

Sementara keahlian berhubungan dengan penilaian dimana sumber dianggap berpengetahuan, cerdas, berpengalaman, memiliki kewenangan tertentu dan memiliki

skill yang bisa diandalkan. Sedangkan daya tarik meliputi penampilan fisik dan identifikasi psikologis (kesamaan nilai atau kepribadian lainnya).

Disamping hal di atas McCroskey, Jensen dan Valencia dikutip Windahl (1992), menambahkan faktor keterbukaan (extroversion), Ketenangan (Composure), Kemampuan bersosialisasi (Sociability.) dan Karisma sebagai faktor pendukung kredibilitas iuru kampanye.

Pada dasarnya juru kampanye harus bisa diterima oleh sasaran, karena itu paling tidak harus ada banyak kesamaan diantara keduanya. Dalam hal ini Rogers dan Shoemaker

'=jifilf=

&

'%,,/; &,,yo.,/,: &a7^, ey"L; E'%ol,u,L. 6y'/; 6{l/,-."/ e'd(",;

dikutip Windahl (1992) menyebut istilah homofil. Sedang

iika juru kampanye mempunyai perbedaan dengan sasarannya

disebut dengan istilah heterofili.

Jika terjadi keadaan heterofili diantara keduanya, sedangkan iuru kampanye tidak punya cukup waktu untuk berinteraksi dalam rangka mengenal khalayak, maka

iurukampanye dalam mengambil ialan praktis dengan menanyakan identitas formal mayoritas sasaran kepada pihak penyelenggara kampanye. Dengan mengetahui hal tersebut iurukampanye dapat berempati secara optimal, baik

dalam sikap perilaku maupun dalam mengolah dan menyaiikan pesan.

Selain hal hal di atas, seorang iurukampanye iuga harus

dapat bekerjasama dalam sebuah team. Zalman dkk dikutip

Venus (2004), membagi tim keria kampanye dalam dua kelompok yakni leaders (pemimpin pemipin atau tokoh tokoh) dan supporters (pendukung ditingkat akar rumput). Dalam kelompok leader terdapat coordinator pelaksana, penyandang dana, petugas administrasi kampanye, dan pelaksana teknis. Sementara dalam kelompok supporters terdapat petugas lapangan atau kader, penyumbang, dan simpatisan yang meramaikan acara kampanye. Penge-lompokan pelaku kampanye diatas penting dalam rangka mengidentifikasi dan pembagian tugas orang orang yang terlibat dalam kampanye.

Sementara Thayer dikutip Windahl (1992), membedakan dua jenis pelaku kampanye (atau mediator) yakni:

- a. Instrumental mediator yang berfungsi sebagai juru kampanye anonim, dan b. Consumatory mediator yang

menyampaikan informasi, *

!.:r.:i3r9=

&

a:fr ,,,," ., 7",. ; 1, z n o t,/. olC, /, n /. oX.i,, n o/i-,,; r;;'9 o, 6,,1, ;,

mempresentasikan lingkungan nyata dari situasi atau gagasan yang dikampanyekan. yang pertama meliputi semua orang yang dapat dijadikan penyambung lidah sumber atau penyelenggara kampanye. yang kedua terdiri dari orang-orang yang pernah mengalami hal-hal yang dianjurkan atau mereka yang memiliki pengetahuan mendalam tentang hal tersebut, atau mereka yang memiliki simpati dan keterlibatan yang mendalam tentang hal-hal yang dikampanyekan.

Berikut disampaikan beberapa strategi kampanye dalam bentuk propaganda, periklanan dan retorika. Nimmo, (1993). Di dalam kegiatan propaganda dikenal adanya strategi kampanye sebagai berikut:

- a. Name Calling, yakni memberi label kepada gagasan, orang, obyek atau tujuan agar orang menolaknya tanpa menguji kenyataannya.

- b. Glittering Generalities, yakni menggunakan kata yang baik, untuk melukiskan sesuatu agar mendapat dukungan, tanpa menyelidiki ketepatan asosiasi itu.

- c. Transfer, yakni mengidentifikasi suatu maksud dengan lambing otoritas.

- d. Testimonial, yakni menggunakan ucapan orang yang dihormati atau dibenci untuk mempromosi atau meremehkan.

- e. Plain Folk, yakni pembicara mengidentifikasikan dirinya berpihak kepada khalayak dalam usaha bersama kolaborator.

.....:lia

4,qi,'

d4," ,,,* ,,,. Pno.:/, , zrtrta /, aJGLel: eX,,1,,u.n €.,.,.:r;.gon ff,"7:,,,;

mempresentasikan lingkungan nyata dari situasi atau gagasan yang dikampanyekan. yang pertama meliputi semua orang yang dapat diadukan penyambung lidah sumber atau penyelenggara kampanye. yang kedua terdiri dari orang-orang yang pernah mengalami hal-hal yang dianiurkan atau mereka yang memiliki pengetahuan mendalam tentang hal tersebut, atau mereka yang memiliki simpati dan keterlibatan yang mendalam tentang hal-hal yang dikampanyekan.

Berikut disampaikan beberapa strategi kampanye dalam bentuk propaganda, periklanan dan retorika. Nimmo, (1993). Di dalam kegiatan propaganda dikenai adanya strategi kampanye sebagai berikut:

- a. Name Calling, yakni memberi label kepada gagasan, orang, obyek atau tujuan agar orang menolaknya tanpa menguji kenyataannya.
- b. Glittering Generalities, yakni menggunakan kata yang baik, untuk melukiskan sesuatu agar mendapat dukungan, tanpa menyelidiki kerepatan asosiasi itu.
- c. Transfer, yakni mengidentifikasi suatu maksud dengan lambing otoritas.
- d. Testimonial, yakni menggunakan ucapan orang yang dihormati atau dibenci untuk mempromosi atau meremehkan.
- e. Plain Folk, yakni pembicara mengidentifikasikan dirinya berpihak kepada khalayak dalam usaha bersama kolaborator.

40,

G

T.

':t8,,;/; o9,

",r,,

;/, 8 e7,,. y'L; g|% "./,,,;/; ". ca//; o!7 1,,-"/, e //, ;

Card Staking, yakni memilih dengan teliti pernyataan yang akurat dan tidak akurat, logis dan tidak logis dan sebagainya dalam membangun suatu kasus.

Band Wagon, yakni usaha meyakinkan khalayak

akan kepopuleran dan kebenaran tujuan kandidat.

Berbeda dengan strategi kampanye propaganda, pada aktivitas periklanan dikenal strategi sebagai berikut:

a. Penggunaan Pesan Pesan Direktif, yakni para iuru kampanye berusaha merubah kepercayaan, nilai, pengharapan dan perilaku orang.

b. Penggunaan pesan pesan yang memelihara dan mempertahankan pandangan orang. Pesan pesan itu

tidak mengubah atau mengalihkan tetapi memperkuat.

c. Digunakan Pesan Pesan Yang Restoratif, yakni menggunakan rasa individualitas orang, mengarahkan perhatian, dan mengikatkan orang tidak hanya kepada satu gagasan, tetapi kepada seperangkat kemungkinan, serangkaian pilihan yang dapat dipilih dengan bebas dan spontan.

Sementara itu pada kampanye Retorika dikenal, strategi atau gaya retoris untuk melakukan imbauan khusus, sebagai berikut :

a. Ekshortif, yaitu mendesak khalayak untuk melakukan sesuatu masalah yang membutuhkan penyelesaian segera.

o5'

4+

t"

&****.7.^;/ zool J; cim.L"/, €;nV,*o &eih@**S*V;;,a

Legal, yaitu penggunaan bahasa resmi di form resmi.

Birokratis, yaitu penggunaan iargon teknis, atau uraian berbelit belit, yang dikaitkan dengan kaidah, peraturan dan tindakan kebijakan pemerintah terhadap masyarakat umum.

Tawar menawar, yakni, memberi dan menerimadari kompromi, barter, balas jasa dan percakapan politik.

Tertutup/ Terbuka, yaitu pertama mengacu kepada ucapan yang berhati hati, acuh tak acuh. Caya terbuka lebih spontan, kurang terprogram, kadang kadang menyingkapkan dan bahkan menelaniangi.

::-:4.-*=

b.

c.
d.
e.
t

E[skrivirns Onqnnisnsi

rganisasi adalah setua seiarah manusia. Sepanjang masa, orang telah bergabung dengan yang lain

untuk mencapai tuiuan mereka, mula-mula dalam keluarga, kemudian dalam suku dan unit-unit politik yang lebih teratur dan rumit. Orang-orang purbakala mendirikan piramida, candid an kapal; mereka menciptakan sistem pemerintahan, peternakan, perdagangan dan perang. Misalnya ahli seiarah Yunani mengatakan bahwa diperlukan IOO.OOO orang untuk membangun firamida besar khufu di Mesir dan untuk menyelesaikan proyek itu diperlukan lebih dari 20 tahun. (Cibson dkk, 1992).

Organisasi pada iaman modern saat ini merupakan sesuatu yang sangat diperlukan (urgen) dan hampir semua aspek kehidupan manusia tidak pernah lepas dari keterlibatan adanya organisasi. Kadang-kadang yang membedakan karakter organisasi dulu dengan sekarang hanya pada manajemen yang dilakukan individu sehingga organisasi itu dapat berfungsi secara optimal.

Secara def inisi, organisasi menurut Siagian (1 995), merupakan setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam

G

ofr. ", " ,,,,Zami/t, 2004 ,l: alc,/,,/ , o/1,i,,,,,,.o e/|,,,r;'9".6-7;"

rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan, dalam ikatan mana terdapat seseorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seorang/sekelompok orang yang disebut bawahan.

Admosudirdjo (1976), mendefinisikan organisasi sebagai struktur tata pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antara sekelompok orang-orang pemegang posisi yang bekerja sama secara tertentu untuk bersama-sama mencapai suatu tujuan tertentu.

Orang mendirikan organisasi karena beberapa tuiuan

tertentu hanya dapat dicapai lewat tindakan yang harus dilakukan dengan persetujuan bersama. jadi, apakah tujuan itu laba, pemberian pendidikan, agama, atau pemeliharaan kesehatan, pemilihan calon atau pembangunan stadion sepak bola baru, namun ciri organisasi itu tetap sama: perilaku terarah pada tujuan (goal-directed behavior), artinya organisasi itu mengejar tujuan dan sasaran yang dapat dicapai secara lebih efisien dan lebih efektif dengan tindakan yang dilakukan secara bersama-sama. (Gibson dkk, 1992).

Artinya juga apapun bentuk organisasi itu, apabila ada sekelompok individu didalamnya maka dapat dikatakan sebuah organisasi, tetapi yang membedakannya antara organisasi besar dan kecil hanya pada luas/tidaknya struktur yang digunakan. Sebagai misal, lembaga KPU dan PASWASLU merupakan suatu organisasi yang bergerak dalam label pemilihan calon legislatif dan eksekutif. Sehingga sebagai sebuah organisasi KPU dan PANWASLU, tentunya individu di dalamnya mempunyai tujuan yang ingin di capai namun bagaimana tujuan itu tercapai secara efektif?

;;,4.4=

t

Adapun kerangka kerja gambar yang diadaptasi dari

pada

yaitu:

STRUKTUR

PROSESI
AKTIVITAS

Kerangka di atas menunjukkan unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah organisasi. Unsur-unsur itu saling berhubungan satu dengan lainnya sehingga membentuk kerangka kerja organisasi. Adapun penjelasan dari ketiga unsur itu dapat dilihat sebagai berikut:

Perilaku

Sebagai suatu bidang studi, perilaku organisasi

mencakup semua aspek yang berhubungan dengan tindakan

manusia yang tergabung dalam suatu organisasi atau kelompok kerjasama, yaitu aspek pengaruh organisasi terhadap manusia dan juga sebaliknya; pengaruh manusia itu sendiri terhadap organisasi. (Indrajaya, 1989).

Secara sederhana, dalam mempelajari perilaku organisasi tercakup empat unsur utama (Nord dikutip Indrawijaya, 1989), yaitu:

ii:it:lltnffr.W

+58

'%,,t &"" , "t, &&L er'L; g?.8ot.,,/,;. e//; @/t/,-* /,,a,y'L,

organisasi dapat dilihat
Gibson dkk berikut ini,

I-oRANGI--_I

I epnu-eru I

i1,,,,. ",. 7e * i /,, 2 o 0 4,;/; aK; /,"/ . &],,.. c4* , ; r. ;., A,. V -y ; ;.,

Aspek psikologis tindakan manusia itu sendiri, sebagai hasil studi psikologi; Adanya bagian lain yang diakui cukup relevan bagi usaha mempelajari tindakan manusia dalam organisasi" Uang misalnya merupakan salah satu faktor/pertimbangan mengapa seseorang memasuki suatu organisasi. Oleh sebab itu, Ilmu Ekonomi perlu juga mendapat perhatian. Psikologi, sebagai contoh lain, penting karena sikap (attitude) akan mempengaruhi prestasi orang yang bersangkutan. Perilaku organisasi sebagai suatu disiplin, mengakui bahwa individu dipengaruhi oleh bagaimana organisasi diatur dan siapa yang mengawasi mereka. Oleh sebab itu, struktur organisasi memegang peranan penting dalam membahas perilaku organisasi; Walaupun disadari akan adanya keunikan masing-masing individu, perilaku organisasi lebih banyak menekankan pada tuntutan manager bagi tercapainya tujuan organisasi secara keseluruhan. Dengan demikian. Selalu diusahakan agar usaha masing-masing individu selaras dengan tujuan organisasi.

Str u ktu r

Struktur keorganisasian mempengaruhi individu dan

kelompok dalam beberapa cara yang penting. Sebenarnya pengaruh struktur keorganisasian perilaku itu sangat mendalam sehingga perlu dimasukkan ke dalam penentuan

l:::.,;a:::l

,,'4,6]'

2.

3.

4.

t

'o%,,;/; &.,.yo,/;, 88^, er'L; g"%olnu,.ho 6/.h c5*1.-."/, oy'L;

istilah, misalnya: struktur keorganisasian bagi keperluan kita akan didefinisikan secara luas sebagai cirri-ciri organisasi yang dapat digunakan untuk mengendalikan atau

membedakan bagian-bagiannya. Jadi, satu tujuan dari struktur organisasi adalah mengendalikan perilaku, menyalurkan dan mengarahkan perilaku untuk mencapai apa yang di anggap menjadi tujuan dari organisasi. (Cibson

dkk, 1992).

Selanjutnya, pernyataan struktur keorganisasian

memudahkan tercapainya tujuan keorganisasian, mengasumsikan bahwa para manajerial mengetahui bahwa cara mencocokkan struktur keorganisasian dan tujuan dan bahwa

mereka menginginkan untuk berbuat demikian. Kiranya sangat beralasan untuk mengemukakan bahwa dalam banyak hal, struktur keorganisasian tidak membantu secara

positif hasil karya keorganisasian karena para manajerial tidak

mampu leat pelatihan atau kecerdasan untuk mendesain suatu struktur yang mengendalikan dan menyalurkan perilaku individu dan kelompok untuk mencapai tingkat produksi yang tinggi, efisien, kepuasan, penyesuaian diri

dan pengembangan.

Proses

Cibson dkk, 1992, mengemukakan proses dalam organisasi menyangkut fungsi yang dilakukan oleh manajerial. Fungsi manajerial mengenai perencanaan, Pengorganisasian dan pengendalian semuanya melibatkan manajerial dalam pengambilarr keputusan dan komunikasi tertentu. Dan dalam kenyataannya, fungsi manajerial tersebut

*+

t

c/2,.....",,,, 'J/.*;/, z0oa ,/; aK,/"/, &n/,,,on cfl,o,;t-,9". €*7;,"

mengenai perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian yang dilaksanakan oleh maniaier.

Komunikasi dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh seorang pimpinan atau manajer berakibat pada berjalannya proses keorganisasian suatu organisasi tertentu. Sehingga tanpa adanya komunikasi dan pengambilan keputusan maka suatu organisasi tidak akan dapat berproses.

Proses komunikasi datram organisasi berhubungan dengan (5) lima unsur, yaitu komunikator, pesan, jalur, penerima dan umpan balik. Kelima unsur ini lah yang saling berhubungan dalam proses organisasi. Masing-masing unsur ini menciptakan sebuah rangkaian aktivitas dari individu yang ada di dalam organisasi tersebut.

Proses pengambilan keputusan sebagai gambaran cara orang mengambil keputusan, yang juga sebagai konsekuensi dari informasi yang mereka terima baik dari struktur organisasi maupun lewat perilaku dari orang dan kelompok dalam sebuah organisasi.

Efektivita s

Istilah efektivitas sering digunakan pada rangkaian

akhir dari keria sebuah organisasi, dengan kata lain hasil akhir (output). Apakah hasil akhir organisasi iru menggambarkan efektivitas atau tidak dalam pencapaian tuiuan organisasi.

Walaupun banyak orang yang setuju bahwa manaiemen memegang peranan utama dalam mencapai efektivitas organisasi, tetapi sulit sekali memperinci apa yang dimaksud

4a:

&

'%,, /; &, "*/,; , & a7;" , o/7 ; g"% o Ln, /;, 6il; 6*t *"/, ay'L ;

dengan konsep efektivitas itu sendiri. Bagi seorang ahli ekonomi atau analisis keuangan, efektifitas orgapisasi adalah keuntungan atau laba investasi. Bagi seorang maniaier produksi, efektivitas sering kali berarti kuantitas atau kualitas keluaran (out put) barang atau iasa. Bagi seorang ilmuan riset efektivitas diibarkan dengan iumlah paten, penemuan atau produk baru suatu organisasi. Dan bagi sejumlah sariana ilmua sosial, efektifitas seringkali ditinjau dari sudut kualitas kehidupan pekeria. Singkatnya, pengertian efektifitas organisasi mempunyai arti yang berbeda bagi setiap orang, bergantung pada kerangka

acuan yang dipakainya. (Steer, 1984).

Menurut Indrawan (1989), untuk menilai apakah suatu organisasi efektif atau tidak, secara keseluruhan ditenttkan

olch apakah tuiuan organisasi itu tercaPai dengan baik atau

sebaliknya. Berikut ini akan dikemukakan beberapa aspek penilaian efektifitas organisasi, terutama yang berkaitan dengan model-model yang dapat dipergunakan, sebagai berikut:

Teori yang paling sederhana ialah teori yang berpendapat bahwa efektifitas organisasi sama dengan prestasi organisasi secara keseluruhan. Menurut pandangan ini, efektifitas organisasi dapat diukur berdasarkan seberapa besar keuntungan yang diperolehnya. Dalam hal misalnya, keuntungan yang lebih besar, maka berarti organisasi makin efektif. Dari sisi lain, organisasi dapat dikatakan efektif bila jumlah pengeluaran makin lama makin menurun. Dengan perkataan lain, menurut teori ini efektifitas organisasi ditentukan oleh efesiensinya.

*

&o**** 7.*/,. Zoot,/; &/,"1 &/o,,, €*zit*9oo\$-.y;,*

Pandangan lainnya teori yang menghubungkan pengertian efektifitas organisasi dengan tingkat kepuasan para anggotanya. Menurut pandangan teori ini, sesuatu organisasi dikatakan efektif bila para anggotanya merasa puas.

'Teori atau pandangan yang lebih konprehensif, dalam arti membahas persoalan efektifitas organisasi berdasarkan berbagai macam ukuran. Pandangan ini berpendapat bahwa susunan organisasi memeang merupakan sesuatu hal yang penting, tetapi dalam susunan tersebut perlu diberikan kebebasan bertindak. Adanya kebebasan bertindak ini sangat penting untuk memungkinkan para anggota dan organisasi secara keseluruhan dapat lebih menyesuaikan diri dengan tuntutan perubahan.

Teori lainnya dari Etzioni, sistem model dalam mengukur efektifitas organisasi. Sistem model dalam pengukuran efektifitas organisasi mencakup 4 (empat) criteria, yaitu: adaftasi, integrasi, motivasi dan produksi. Adaftasi dimaksudkan dengan kemampuan organisasi menyesuaikan diri dengan ekadaannya. Integrasi berhubungan dengan kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan consensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Motivasi dihubungkan dengan keterikatan dan hubungan antara pelaku organisasi dengan

organisasinya serta kelengkapan sarana bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi. Produksi dihubungkan dengan jumlah dan mutu keluaran organisasi serta intensitas kegiatan suatu organisasi.

steers,

 **Plagiarism detected: 0,04%** <https://yukerahmawati.wordpress.com...> + 2 resources!

id: 70

mengembangkan model suatu proses untuk menilai efektifitas organisasi, yang mencakup

3 (tiga) sudut

'9),,,/; &,ng,..l;, &a7*+ a'/L; g.%o1,../;. @//; @*1,.a/, ay"li;

pandang, yaitu pertama, optimasi tuiuan yang akan dicapai.

Bila beberapa bagian dari tuiuan itu mendapat Perhatian dan

 **Plagiarism detected: 0,14%** <https://yukerahmawati.wordpress.com...> + 2 resources!

id: 71

alokasi sumber dana dan daya yang lebih besar. Kedua,

berkaitan dengan interaksi antara organisasi dengan keadaan sekeliling. Ketiga, penekanan pada aspek perilaku

yang lebih memusatkan perhatian pada pentingnya Peranan perilaku manusia dalam proses

pencapaian tuiuan

organisasi dan dalam efektifitas suatu organisasi'

Mengingat keaneka-ragaman pendapat mengenai sifat

dan komposisi mengenai efektivitas organisasi, maka tidaklah mengherankan iika terdapat sedemikian banyak pertentangan pendapat sehubungan dengan cara-cara meningkatkan efektifitas ini dalam organisasi yang sedang berjalan.

Menurut Indrawijaya (I 998), berdasarkan perkembangan teori, pandangan

 **Plagiarism detected: 0,26%** <https://yukerahmawati.wordpress.com...> + 2 resources!

id: 72

dan konsepsi penilaian efektifitas organisasi tersebut di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu:

I. Menentukan efektifitas organisasi hanya menurut tingkat prestasi suatu organisasi adalah suatu pandangan yang terlalu menyederhanakan hakekat penilaian efektifitas organisasi. Kita mengetahui bahwa setiap organisasi memPunyai beberapa sasaran dan diantaranya sering terdaPat persaingan.

Persoalannya ialah bagaimana caranya mengem-
bangkan suatu rangkaian atau kumpulan sasaran
yang dapat dicapai dengan batasan sarana,

sumber

daya dan dana yang tersedia;

Iti:-i=

5+

&

2. Tidak semua criteria

 **Plagiarism detected: 0,18%** <https://yukerahmawati.wordpress.com...> + 2 resources!

id: 73

sekaligus dapat digunakan
untuk mengukur efektifitas organisasi. Keinginan
untuk meningkatkan keuntungan , umpamanya,
dapat menyebabkan seseorang terlalu optimis dalam
hal potensi pemasaran. Ini sering menyebabkan

' timbulnya efek sampingan, yaitu kurangnya
perhatian terhadap usaha mempertahankan
kelangsungan hidup organisasi perusahaan

3. pengukuran efektifitas organisasi sesungguhnya
harus mencakup

berbagai criteria, seperti: efesiensi,
kemampuan menyesuaikan diri dengan tuntutan
perubahan adaftasi, integrasi, motivasi dan produksi
dan sebagainya. Cara pengukuran seperti

 **Plagiarism detected: 0,03%** <https://yukerahmawati.wordpress.com...> + 2 resources!

id: 74

ini sering
disebut "multiple factor model" penilaian efektifitas

organisasi.

ffi&

t

'iirr i,r,it]

!i.l

@,2

KASUS

l.

i1

! \!;i-4

":i#
iirt:!!

i;,,,;1

..... -: lir:t:-.'::=
a=,,,tr:ia.;:4 =lisilpff

Bnbk kr 2
Enn Mulri Pnnrni Polirik

7//aksud iudul ini hanya sebagai pertanda dari multi U/[e^rtai politik pada masa reformasi ini, walaupun kita ketahui negara Indonesia sudah biasa dengan istilah multi partai politik pada masa orde lama. Pada masa orde lama yaitu tahun 1955 iumlah partai politik yang ada sekitar 52 (lima puluh dua) partai politik.

Namun pada masa orde berikutnya atau orde baru iumlah partai yang banyak tersebut dikerucutkan atau disederhanakan sebanyak 3 (tiga) partai politik (partai-partai politik yang beragam aliran ideologis dipusikan menjadikan 3 partai politik).

Partai politik yang ada tersebut diharuskan mempusikan diri ke dalam 3 (tiga) partai politik sesuai dengan asas dan basis ideologis partai politik. Partai politik tersebut ppp (partai persatuan pembangunan), Golkar (partai golongan Karya) dan PDI (partai demokrasi Indonesia).

Reformasi merupakan tanda dari beralihnya orde baru ke orde berikutnya, di mana semangat reformasi memuncak dengan pembaharuan dan perubahan pada tatanan politik bangsa Indonesia, yang salah satunya di tandai dengan kebebasan politik bagi masyarakat untuk mendirikan partai politik.

"r;u-o i

€u, o -, . n o 7. * . ; / , z o it l / ; cj4, / , n /. aT rr; o u... €o, i l i t ?- +,,. V -f ; , ;

Kebebasan politik rakyat khususnya dalam pendirian partai politik di iustificasi ke dalam bentuk Undang-Undang politik baru, yang sebagai penganri Undang-Undang politik lama. Undang-Undarig politik baru ini salah satunya UU No. 2 tahun 1 999 tentang partai politik. Misalnya pasal 2 ayat (l) menyebutkan: "sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) orang warga negara Indoneia yang telah berusia 2l (dua puluh satu tahun) dapat membentuk partai politik,,.

Sehingga kebebasan politik ini di dimanfaatkan masyarakat dengan beramai-ramai mendirikan partai politik, alhasilnya kemunculan partai politik ibarat cendawan di

musim hujan merebak ke sana ke mari tak tentu arah. pada tahun 1999 terdapat di Defkhe jumlah partai politik yang mendaftar dan sah untuk ikut pemilu 1999 sebanyak 141 (seratus empat puluh satu) partai politik.

Banyaknya jumlah partai politik ini sebenarnya bukti bahwa kebebasan berpolitik itu sangat dimanfaatkan masyarakat. Namun dikarenakan seleksi administrasi secara faktual menyebabkan jumlah partai politik yang resmi ikut pemilu 1999 merosot tajam jumlahnya dari 141 (seratus empat puluh satu) partai politik menjadi hanya 48 (empat puluh delapan) partai politik.

Seleksi faktual ini seperti eliminasi bagi partai politik yang tidak memenuhi syarat-syarat ketentuan pemilihan umum tahun 1999. misalnya ada saja partai politik yang tidak memiliki kantor di cabang kabupaten atau kabupaten KTP penduduk sebagai pengurus di dunia partai politik, partai politik yang tidak memiliki kepengurusan di tingkat kabupaten, dll.

'%,k &,2,,L, c,7&. o./.(,; g?B*.1*,,,1). 6y'/; c\$y'u*" / ay'.L"

Pemilu tahun 1999 merupakan babak pertama dari

multi partai politik pada masa reformasi, artinya sekitar 32 tahun baru pada saat ini negara Indonesia kembali ke era multi partai politik, yang pada awal jumlahnya sekitar 48 (empat puluh delapan) partai politik. Adapun partai politik yang terdaftar pada pemilu 1999 dapat dilihat pada tabel di bawah ini, sebagai berikut:

Tabel 2. Peserta Pemilu 1999

Partai Indonesia Baru

..*J '::t-:T:l:"*

l,) o,:lj:b,"clitan ummat

8. l, e"r,", vafumi oaru

, *:'o::11"-lalsunan _*_l
_11|

partai-syarikat tsлам Indonesia I

J

lil

-::--j ::':11

D:mokrasi r'sih eangsu

+
&.no*,* 7.n,;1, zool /; dXZA.I &;npuo* €*;a'Uo* ff*1;-L

:r.*l .1ta::* ,rt"rn ,naon"ria reos

\$.r-"-i'i'r.r".t1
--- * j

:-:---i::l:"1""1":Y:: - - lilt:*::=-.=-*----_j
zt. I orrr", politik tislam Masyumi

zz- | o"ri", Bulan Bintang

:-I Partai Solidaritas Pekerja

ij1*J '-""""uo"un .---_J
1 ,t. I o"r,u, Nahdlatul ummat II _t-*----_**.---..-- __J

i zs. i our,r, tislam Demokrati*_l_

I
34. I Purt"i Persatuan ____t __-,_

':-I Partai Kebangkitan Bangsa

i
_J

I
:::;:::ii:i!:

*,*ii,
1 ,u. I o",,r' t.t"ri"r"l Indonesia-Front Marhaenis

l._...r*_
t1
i 27. I Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia

i *_ " _J _ _j-^r^-.^,,i-!:-i *:!:-"*I
%,t, 8" ,," a:, & &, o /1,; g"%,,/,,,/, 6y'/; 6y'/. / -.,,/, ay'/.,"

36. ! eartai Uni Demokrat Indonesia

Partai Buruh Nasional

1.1

38. i Partai Musyawarah Kekeluargaan

rg. i orr,"tDaulat Rakyat

Partai Cinta Damai

Partai Keadilan dan Persatuan

Partai Solidaritas Pekerja Seluruh Indonesia

Partai Nasional Bangsa Indonesia

Partai Bhineka Tunggal Ika Indonesia

. ;:

45. i Partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia

l:

i

46. i Partai Nasional Demokrat

l:

;;. i. t"r,"i

"-"i

,urr,rn Indonesia

,

48. !, nartai Pekerja Indonesia

Sumber: Defkeh 1999.

Kemudian pada pemilu 2004 terjadi perubahan kembali tata tatanan kehidupan politik. yang berujung pada keluarnya produk baru UU politik dan otomatis menggantikan UU politik sebelumnya.

Undang-Undang politik baru ini memuat aturan lebih ketat mengenai syarat. bagi partai politik untuk ikut pada pemilihan umum tahun 2004. Syarat atau seleksi ini tercantum pada pasal-pasal yang terdapat pada UU No. 31 tahun 2002 tentang partai politik dan UU No. 2 tahun 2003 tentang pemilihan umum.

wffi

6

j

40. i

:4t.

:

,*---_**j

42-

i

143. 1

d/,nno**no Tcni/,,. p004.1.; o-Kolel: oZop,o- &o,it-,U.^ ff-y;;

Pasal-pasal dalam UU ini mengatur partai politik dengan istilah electoral threshold (ambang batas) dan syarat-syarat perolehan jumlah kursi DPR, DPRD propinsi dan DpRD Kabupaten/Kota. Bagi partai politik yang tidak memenuhi syarat ini akan di eliminasi untuk tidak ikut pemilu tahun 2004.

Alhasilnya dari jumlah partai politik semula hasil pemilu 2004 sebagai 48 (empat puluh delapan) partai politik mengalami pengurangan kembali menjadi hanya 24 (dua puluh empat) partai politik yang secara resmi dan sah untuk ikut pemilu pada tahun 2004. adapun jumlah partai politik yang terdaftar pada pemilu 2004 dapat dilihat pada table berikut ini, yaitu:

)

No. i Partai Polirik

l.

i

I Keterangan I,----I

I. i eartai Amanat Nasional

--- _,-,l_ _ -_-_-

I rectoral Threshold I1

1

;ll

, 2. I Partai Bulan Bintang i Electoral Threshold :

| 3. I orr,r' Demokrasi Indonesia : Electoral Threshold irrrl

i_jl:::s:: * _i_*

tt

:i l: '_11_':_:_c:"l'i"l1- _;:',:::"l1l::: _ i

i:-j. ;":T::*i':y::: - . li El""to'u'lr""r':-**-J

i :-i-:::""::::---'4iy::Tr::L----1

ii.i

; 7. I eartai Demokrat i Lolos verifikasi factual di 2S Ilri

ffi!li.i:1:::==

ffi.ifr:=

I
13. !: Partai Persatuan Demokrasi

i Kebangsaan
:1

I4. i: Partai Perhimpunan Indonesia { f-olos verifikasi factual di 22r|,

'!8",L &,*y*/i cZafl,, ay'L; g"*],,1*,,,/, (8//,; 6//l.-"/, ay'l,;

Partai Bintang Reformasi Lolos verifikasi factual di 23 i

Lolos verifikasi factual di 23

prov.

Prov.

Lolos verifikasi factual di 22

Prov.

I
: Partai Buruh Sosial Demokrat i t-olos verifikasi factual di 22

I prov.

, Partai Merdeka I iir"!;"r,r,tasi factual di 22

I
_J Pro" _

t9. i Partai Nasional Banteng
i xemerdekaan

20. i, Partai Patriot Pancasila

I rofos verifikasi f""trul di z r

*J p'o"

i
I

i:
:

21. i Partai Damai Sejahtera

i'
ii:
!:
t

I 5. i Partai Sarikat Indonesia

Lolos verifikasi factual di 2t

Prov.

&rno*.no ?"n";/u 2004 /; o%.A"[&r;./;"** €*;ta@oo6*I;*;

Partai Pelopor

Partai Persatuan Daerah

Partai Penegak Demokrasi

Indonesia

Lolos verifikasi factual di 2 l i

l

tl" _____ _ i

: Lolos verifikasi factual di 2l l.l

, Pto" i.-*--_-,.*---...*...---...- j

:

: Lolos verifikasi factual di 2l

Prov.

Sumber: KPU dan Litbang Kompas.

Pemilu 2AO4 dengan fumlah peserta pemilunya
sebanyak 24 (dua puluh empat) partai politik merupakan
era multi partai politik babak ke2 pasca reformasi di negara
Indonesia.

t

Rrfonmnsi nru E[iminnsi

Pnnrni Polirik

dimana elit politik yang partainya tidak lolos seleksi
administratif dan faktual, agak mengeluh/kecewa dengan
menganggap "aturan pemilu otoriter dan mengebiri demokrasi".

Namun tulisan ini mencoba merangkai peristiwa tersebut
secara akademis melalu kajian studi pustaka dengan menampi-

kan kekeceaan-kekecewaan yang berkembang saat itu.

Secara letterlec reformasi adalah perubahan secara bertahap atau gradual yang ditekankan pada empat pondasi

sistem politik (Adrian, 1992). Relevan dengan pengertian ini, reformasi sering dimaknai sebagai perubahan-perubahan yang

terbatas pada arena sistem politik sehingga konsekuensinya reformasi merupakan perubahan yang bertahap.

Namun argumen lain dari para pemikir sering menggambar-

kan dengan istilah-istildh reformasi yang dituiukan pada dua wilayah kekuasaan, yaitu wilayah kekuasaan negara dan wilayah kekuasaan masyarakat. Atau dengan ungkapan lain reformasi di tingkat negara dan reformasi di tingkat masyarakat.

n{"*, iudul ini cukup hangat dibicarakan pada saat\J memasuki pemilu 2004 lalu di Kalimantan Selatan,

ii:Ltii;!::ir\

f,ri\$, ji

&

Cl/'o**nro 7n*;/, COOI /.,: c&r/r./. &*r;ta'O.n 6-7;*

Kerangka reformasi mendiskripsikan salah satu tekanan perubahan secara bertahap yaitu pada tatanan atau struktur politik. Artinya struktur politik yang diciptakan cenderung kea rah demokrasi. Menurut Gafar (1999), reformasi tentu saia dikaitkan dengan usaha untuk melakukan perubahan menuiu kehidupan politik yang lebih demokratik guna menciptakan sebuah pemerintahan yang baik, beribaa dan bersih. Kehendak untuk mewuiudkan demokratisasi politik dan pemerintahan merupakan sesuatu yang tidak dapat dinafikan lagi karena gejala tersebut merupakan sesuatu yang universal, yang oleh ilmuwan politik Samuel Huntington disebut sebagai "gelombang ketiga" arus demokratisasi.

Salah satunya kasus Indonesia yang sedang proses reformasi politik, star a\,valnya dimulai dari pembenahan tatatan struktur politik negara bersamaan dengan tatanan struktur politik masyarakat. Seperrri dibuatnya produk perundang-undangan yang mengatur eksistensi partai-partai politik.

Pembenahan atau reformasi institusi partai politik ini sebagai respon dari slogan-slogan reformasi tuntutan dari rakyat yang menginginkan kebebasan politik dan keinde-

pedenan politik masyarakat terhadap negara yang diiwartahkan pada institusi baru partai politik.

Ini bukti bahwa reformasi banyak berharap dari perubahan institusi partai politik. Partai politik diketahui secara umum sebagai mekanisme penting dari perjalanan demokrasi tidak langsung, dalam rangka menyuarakan aspirasi dan kehendak rakyat.

I

'8,,/';
'9i.,y,,/i' l&*, ey'L; g/%"1" ,,,/,* ct{/; 6?/11',.,4 ay'L;

Pemerintahan Presiden Habibie, dalam menghadapi tuntutan kearah perubahan ini, tampaknya tak punya pilihan lain kecuali menempatkan reformasi dalam segala bidang, terutama bidang politik sebagai agenda. Agenda perubahan bidang politik ini mulai dilakukan dengan meninjau kembali semua pengaturan bidang perpolitikan yang dibuat oleh pemerintahan orde baru. Dan yang paling mendesak untuk dilakukan adalah mengganti sejumlah UU politik, seperti UU tentang sistem pemilihan umum, UU sistem kepartaian dan UU tentang susunan dan kedudukan MPR/DPR. (Cafar, t 999).

Namun reformasi di Indonesia seperti juga yang terjadi di negara-negara belahan dunia lainnya, tidak sesederhana yang dibayangkan karena apa yang dikemukakan Huntington (1991) dengan istilah reformasi hanya akan melahirkan prustasi politik pada tingkat masyarakat dan perrentangan pada tingkat elit politik, kondisi ini juga terjadi di Indonesia.

Reformasi memang mengandung konsekuensi-konsekuensi tertentu dan like and dislike terhadap reformasi, ia terus bergulir berkelindan diantara kelompok-kelompok politik, menggilas kelompok-kelompok politik yang kurang beruntung dalam perpolitikan Indonesia.

Banyak sisi manfaat yang diakibatkan oleh reformasi tetapi juga reformasi seperti mata uang logam, yang satu sisi bergambar berbeda dari sisi lainnya. Sisi lainnya menuniukkan perialanan partai-partai politik pasang surut atau timbul tenggelam dalam kancah politik Indonesia pasca reformasi sedangkan sisi lainnya menunjukkan perubahan yang gradual.

:::i il(i*, lii

t

c1V..."-...., i7."-:/" zrtor, ,/;. eX"/*/ , Q7,1;,,,,,,," dZozilit '9,, 6 -7*:'

Historis Partai Politik

Khusus di Indonesia kehadiran partai politik dalam

arena kekuasaan negara cukup tua usianya. Partai politik ternyata sudah ada sejak jaman sebelum Indonesia merdeka,

tepatnya pada saat masa pergerakan kemerdekaan untuk melawan penindasan penjajah.

Pola perjuangan menuju kemerdekaan sudah terjadi dalam zaman perintis (1905-1927). Masa sesudah zaman perintis merupakan kristalisasi dari jaman tersebut. Sikap dasar yang telah dibentuk pada jaman perintis berkembang lebih jauh mencapai kemerdekaan dan usaha mengisi kemerdekaan oleh arganya. Dalam kenyataannya kristalisasi

sikap dasar itu sudah ada sejak Indische Partij (IP). Indische Partij didirikan dikarenakan adanya ancaman yang sama yaitu

penindasan colonial (Poerwantana, 1994).

Kemudian kemunculan partai politik pasca kemerdekaan banyak di stimulus oleh permulaan usaha penyusunan pemerintahan sentral republic yang didasarkan atas pasal-

pasal I - IV aturan peralihan UUD 1945 dan dengan dikeluarkannya maklumat pemerintahan RI tanggal 3 Nopember 1945.

Pada tanggal 3 Nopember 1945, Pemerintahan RI telah mengeluarkan maklumat yang berisi anjuran mendirikan partai politik dalam rangka memperkuat perjuangan kemerdekaan. Dan setelah adanya maklumat tersebut maka bermunculan berbagai partai politik di Indonesia, antara lain adalah seperti yang tertera di bawah ini (Poerwantana, 1994), sebagai berikut:

6.6

+

?

Tabel I

Partai Politik Masa Kemerdekaan

i

i r. i Partai Sosialis I

:i

- , , , , , - ' , * . - - f

i z. i purtri Komunis Indonesia (PKI) :.ii:

, .. ; Parrai Buruh Indonesia

::-..*i.----.-.-.i:

; q. , Partai Rakyat Ielara atau Murba i

:ii

j .t- i o":":-Y::l':-: j

i-1-..

j,i::::"1:":""- - :)|=, _ :,-_._*-

Sumber: Studi Pustaka 2005

Perkembangan stabilitas kenegaraan yang mengalami guncangan-guncangan secara internal maupun eksternal dari fenomena yang berkembang saat itu sampai tahun 1950, seperti kejadian pemberontakan PKI dan iatuh banggunnya cabinet-kabinet, ternyata mendorong pertumbuhan partai politik semakin banyak atau lebih dari jumlah yang di ada di table I di atas.

Kenyataan ini dapat dilihat ketika adanya dasar keinginan untuk penyadaran kristalisasi Maklumat pemerintah 3 Nopember 1945, Kementerian Penerangan RI pada tahun 1950 melakukan pendataan partai-partai politik yang ada. Dan hasil pendataan tersebut menunjukkan partai politik bertambah jumlahnya menjadi 29 buah.

Kemudian pada pemilihan umum 1955 jumlah partai politik semakin membengkak menjadi S2 partai politik. Menurut Poerwantana (1994), kontestan pemilu 1955 terdiri dari partai politik dan perorangan. Tetapi yang berhasil meraih

H

&n,-,.no 7"*;/, 200a ,1,; oXr'/r"/, Ctflr/*,rn &.-r;t* @", S*7;.

kursi DPR hanya 27 partai saia. Partai-partai yang tidak bisa meraih kursi disebut sebagai partai gurem.

Melihat kondisi perkembangan ini pada tanggal 14 April 1961 Presiden Sukarno mengeluarkan Keputusan Presiden NO. 128 tahun 1 961 tentang partai politik yang lulusa seleksi. Delapan partai politik dianggap berhasil memenuhi ketentuan Perpres 13/1960 yaitu sebagai berikut:

Tabel 2

Fartai Politik tahun 1955

NO. I pnnrRr PoLrrrK I

I

I

l-t
t

i

r.l

, -.*-J,l

-__t

t3.

1

i+. ii*rl-t:5. l

i**_rio. llt

i,l

i'i-- "l

i :-l

ii--l

Partai PNI

Partai NU __l

l

Partai PKI

Partai Katolik

Partai Parkindo

Partai Murba

Partai PSII

PartaiArudli

PArtAi IPKI

Partai Islam Perti

Sumber: Studi Pustaka 2005

;: ti:il,t1:::/:ll::

iiii6\$ii,,,

t

'%,,,/,8i,-7,,,L, &&', ey'.L; g!Eo{,,,Ln o-e//; ,4y'1t-../, ey'Lt

Dengan dikeluarkannya Keppres tersebut maka jumlah partai politik yang berhak hidup hanya 10 buah saja. Sedang-

kan sisanya dibubarkan karena dianggap tidak memenuhi syarat-syarat ketentuan partai politik.

. Kemudian sekitar 1 tahun setelah itu terjadi perkembangan ketidakstabilan politik negara, yang dimotori kelompok sayap kiri (PKI) sehingga yang akhirnya menyebabkan perubahan-perubahan tatanan kenegaraan, yang salah satunya perubahan

pemimpin kenegaraan atau presiden dari Ir Sukarno ke Suharto.

Pada masa presiden Suharto dikenal dengan istilah masa

orde baru. Pemilu pertama pada masa orde baru diadakan pada tanggal 2 Mei 1973. Partai politik yang ikut dalam pemilu

1973 terdiri dari 9 partai politik saja karena partai politik PKI dibubarkan. Adapun 9 partai politik tersebut, yaitu:

1. Partai Parmusi

2. Partai Parkindo

3. Partai Murba

4. Partai Perti

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Tabel 3

Partai Politik Pada Pemilu 1973

1. Partai Parmusi

2. Partai Parkindo

3. Partai Murba

4.

5.

Partai Nu

19

Partai IPKI

ir o. i Partai Golkar

li.

Sumber: Studi Pustaka 2005

16,9,:

t

&,o-,ro. %em,./z Z00t li eKt/rn/, €-7o,on a7*riilt O*.6*7;r;

Pada pemilu 1971, jumlah partai politik yang ikut hanya 9 buah saja, tidak 10 buah seperti tertera di atas dikarenakan pada waktu itu Golkar menamakan diri sebagai organisasi sosial politik bukan partai politik. Tetapi menurut penulis Golkar merupakan partai politik dikarenakan pemilihan umum diselenggarakan hanya untuk atau khusus partai politik bukan organisasi sosial politik. Iktunya Golkar pada pemilu 1971 tentunya otomatis Golkar menjadi partai politik.

Kemudian pasca pemilu 1971, terjadi perubahan yang drastis pada tatanan partai politik melalui munculnya aspirasi kalangan MPR yang menghendaki jumlah partai politik di perkecil dan dirombak.

Kekhawatiran terhadap perombakan dari atas tersebut, pada tahun 1973 partai-partai mengadakan fusi. partai-partai yang berideologi Islam (NU, Parmusi, PPSU, Perti) bergabung menjadi PPP (partai persatuan pembangunan). Sedangkan partai-partai non Islam (PNI, partai Katolik, Parkindo, IPKI, Murba) berfusi menjadi PDI (partai Demokrasi Indonesia). (Poerwantana, 1994). Sehingga pada pemilu 1977 jumlah konstituen partai politik menjadi 3 buah saja, yaitu PPP, PDI dan Golkar.

Masa orde baru berlalu, memasuki masa reformasi, gejolak politik yang melanda bersamaan dengan terjadinya krisis ekonomi membawa Indonesia pada posisi ibarat telur diujung tanduk, Indonesia menghadapi situasi yang sulit dan tidak ada pilihan lain selain memenuhi tuntutan rakyat akan reformasi.

!:,,:=ii !

,:tF.==\$.+ili'i

%"Jt 8)",7",/;, efcy;" e./1,; fi"/3,1" ,,,/;" ay't; ,:*/11',,,,1 ey'.l;

Masa Reformasi

Pada masa reformasi kemunculan partai politik juga

lebih banyak disponsori oleh kebijakan-kebijakan negara, yang sebagai respon atas suara masyarakat, yang menghendaki penegakan nilai-nilai demokratisasi.

Pada reformasi politik, draf rancangan UU politik lebih di arahkan pada perubahan atau penggantian uu politik lama. Khusus pengaturan institusi politik diatur ke dalam 3 UU baru, yaitu UU NO. 2 tahun 1999 tentang partai politik, UU NO. 3 tahun 1999 tentang pemilihan umum dan UU NO. 4 tahun 1999 tentang susunan dan kedudukan MPR-DPR-DPRD"

Reformasi merupakan tanda dari beralihnya orde baru ke orde berikutnya, di mana semangat reformasi memuncak dengan perbaharuan dan perubahan pada tatanan politik bangsa Indonesia, yang salah satunya di tandai dengan kebebasan politik bagi masyarakat untuk mendirikan partai politik.

Kebebasan politik rakyat khususnya dalam pendirian partai politik di iustifikasi ke dalam bentuk Undang-Undang politik baru, yang sebagai pengganti Undang-Undang Politik lama. Undang-Undang Politik baru ini salah satunya UU No. 2 tahun 1999 tentang Partai Politik. Misalnya Pasal 2 ayat (1) menyebutkan: "sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu tahun) dapat membentuk partai politik".

Sehingga kebebasan politik ini di manfaatkan masyarakat dengan beramai-ramai mendirikan partai politik, alhasilnya kemunculan partai politik ibarat cendawan di

,rLt

&

&n*...o 7";/, eoot ,/; ax;/,n/. e7,:iV,,,,o,. &...;t* CZ;... 6-7, -

musim hujan merebak ke sana ke mari tak tentu arah. pada tahun 1999 terdapat di Defkeh jumlah partai politik yang mendaftar dan sah untuk ikut pemilu 1999 sebanyak 141 (seratus empat puluh satu) partai politik.

Banyaknya jumlah partai politik ini sebenarnya bukti bahwa kebebasan berpolitik itu sangat dimanfaatkan masyarakat. Namun dikarenakan seleksi administrasi secara faktual oleh tim II yang dibentuk pemerintah menyebabkan jumlah partai politik yang resmi ikut pemilu 1999 merosot tajam jumlahnya dari 141 (seratus empat puluh satu) partai politik menjadi hanya 48 (empat puluh delapan) partai politik.

Seleksi faktual ini seperti eliminasi bagi partai politik yang tidak memenuhi syarat-syarat ketentuan pemilihan umum tahun 1999. misalnya ada saja partai politik yang tidak memiliki kantor di cabang kabupaten atau kabupaten ktp penduduk sebagai

pengurus di dunia partai politik, partai politik yang tidak memiliki kepengurusan di tingkat kabupaten, dll.

Pemilu tahun 1999 merupakan kemunculan partai politik baru dengan muka lama pada masa reformasi, artinya sekitar 32 tahun baru pada saat ini negara Indonesia kembali ke era multi partai politik, yang star awal iumlahnya sekitar 48 (empat puluh delapan) partai politik. Adapun partai politik yang terdaftar pada pemilu 1999 dapat dilihat pada table di bawah ini; .sebagai berikut:

'%./i 8,, "r,/; , &&.,, ey'L; g.%t.,J;* @//; ct{/t-."/, ey'L,.

Tabel +.
Partai Politik Pemilu 1999

Partai Politik

Partai Kristen Indonesia

i

I

ililil

-i.-""].};j:,il-""i:r]t'9.,::i:*

14. i Partai Aliansi Demokrat Indonesia
t,

_i:' r Partai Kebangkitan Muslim Indonesia
6. Partai Ummat Islam

Partai Kebangkitan Ummat

Partai Masyumi Baru

Partai Persatuan Pembangunan

Partai Syarikat Islam Indonesia

, o':::9::[::ll*:-: l:u=e:-*--**J
,Partai Abul Yatama 1

il i:r,:ix:i:-,-::,"r"ro:u-l ...*l
t:15. I Partai Amanat Nasional

I

r l. l

lt4.

I

Partai Demokrasi Kasih Bangsa

]l
,t l

Partai Rakyat Demokratik

Partai Syarikat Islam Indonesia I905

|

Partai Katolik Demokrat ____l

\$i+\=

/i,

t

e/a*o"" ,,, , ?2,.;1, eoo* J; aJd,/u,/ , frn1,,,,,,. eZ* ;ti,g"" 8-y,-,;

i

tg.] eartui pilihan Rakyat*-__ * _*J *

|

|

i_1

I20. I Partai RakVat Indonesia

,,,,,-,,,,-.,,,,,,-,i -

|

-2r.

j Partai politik rslar,y?ry_rTi _*_i

, ??,- l .o-*t:it1r1i Bintang i

i],

-:-[:*]---:ll:- :-:ll:-:-':-:ll:-:-:---*** -'-----" "-1

?r: l.. o:-Jla1 :ol]ga"itas pekerja 1

::

---:*-----r:-: -:-r1a.*:-*---**'-----"-'^"-*--|

-'i:-i *:t?ir::gt:- j

,:, I larfj 13hglatul ummat iil,;*J,,,,,;;,- 1

I27 I P:lailkatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia

1

28. i purtui Republik

!

|

1

29. I Puttui Islam Demokrat

|

I**_J_:13:l::3:i31e:=-M::= rv,arhaen

i

1

_j

1

.:t. . I Partai vtusyay,Tr-hRakyat Banyak

32. i our,r, Demokrat Indonesia

-J I?'j':i 9,"IT*1fitl_:

Partai Persatuan

i

!

t

1Partai Kebangkitan Bangsa

|

|

i

...J

|

|

1

1

IJJ.

IT'-

I34. J: *...1

|

.1.f- 1: ." j

t

1

-_i i

1

|

|

i

1

|

19: J t_*!*la":*""tild::=i:
t,J: j Partai Buruh}-rIT?1

1

.....1

1

f,

'%,,,/; &;2*,/i, &:8;, o,./L; g'%/,,,,/,n @/L 6y'/.1,,",1 ay'L"

i

38. I Partai Musyawarah Kekeluargaan

I39. I eartai Daulat Rakyat i

li40. I Partai Cinta Damai i

- | * _ - .. - _-..... - ,

-1

-3--l

i_l

11- l

,,rj

j--j

Partai Keadilan dan Persatuan

Partai Solidaritas Pekerja Seluruh Indonesia

Partai Bhineka Tunggal Ika Indonesia

Partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia

Partai Nasional Demokrat

|

47. Partai Ummat Muslim Indonesia
Sumber: Defke 1999.

Kemudian pada pemilu 2004 terjadi perubahan kembali pada tatanan kehidupan politik, yang berupa keluarnya produk baru UU politik dan otomatis menggantikan UU politik sebelumnya.

Undang-Undang politik baru ini memuat aturan lebih ketat mengenai syarat bagi partai politik untuk ikut pada pemilihan umum tahun 2004. Syarat atau seleksi ini tercantum pada pasal-pasal yang terdapat pada UU No. 3 tahun 2002 tentang partai politik dan UU No. 12 tahun 2003 tentang pemilihan umum.

1A

"tb

t

&., "n", .o 7n., /,, zoot t oK, /, /, &17,, ,". c4*" ;,r"; U*.. F, "7,-;"

Pasal-pasal dalam UU ini mengatur partai politik dengan istilah electoral threshold (ambang batas) dan syarat-syarat perolehan jumlah kursi DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Bagi partai politik yang tidak memenuhi syarat ini akan di eliminasi untuk tidak ikut pemilu tahun 2004.

Alhasilnya dari jumlah partai politik semula hasil pemilu 2004 sebagai 48 (empat puluh delapan) partai politik mengalami pengurangan kembali menjadi hanya 24 (dua puluh empat) partai politik yang secara resmi dan sah untuk ikut pemilu pada tahun 2004. Adapun jumlah partai politik yang terdaftar pada pemilu 2004 dapat dilihat pada table berikut ini, yaitu:

Tabel 5.
Peserta Pemilu 2004

r]1:-.-;]-".i-:-.---.].,]Tj::]*-:-j:--*-.....-.*j;,i
i trlo. , Partai Politik i, Keterangan j
i:l,l t. ! Partai Amanat Nasional 1, Electoral Threshold I
i'. z. i pur,ui Bulan Bintang I gl".torrl Threshold I
:lll i -r lrl---L-tl l: rat.dt r rrlttuEtdr iltuults td i ErrltrlEt l llfesilotg l

1- *i*o-:rv:rs:r - . i---

-*-j

1-^*r"--r**j

| 4. I Partai Golongan Karya i Electoral Threshold I

i 7. i Partai Demokrat i Lolos verifikasi factual ditii i i 25Prov'

i e. i purt"i Nasional Indonesia j i-olo, verifikasi factual di
i i Marhaenisme i z+ prou.

::lii:::tr:::

ii

itl

I 9. i partai Bintang Reformasi I t-olos verifikasi factual di ii ,. i 23 prov. i1 | .*--*-.*-,*.t*:-

t:

I r o. i Partai Karya Peduli Bangsa I t-olos verifikasi factual di i

; i I z: prov. ';

1 , , ! Partai Keadilan dan Persatuan 1 , ,oto, verifikasi factual di i

1 | r-J^h^i- I rr.r^r, i

'%,,,/; a7,,,r,,,/;. 88" , o/,1,; 41:%"/,,,h. e//,: e//l-.*,/ o'f(';

I * -j--H":':l- *----**j,? :t:?::----. ^:

i ,r. i Partai Keadilan sejahtera I, to,o, verifikasi factual di

Partai Merdeka Lolos verifikasi factual di

22 prov.

Partai Persatuan Nahdatul Ummah

Indonesia

Partai Nasional Banteng Kemerdekaan

Partai Patriot Pancasila Lolos verifikasi factual di

2l prov.

Partai Damai Sejahtera i Lolos verifikasi factual di

i, 2t prov.

I ,r. i Partai Persatuan Demokrasi I l-olo. verifikasi factual di i

1 , * 1 Partai Perhimpunan Indonesia Baru I loto. verifikasi factuai di :

22.

23.

l,o.

1__l

Partai Pelopor

Partai Persatuan Daerah !

"_t-1-ut:tt:--:1 .. :,, _-_*-'_a-i

i
Partai Penegak Demokrasi Indonesia i

i .oro,,;ru.,,r Ji]
j. ii pi"" , _ l

Lolos verifikasi factual di
2 l prov.

Lolos verifikasi factual di
2 l prov.

Sumber: KPU dan Litbang Kompas.

:ii:::ii

!ii
l 5. i Partai Sarikat Indonesia l t-otos verifikasi factual di

i
ll:
t 6. i Partai Buruh Sosial Demokrat] t-olos verifikasi factual di ' l.z2Prov' !, ,,,--J_-::,_.*-*...t ,--.*--

&
&,.*,nn,o 7.*;/, zoot ,/; an/"nl &,yio,,o,,. &o;h @., 6-7;,,i

Pemilu 2004 dengan jumlah peserta pemilunya sebanyak 24 (dua puluh empat) partai politik merupakan reformasi partai politik babak ke2 pasca reformasi di negara Indonesia. Pengurangan jumlah partai politik ini diakibatkan karena adanya suara-suara miring di masyarakat mengenai partai politik.

Partai politik yang multi dianggap sebagai salah satu sebab ketidak fokusannya proses reformasi. partai politik yang multi lebih banyak memperlihatkan bentuk perilaku yang arogan. Partai-partai politik lebih banyak bekerja dan mempertentangkan kepentingannya sehingga banyak mengabaikan kepentingan-kepentingan masyarakat.

Apabila seperti ini perjalanan pasang surut partai politik, maka apakah terjadi pengurangan atau pengerucutan atau eliminasi partai politik pemilu 2009? yang jelas eliminasi itu sangat tergantung dari konstruksi politik yang dibangun di negara Indonesia dan produk Undang-Undang politik baru sebagai dasar atau iustificasi dari eliminasi

partai politik.

Pen rrf rrn

Reformasi merupakan tanda dari beralihnya orde baru ke orde berikutnya, di mana semangat reformasi memuncak dengan pembaharuan dan perubahan pada tatanan politik bangsa Indonesia, yang salah satunya ditandai dengan kebebasan politik bagi masyarakat untuk mendirikan partai politik.

Reformasi politik memang sangat berhubungan dengan kelembagaan partai politik. partai politik dianggap sebagai

tl;

t

'98,,/; a9,,7,,/; a7,9;' e,/1"; g"%/",",/,'. c[./; c*///,,1(/, ./'1";

lambatan emas penghubung kepentingan atau aspirasi rakyat

dalam menyuarakan kehendaknya. Ketika kehendak rakyat

berubah menjadi keinginan perubahan maka otomatis Partai politik yang lebih dulu dilakukan reformasi.

Dilihat dari histories di atas perjalanan partai politik memang mengalami masa Pasang dan surut. Kemunculan dan kemusnahan partai-partai politik banyak disponsori oleh

kebijakan-kebiijakan yang berasal dari negara, yang dibegroni oleh para-para pemimpin politik atau penguasa-penguasa pada masa itu.

Ketika masa pemimpin Sukarno partai-partai politik mengalami perubahan-perubahan dan ketika masa pemimpin Suharto, partai-partai politik juga mengalami perubahan bentuk dan nama serta pada masa pemimpin

Habibie, partai-partai politik mengalami perubahan lagi.

Konstruksi tatanan produk perundangan politik yang dibuat oleh pemimpin politik secara otoriter atau demokratis

merupakan faktor determinan dalam menentukan perialanan

partai politik di Indonesia.

Walaupun ada perubahan dalam setiap kandungan pr:r:duk peru.ndangan poli-ti-k ter.sp--but na-mLln teiap -saia meninggalkan kesan-kesan yang tidak signifikan, seperti terlihat adanya control atas kegiatan partai politik rakyat,

mempersulit kemunculan partai politik, mempersulit ruang gerak partai politik, dan mematikan atau memvonis sebuah partai politik dikarenakan tidak lulus seleksi.

Perjalanan pasang surut partai-partai politik ini, dari tinjauan leterlec reformasi merupakan perubahan-perubahan tatanan institusi partai politik yang disesuaikan

a'::::-

i':.9

&.,*^.,o %e*i/u Z00t ,/; dx;/,n/. &*i,.,o- €*zitu @.. 6*la*

dengan perkembangan-perkembangan kondisi saat itu, yang seperti mencari bentuk pola-pola politik diantara tatanan politik yang rapuh.

Berarti reformasi sebenarnya dalam konteks partai politik, sudah terjadi sejak lama di negara Indonesia namun yang inembedakan hanya lah wacana yang digunakan untuk melakukan reformasi iehingga istilah reformasi dan eliminasi merupakan dua istilah yang tidak dapat dipisahkan dalam kerangka reformasi. Reformasi merupakan eliminasi partai politik.

Pada realitasnya reformasi memang hanya melahirkan kesan-kesan bahwa regulasi yang dilakukan terhadap partai politik, secara otomatis merupakan upaya melakukan pengurangan arau eliminasi bagi partai-partai politik yang ikut dalam pemilihan umum di Indonesia.

t

Sisrrur Pemilu 2004

- ,./du

beragam varian dalam sistem pemilihan umum

a)4'ai ttnlal dari aspek teoritis. Kebiasaannya juga varian-varian yang terjadi sangat berbeda-beda antar negara-negara. Beragamnya varian sistem pemilu yang dianut negara-negara di dunia lebih dikarenakan dorongan faktor histories, keberagaman sara dan kondisi geografis.

Sehingga untuk kasus sistem pemilu di negara Indonesia

yang pengaturan hukumnya dimuat dalam UU No. 12 tahun 2003 tentang pemilihan umum cukup unik, dimana dalam praktek pemilihan umum terjadi penggambungan dan pencampuran unsur sistem distrik datr unsur sistem proposional. Walaupun diketahui secara umum sebenarnya

secara empiris pemilu pasca orde lama selalu menggunakan sistem pencampuran tetapi untuk pemilu 2004 ini sistem pencampuran distrik dan proporsional sangat kentara/nyata.

Oleh karena pencampuran kedua sistem inilah, pemilihan umum tahun 2004 di Indonesia disebut sistem pemilu campuran antara sistem distrik dan sistem proporsional atau istilah lain yang dikenal secara ilmiah semi proporsional atau semi distrik.

tt'r')\iltitllit:tt

zlfiiit

t

€,"n**** '7e^;/, eooa ,/.; o&./u"/.. &rjouo* vA Uoo \$*V;rr;

Penggunaan model sistem campuran ini lebih didorong karena faktor akomodatif memaksimalkan keterwakilan partai politik dan keterwakilan rakyat. Sehingga penggunaan sistem campuran ini seperti mengeliminasi kelemahan yang terdapat di sistem distrik dan eliminasi kelemahan yang terdapat di sistem proporsional.

Dalam UU No. 12 tahun 2003 tentang pemilihan umum sendiri terlihat berbeda dengan UU pemilu sebelumnya, dimana isinya tidak saja pengaturan-pengaturan seleksi calon anggota DPR dan DPRD tetapi juga ditambah dengan pengaturan calon anggota

 **Plagiarism detected: 0,02%** <https://wilyhikaru22.blogspot.com/2...>

id: 75

DpD (Dewan perwakilan Daerah).

Untuk

memudahkan pemahaman dan penielaskan sistem pemilu yang digunakan tahun 2004 sehingga disebut sistem campuran, maka pemaparan uraiannya berdasarkan detail-detail pola pencalonan anggota DPR/DPRD dan DpD, sebagai berikut:

Anggota legislatif

Anggota legislatif yang dimaksud anggota DPR_RI, DPRD

Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. Berdasarkan pasal-pasal yang terdapat dalam UU No. 12 tahun 2003 rentang pemilihan umum, pola pencalonan anggota DPR-RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten /Kota menggunakan sistem proporsional, di mana calon anggota DPR-RI, DPRD provinsi, DPRD Kabupaten/Kota diizinkan oleh sebuah lembaga yang bernama partai politik. Namun pola pencalonan ini

menunjukkan ciri-ciri berdasarkan daerah pemilihan dan jumlah kursi dalam daerah pemilihan tersebut, sehingga ciri_ ciri ini menunjukkan penggunaan sistem distrik.

f

),,,/; &,,1.,./; &8^, o/L; g'%.,l.o.,/in 8//; a1//l*"/,/, o'/1";

Sedangkan pola pencoblosan dan penentuan anggota DPR-RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota menuniuk-

kan sistem proporsional dan sistem distrik di mana pemilih dalam melakukan pencoblosan memilih tanda gambar dan calon anggota DPR-RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota tersebut dan pola penentuan anggota DPR-RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan BPP (bilangan

pembagi pemilih) dan nomer urut daftar calon.

Pengaturan-pengaturan di atas dalam pola pencalonan, pencoblosan dan penentuan calon anggota DPR-RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota menuniukkan pencampuran

dari sistem distrik dan sistem proporsional sehingga sistem pemilu tahun 2004 disebut sebagai sistem campuran.

Anggota DPD

Anggota DPD yang dimaksud anggota dewan perwa-

kilan daerah yang dalam UU No. 12 tahun 2004 tentang pemilu dibatasi jumlahnya 4 orang. Khusus anggota DPD ini pengaturan pasal-pasal dalam UU ini dalam hal pola pencalonan anggota DPD menggunakan sistem campuran sistem distrik dan sistem proporsional di mana pencalonan anggota DPD ini berdasarkan perorangan dengan penggunaan petisi tetapi tidak berdasarkan batasan daerah namun batasan wilayah. Sedangkan pola pencoblosan calon anggota DPD berdasarkan perorangan yang dilakukan oleh pemilih.

Khusus pola penentuan calon anggota DPD menunjukan cirri-ciri pencampuran sistem antara sistem distrik dan proporsional, di mana penentuan anggota DPD ini tidak

t)ilr i,;tgffiti

Iri,ftRi,

€,o*** ?.*/u 2oo4 li offiA"l, €;.,;ro^ &wih; @on E*V;,*

berdasarkan batasan daerah tetapi berdasarkan batasan wilayah yang lebih luas dan berdasarkan suara terbanyak.

Oleh karena itu berdasarkan pengaturan pasal-pasal dalam UU No. 12 tahun 2003 tentang pemilihan umum ini khususnya dalam hal pola seleksi anggota DpD menggunakan sistem campuran antara sistem distrik dan sistem proporsional.

s

rilncnrun Sisrcm Disrnik

enyelenggaraan pemilihan umum tahun 2004 cukup meriah dan mendapat respon positif dari masyarakat

Indonesia dikarenakan pemilu lanjutan reformasi dan jumlah partai politik menjadi sedikit dari pemilu 1999. Walaupun ada beberapa kritik-kritik yang muncul dari sebagian kalangan masyarakat tetapi kritik itu lebih karena asumsi-asumsi prediksi terhadap hasil pemilu 2004 nanti.

Asumsi-asumsi prediksi ini semakin menunjukkan kekuatannya pasca pemilu 2004, dimana salah satunya muncul wacana pasca penyelenggaraan pemilihan umum 2004 di masyarakat kalsel dari provinsi dan beberapa daerah-daerah, yaitu keinginan penyelenggaraan pemilu akan datang menggunakan model sistem distrik secara murni. Munculnya wacana sistem distrik ini dapat saja diasumsikan sebagai kristalisasi ide dari sebagian masyarakat yang ada di kalsel atas penyelenggaraan sistem pemilihan umum tahun 2004 yang menurut mereka tidak menuniukkan kepuasan dari sudut hasilnya.

Sepertinya kekecewaan yang muncul terhadap hasil pemilu 2004 di implementasikan dengan pewacanaan penggunaan sistem distrik murni. Cukup unik nya

&"r.*** ?"* ,;ir 2004 * an/rolr \$iry,un. €*r;a)@.o\$nl;o;"

pewacanaan ini terjadi tidak saja dikalangan masyarakat tetapi dikalangan beberapa akademisi.

Apabila ditelusuri secara fakta dilapangan munculnya wacana sistem distrik didorong oleh realitas sistem pemilu 2004 masih menuniukkan adanya dominasi partai politik dan kurang menoniolkan aspek keterwakilan rakyat secara murni. Dominasi partai politik ini berimbas dalam posisi-posisi calon yang secara otomatis merugikan calon-calon yang baru tumbuh.

Partai-partai politik dalam pemilu 2004 menunjukkan kekuasaan dalam hal penentuan calon yang terlihat kurang memperhatikan aspirasi masyarakat tetapi lebih menoniolkan aspirasi kepentingan partai politik sehingga calon-calon

anggota legislatif yang diizinkan partai masih didominasi oleh orang-orang lama. Sedangkan orang-orang baru tersisih melalui nomor-nomor urut yang dianggap tidak jadi.

Komposisi hasil pemilu 2004 yang tidak berimbang antara orang lama dan orang baru yang duduk di lembaga legislatif seperti inilah yang menyebabkan tumbuh subur kekecewaan yang bernuansa politik. Sistem pemilu campuran secara tidak langsung sepertinya menguntungkan partai-partai politik tertentu.

Selain itu kekecewaan tajam muncul dari golongan perempuan yang merasa dirugikan banyak dengan sistem campuran dikarenakan UU pemilu 2004 sepertinya meniadakan standar ganda, yaitu satu sisi mendorong munculnya elit politik perempuan tetapi sisi lainnya mengubur elit politik perempuan.

li,x=i1?

'%,,;/ &i,"/i, 38",, a./L; g"%o1,,,/in c8//; 6{,u,,*,1 ey'/,,:

Dari sudut akademis secara obyektif dapat dinilai bahwa sistem pemilu apa saja yang diterapkan sebenarnya tidak ada yang ideal dan hasilnya akan selalu mendistorsi sekelompok orang yang gagal dalam pemilu namun pewacanaan sistem distrik tahun 2004 sebenarnya juga tidak saja hanya persoalan kekecewaan namun juga kemungkinan sistem yang tercipta untuk pemilu akan datang lebih fair dan adil atau terciptanya jaminan pemilu yang berkualitas.

Sistem campuran pada pemilu 2004 sebenarnya lebih terkondisi karena persoalan banyak partai peserta pemilu dan upaya untuk keterwakilan partai-partai yang ikut pemilu tetap terjamin eksistensinya.

Namun pewanacanaan sistem distrik sebenarnya lebih terkontaminasi gaya Amerika Serikat yang dipandang cukup berhasil melahirkan pemilu yang berkualitas tetapi juga tidak dapat dipungkiri perbedaan konstruksi struktural di Amerika Serikat sangat jauh berbeda dengan negara Indonesia.

Lebih baik apabila pewanacanaan sistem distrik ini direvisi sebagai pengurangan unsur sistem proporsional dalam sistem pemilu akan datang sehingga kompetisi dan persaingan antar calon lebih terlihat.

d!o,-l

Snmpel

Pemilu 2004

^Gnyata masih banyak yang belum tahu sistem pemilu(y kali ini. Setidaknya, ini yang sangat dirasakan para ibu-ibu dipedesaan Tanah Laut (Tala). Para ibu-ibu di desa kurang mendapat informasi soal pemilu yang digelar 5 April

mendatang. Apalagi KPU setempat tidak maksimal mensosialisasikan pesta demokrasi tersebut. (Baniarmasin

Pos,24 Pebruari 20A4).

Hal ini merupakan salah satu persoalan pemilu dari

beberapa kasus yang sama yang terjadi di beberapa pedesaan maupun lingkungan urban di seluruh negara Indonesia. Realita ini memang memang ironis bagi sebuah negara yang mencoba memperbaiki kondisi atau mengalami

masa transisi politik melalui pemilu yang dianggap sebagai kalangan sebagai reformasi damai dan bertahap.

Hal ini juga merupakan dampak atau konsekuensi dari penerapan sistem sample dalam sosialisasi pemilu, sehingga

ada kenyataan wilayah atau daerah yang tidak kebagian sosialisasi pemilu. Memang landasan dari penggunaan sistem sample ini dikarenakan keterbatasan dana namun kiranya perlu suatu strategi untuk sosialisasi ini.

ffil\$tr
'ffiff,ifll

Sisrsm

Sosinlisnsi

t

&.,.,.,n .7n*,:/,, zttol ,h &"/. /, &;,ri.,on €*-n;f,; I*,,F,,qA;

Ini juga yang menjadi poin penting perbedaan pemilu 1999 dengan pemilu 2004, dalam pemilu 1999 instirusi resmi dan kelompok sangat antusias mensosialisasi aturan pemilu yang baru yang dikemas dalam simbol reformasi. Sebaliknya pada pemilu 2004 terjadi keterbatasan dana sosialisasi. Padahal seperti diketahui, aturan pemilu 2004 itu lebih baik dari pemilu tahun 1999, paling tidak dalam pemilu ini ada jaminan hak pilih bebas bagi masyarakat untuk menentukan wakil di lembaga legislatif.

Sirkulasi elit

Sesuatu yang diyakini bersama pula bahwa kesuksesan

sebuah pemilihan umum tidak saja bergantung pada lembaga

penyelenggara pemilu yang independen tetapi juga bagaimana aturan main pemilihan umum tersebut diketahui, dan dijalankan sehingga menghasilkan pemilu yang benar-benar mendapat legitimasi masyarakat umum.

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang beberapa saat lagi melaksanakan proses pemilihan umum. Asumsi diatas tentunya sangat berlaku bagi negara ini. Apalagi Indonesia saat ini sedang menjalani proses transisi politik ke demokrasi. Persoalan hasil suatu pemilihan umum yang berkualitas merupakan suatu harapan besar bagi masyarakat.

Paling tidak melalui pemilihan umum yang kedua dalam masa reformasi ini terjadi proses sirkulasi elit politik yang lebih baik dari sebelumnya. Sangat diharapkan elit politik yang tidak korup dan lebih bermoralitas dalam mengelola kekuasaan negara.

rR:::ii1ir,:::i.,i\

islffi

)" /i &,"y,./; &8", a4/L; g"Z),l,o,/i. @il; @il1."1 a{L;

Sangat disadari pula aturan main pemilihan umum tahun 2004 ini lebih baik dan sangat berbeda dari pemilihan umum sebelumnya. Ini pun sebagai konsekuensi dari keinginan besar masyarakat dan elit politik untuk meningkatkan kualitas wakil rakyat dan keterwakilan rakyat.

Adapun poin-poin yang membedakannya dengan pemilihan umum sebelum secara mendasar, seperti kertas suara yang menampilkan gambar partai politik dan calon legislatif dari partai politik tersebut.

Pada saat ini penetapan terakhir jumlah partai politik yang akan ikut pemilihan umum sebanyak 24 partai politik. Bayangkan saja jika calon setiap partai politik sekitar 10-15 orang, tentunya alangkah membingungkan dan rumit sekali bagi segmen-segmen masyarakat tertentu dalam memilih nanti.

Fakta yang dilansir media massa maupun media televisi memperlihatkan kondisi ketidaktahuan masyarakat yang cukup terhadap aturan main pemilu 2004 terutama proses tahapan pemungutan suara nanti. Dan ini terjadi tidak saja pada masyarakat yang ada di provinsi-provinsi yang jauh dari pemerintah pusat atau Jakarta tetapi ini juga terjadi pada masyarakat yang tinggal disekitar Jakarta. Respon masyarakat lebih banyak mempertanyakan bagaimana aturan

main pemungutan suara dan format kertas suaranya?

Selain itu juga realitas yang beberapa waktu lalu yang menggambarkan ketika diadakan simulasi pemilihan umum di beberapa kota besar di Indonesia, seperti Medan, Semarang dan Banjarmasin oleh beberapa LSM menuniukkan besarnya tingkat kerusakan kertas suara yang

t

&, ^n, o |V"*; /* zooa , /; oK, A, l & fio, r- & *tita 9too 6*1* ;,

disebabkan kesalahan pemilih dalam menentukan partai politik dan calonnya.

Namun akankah kebingungan-kebingungan dari masyarakat ini akan aturan main terhadap pemilu 2004 menyadarkan atau ditanggapi secara kreatif oleh lembaga KPU maupun lembaga-lembaga independen lainnya yang konsen dengan pendidikan politik rakyat. Atau mereka-mereka ini hanya bisa berdalih kurang dana dan tidak ada pendanaan untuk ini.

Kerumitan prosedur pemungutan suara ini hampir sempurna ditambah dengan kenyataan partai politik sekarang yang menuniukan gambar-gambar yang digunakan

hampir sama dan mirip antara partai politik dengan partai politik lainnya. atau juga rekrutmen calon wakil secara dadakan yang dilakukan partai politik.

Apabila real ini yang dominan sampai sekarang, nampaknya sangat ironis memang transisi politik Indonesia yang menunfukkan langkah maiu pada prosedur pemilihan umum harus menghadapi kenyataan individunya yang tidak peduli banyak pada soal ini, yang penting mungkin bagi mereka punya gaa besar dan menikmati fasilitas negara.

Oleh karena itu sosialisasi aturan main dalam pemilu 2004 sangatlah urgen dilaksanakan dalam rangka meningkatkan partisipasi politik rakyat. Dan tugas ini tidak mesti diemban total oleh KPU tetapi juga oleh lembaga swadaya masyarakat lainnya. hasil penelitian pemilu t999

juga menuniukkan keberhasilan pemilu tersebut tidak saia dikarenakan upaya KPU sendiri tetapi juga oleh lembaga-lembaga independen lainnya.

t

*)"t & , *yo, /; , 8&h, oy'1, ; g. 'ilJ, Jn, , , /; . 6{. /; 6*1. *"/, ay', L, ;

Namun dapat diprediksikan kerusakan kertas suara akan sangat banyak terjadi pada wilayah-rvilayah pedesaan yang

nota bene didominasi kelompok masyarakat yang rendah pendidikan dan informasi" Padahal sebenarnya wilayah pedesaan merupakan basis-basis penciptaan format demokrasi

Dampak lainnya yang terjadi, seperti teradinya apatisme masyarakat terhadap pemilu 2004. Ini tentunya memunculkan golongan putih baru yang berbeda karakter dengan golongan putih sebelumnya. Bisa saja meningkatnya golput pada pemilu 2004 dikarenakan boikot rakyat terhadap pemilu tersebut dikarenakan ketidaktahuan mereka dan disadari mereka ikut pemilu hanya menguntungkan sekelompok orang sehingga tindakan demikian terjadi.

Kurangnya sosialisasi pemilu, bisa saja menguntungkan partai politik yang lolos electoral threshold dikarenakan masyarakat sudah tahu dengan partai politik tersebut atau partai politik ini telah punya basis dan mengakar dimasyarakat, yang ielas partai politik ini juga memiliki sarana dan prasarana pendukung dilapangan sehingga tidak menyulitkan dalam mengelola dukungan.

iii"lt"V,tM
,?.

Sunnr Sunnn Rusnk/tidnk Sn[r

n ,il emang prediksi dari Cetro aras simulasi yang VVLdilakukan sebelum hari H pemilu 2004 di sejumlah kota yang ada di Jawa dan Sumatera, yang menunjukkan kecenderungan ketidaktahuan pemilih atas tata cara pemilu 2004 cukup terbukti untuk wilayah Kalimantan Selatan.

Data KPU Provinsi 2004, menunjukkan kerusakan surat suara pada pemilu 2004 berjumlah sekitar 26. 468 dan surat suara yang tidak sah berjumlah sekitar 80.932.

Kerusakan surat suara dan surat suara yang tidak sah memang ada hubungan dengan pengetahuan pemilih mengenai tata cara pemilu tersebut. Kebiasaan pengetahuan pemilih sangat erat hubungannya dengan sosialisasi. Sehingga banyaknya surat suara yang rusak dan surat suara yang tidak sah lebih dikarenakan kurangnya sosialisasi tata cara pemilu tersebut.

Apalagi sudah diketahui umum, bahwa pemilu 2004 sangat berbeda dari pemilu sebelumnya yang lebih rumit dengan prosedur pencampuran antara sistem distrik dengan sistem proporsional. Misalnya salah satu aturannya menyebutkan bahwa surat suara sah apabila pemilih hanya mencoblos gambar partai dan tidak calon legislatif,

t

&,-n-o.%e-i/u 20ol ,/; dK,/"/. /, Q7;,y,u,n &"* ;t;"@"" 6-1;,,;'

sebaliknya surat suara tidak sah apabila pemilih dalam mencoblos calon legislatif bukan tanda gambar.

Kerumitan rumus pemilu ini semakin kabur ketika sang pemilih hanya menyukai calon tetapi tidak menyukai lambang partai politik. Apalagi iuga ditambah persoalan dengan jumlah partai politik yang cukup banyak serta jumlah calon anggota legislatif yang diajukan oleh partai politik dari legislatif pusat sampai legislatif daerah.

Jumlah yang banyak partai politik dan anggota legislatif yang ikut pemilu, otomatis memperlebar surat suara, yang melebihi besarnya tempat pencoblosan surat suara.

Kalkulasinya dengan kondisi surat suara seperti ini, ditambah dengan rasionalitas pemilih yang mencoba memilih calon dan tidak memilih lambang partai politik maka bisa diprediksi bagaimana hasil akhir pemilu 2004 nanti, tentunya pasti banyak kerusakan surat suara dan surat suara

tidak sah.

t .ff=

t

Sisrem Snnrpel
Penenrunn Cnlon Dpd

OD emilu 20o4 memang dapat dikatakan sangat berbeda.
t-/ Salah satunya pemilu tersebut iuga menye-

lenggarakan pemilihan anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah). Dimana eksistensi Dewan Perwakilan Daerah ini secara sistem ketatanegaraan diakui ke dalam bentuk formal MPR. Atau menjadi salah satu kama di lembaga MPR yang khusus meniarang aspirasi masyarakat daerah atau kepentingan daerah.

secara teoritis dalam hal penentuan calon, Dewan Perwakilan Daerah menggunakan sistem distrik dengan istilah "ane man one vote", atau (satu orang satu suara" dalam memilih calon. Memang secara teoritis ini tidak ada masalah karena hal ini cukup signifikan untuk memperkuat keterwakilan masyarakat daerah.

Namun ada beberapa persoalan yang perlu didiskusikan khususnya mengenai penentuan calon Dewan Perwakilan Daerah, mengenai praktek seleksi calon anggota Dewan

Perwakilan Daerah.

Salah satunya, penerapan sistem faktual untuk menseleksi anggota Dewan Perwakilan Daerah, ternyata meninggalkan keluhan-keluhan dari calon lainnya (hal ini

s

&* ?*;ln zoot /; &/o./, e** {*;a@* 6.ye;*;

terlepas dari apakah calon tersebut terpilih/tidak). Seperti adanya keluhan mengenai penggunaan sistem sample untuk menguji secara faktual calon Dewan Perwakilan Daerah.

Penggunaan sistem sampel ini memang mengandung sisi positif dan sisi negatif. Sisi negatifnya cukup merugikan calon lain dikarenakan daerah yang disample bisa saja bukan merupakan basis suara bagi calon tersebut sehingga calon tersebut secara otomatis tidak lulus seleksi. Sedangkan sisi positifnya calon yang terkena daerah sampelnya justru akan diuntungkan karena lulus seleksi, selain itu sistem sample ini memang cukup menghemat dana/murah.

Namun fenomena lainnya ternyata selama masa seleksi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah ini memunculkan banyak kasus lainnya, seperti penggunaan KTP yang kadaluarsa/palsu, atau penggunaan KTP yang doble antara satu calon dengan calon lainnya, dll.

Kiranya perlu perbaikan proses seleksi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah ini sehingga fenomena-fenomena di atas tidak muncul lagi pada pemilu akan datang.

s

Kpu \6 Pnnuns[u

emang kalau dipertanyakan, siapakah yang

berkuasa dalam Proses penyelenggaraan pemi-

lihan umum tahun 20a4? Tentu iawabannya adalah lembaga

penyelenggara dan lembaga pengawas, yaitu KPU dan PANWASLU. Namun kalan dibuat rank maka lembaga KPU

menduduki urutan no' l dan lembaga PANWASLU menduduki urutan no. 2.

Kebiasaannya kekuasaan selalu berbau arogansi dan

lain-lain tema melekat padanya, maka salah satunya mengenai kedua lembaga penyelenggara dan pengawas

pemilu.

Apabila kita lihat pada aturan-aturan yang ada di UU No.12 tahun 2003, maka dapat dinilai bahwa aturan UU itu lebih memenangkan kelembagaan KPU dibandingkan lembaga PANWASLU. Lembaga KPU menjadi superior dibandingkan dengan lembaga PANWASLU.

Ibaratnya dalam frame kekuasaan, kedua lembaga ini

merupakan anak-anak dari kekuasaan tersebut, tetapi satu

anak sebagai anak kandung (KPU) dari kekuasaan dan satunya anak sebagai anak tiri (PANWASLU) dari kekuasaan. KPU sebagai anak kandung resmi kekuasaan mendapat

&* 3"/,* eool li ofhl"/. e,;U* &*a"@* 6,y_h;

keistimewaan-keistimewaan wewenang sedangkan PANWASLU sebagai anak tiri dari kekuasaan miskin keistimewaan wewenang.

KPU memang dirancang sebagai lembaga yang menyelenggarakan pemilu secara independent dan PANWASLU merupakan lembaga yang dirancang sebagai lembaga independent pengawas pemilu tetapi setengah hati. Maksudnya kekuasaan tersebut memang merancang lembaga KPU dapat bersikap jurdil dalam pemilu namun rerepi lembaga PANWASLU diharap hanya pendukung atau pengesah istilah jurdil tersebut tanpa melakukan upaya-upaya yang optimal.

Namun masalahnya, lembaga PANWASLU dalam realitasnya tidak seperti simbol namanya sebagai lembaga pengawas pemilu. Hal ini dikarenakan tata cara kerja lembaga ini yang diatur oleh UU No. 12 tahun 2003 tentang pemilu tidak memberikan kewenangan banyak, seperti lembaga PANWASLU hanya sebagai pelapor pelanggaran peserta pemilu ke KPU dan lembaga PANWASLU tidak memiliki kewenangan untuk menindak pelanggaran yang dilakukan oleh anggota KPU.

Perbedaan kewenangan dari UU pemilu tersebut, dalam realitanya cukup memicu kecemburuan anggota lembaga PANWASLU terhadap anggota KPU yang memiliki kewenangan luas atau besar.

t

Hnk Polirik
Penyusunan Cncnr pndn Pmilu 2004

...g udah diketahui secara umum bahwa setiap warga\J negara Indonesia memiliki kesempatan yang sama atau hak untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum. Hal

ini juga dijamin dalam sebuah konstitusi negara yang menyebutkan setiap warga negara memiliki hak berserikat,

berkumpul dan menyatakan opini.

Kaum penyandang cacat merupakan bagian dari warga

sebuah negara yang juga berarti memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya atau tidak ada pengecualian

apapun. Apabila warga sebuah negara memiliki hak untuk mengikuti kegiatan pemilihan umum maka para penyandang

cacat juga mempunyai hak untuk ikut dalam kegiatan pemilu

tersebut.

Persoalannya mungkin sudah terakomodasikan hak politik para penyandang cacat dari perspektif perundang-undangan atau realitas dilapangan? Hal ini penting untuk didiskusikan karena suara para penyandang cacat cukup besar di Indonesia dan keyakinan yang harus ditanamkan bahwa "satu suara itu sangat berarti untuk menentukan perubahan sebuah negara".

&* ?*ih zool /" &/te/: &,;y:"*- €*-ia;@*6^,u*;

Perspektif UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, keberadaan para penyandang cacat diatur ke dalam pasal 8S ayat 1,2 dan 3, yaitu: (1) pemilih tunanetra, tunadaksa atau mempunyai halangan fisik lain saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh petugas KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih. (2) petugas KPPS atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merasiakan pilihan pemilih (3) ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan kepada pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (t) dan ayat (2) ditetapkan oleh KPU.

Dari perspektif UU pemilu ini nampaknya keberadaan para penyandang cacat masih belum terakomodasi secara adil. Terlihat dari seluruh pasal yang ada, para penyandang cacat diatur oleh hanya satu pasal yang juga tidak mengandung unsur keadilan. Selain itu menurut penulis pasal 85 ini sebenarnya bertentangan dengan pasal asas rahasia dalam pemilu karena para penyandang cacat ketika mencoblos suara harus memakai pendamping.

Dari realitas di lapangan menuniukkan para penyandang cacat tidak menerima secara adil perlakuan sebagai warga negara saat pencoblosan pemilu. Mereka

dianggap kelas dua yang tidak terlalu penting dalam pemilu. Atau dari mereka hanya diambil suaranya saja tanpa menghiraukan hak politik mereka.

Oleh karena itu solusi bagi para penyandang cacat adalah kepentingan mereka harus banyak diakomodasi dalam UU pemilu melalui pasal-pasal yang mengatur keberadaan mereka secara adil dengan warga masyarakat

t

q,"* A*y.t &&* , a,//di g'q)"l**n et d,ll*"A od{,;

lainnya; petugas KPPS harus diingat untuk mempersilahkan para penyandang cacat membawa tenaga pendamping sendiri; sebaiknya desain kartu suara menggunakan huruf yang dapat dimengerti oleh para penyandang cacat; sebaiknya kartu pemilih menggunakan kartu dengan warna yang berbeda dari kartu warga masyarakat lainnya; bagi para penyandang cacat diadakan pendidikan politik dan pendidikan pemilih.

s

7

Eliminasi Kon[[ik
Knmpnye Pnrrni Polirik

OA beberapa saat lagi bangsa Indonesia akan memasuki/() tahapan pemilu selanjutnya, yaitu kampanye politik yang dimulai pada 11 Maret 2004. Tahapan ini mirip dengan sebuah pesta tetapi yang membedakan hanya pesertanya adalah partai-partai politik, tanah air Indonesia akan dibanjiri simbol warna yang plural dan teriakan yel-yel berbau bujukan oleh para kontestan pemilu.

Memang ada beberapa bentuk kampanye politik yang dilakukan oleh partai politik namun selama ini ada anggapan dimasyarakat kampanye pawai atau kampanye diruang terbuka merupakan kampanye yang paling rawan terjadinya konflik. Hal ini dilandasi asumsi saat berkampanye para pendukung sangat tidak rasional dan emosinya terbakar oleh ideologi partai politik. Sedikit saja ada pemicu maka lahirlah apa yang disebut dengan konflik.

Kondisi ini juga yang menjustifikasi bahwa negara-negara berkembang, salah satunya seperti Indonesia para kontestan pemilunya lebih tertarik dengan bentuk kampanye politik pawai, yang dengan tujuan selain menunjukkan keperkasaan partai politiknya juga untuk lebih melekatkan dan mendekatkan partai politik tersebut dengan basis masyarakatnya.

&* 3**/* soot li a%/,./, e^1.* €*ta@* V^1,*,*;

Kampanye politik pawai ini juga yang menjadi pusat perhatian para aparat keamanan untuk berupaya mengantisipasi konflik. Untuk daerah Kalimantan selatan khususnya Kota Banjarmasin terlihat adanya beberapa spanduk yang mencoba mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati saat diluar rumah/dijalan iika pada saat pawai kampanye sebuah partai politik. Spanduk ini sebagai bukti kesiapan atau beberapa persiapan menjelang pemilu.

Namun tidak itu saja KPU sebagai institusi resmi penyelenggara pemilu berupaya mengeliminasi benturan konflik pada saat kampanye politik dengan mengeluarkan kebijakan pengaturan jadwal kampanye partai politik.

KPU pusat, melalui Ramlan Surbakti mengistilahkan dengan konsep pemisahan kampanye partai politik yang se-ideologi. (8. Pos 20 Pebruari 2004). Dan unruk wilayah Kalimantan Selatan KPU setempat melalui Muhammad mengistilahkan dengan pemisahan kampanye partai politik dengan pecahan partai politik.

Kedua istilah di atas memang berbeda bahasa saja tetapi asumsi yang melandasinya tetap sama. Strategi KPU ini dilandasi asumsi bahwa partai politik yang se-ideologi cenderung terlahi perebutan atau benturan antar massa pendukung di lapangan pada saat kampanye pawai dikarenakan adanya kesamaan simbol-simbol yang digunakan atau asumsi lajannya antara partai politik dengan pecahan partai politik, seperti PDIP dengan PAN, PPP dengan PBR sudah memiliki benih konflik internal partai politik sehingga dikhawatirkan akan merembes ke pendukung pada saat kampanye pawai berlangsung.

%"/i & ",y,/i, &8-, o/k g"%f,"*^ d/; dln^./, ar"l";

Persoalannya betulkan strategi di atas dapat mengeliminasi konflik dalam kampanye partai politik nanti karena dapat

saia kenyataan di lapangan partai politik yang se-ideologi iustru menuniukkan konsensus atau keria sama pada saat kampanye nanti dikarenakan pendukungnya sama, seperti partai Golkar dan PKPB atau partai politik Islam yang pendukungnya lebih biiaksana tidak mempersoalkan perbedaan partai politik tetapi asal sama agama Islam. Sebaliknya partai politik yang tidak se-ideologi iustru konflik.

Perubahan Pola

Apabila strategi pemisahan kampanye partai politik

yang se-ideologi atau pemisahaan partai politik dan pecahan partai politik dilapangan berhasil mengeliminasi

konflik pada saat pemilu tahun 2004 ini maka bisa dipastikan terjadi perubahan pola konflik dari tidak se-ideologi menjadi se-ideologi partai politik. Namun jika sebaliknya tidak terjadi perubahan pola konflik.

Secara historis, pada pemilu 1997 justru yang berkonflik adalah partai politik yang tidak seideologi. Partai politik PPP justru berkoalisi dengan partai politik nasionalis pada saat kampanye dan sangat mendistorsi partai politik Golkar. Logikanya partai politik yang tidak seideologi bisa saja bergabung untuk mengalahkan partai politik yang ideologinya juga berbeda.

Pemilu 1997 dapat menjadi pelajaran bahwa partai-partai politik yang tidak dominan pada situasi tertentu dapat mengambil sikap menjadi partai politik oposisi untuk menggagalkan atau menghadang partai politik yang dominan

atau justru berkoalisi dengan partai politik yang dominan

pada saat itu dengan berbagai cara untuk mengalahkannya atau menjatuhkannya.

Namun bisa saja dilupakan justru menunjukkan realita lain pada pemilu 2004 ini, partai politik yang seideologi justru menunjukkan pola konsensus atau kerjasama pada saat kampanye padahal partai politik yang tidak seideologi menunjukkan pola konflik antar pendukung pada saat kampanye padahal.

Atau bisa saja tidak terjadi konflik pada pemilu 2004 ini pada saat padahal dikarenakan realita dilupakan para pendukung partai politik sebenarnya orang yang sama atau itu-itu juga. Mereka ini hanya berganti kostum dan menerima bayaran sehingga ketika diminta partai politik tertentu mereka siap berubah peran tanpa bernuansa konflik. Atau juga tidak ada konflik dari ideologi tetapi dari faktor lainnya yang memicu konflik.

Ini seperti sebuah eksperimen politik pada saat kampanye partai politik untuk meniadakan konflik tetapi ini juga bisa jadi spekulasi yang sangat berbahaya jika asumsi yang dipakai pengaturan kampanye berdasarkan partai politik yang seideologi atau pecahan partai politik dikarenakan jika realita konflik dilupakan justru mengarah ke pola yang tidak seideologi maka KPU melalui strateginya ini justru menjadi wahana atau wadah suburnya konflik dikarenakan secara sengaja mempertemukan saat kampanye politik oleh partai politik yang tidak se-ideologi.

Namun ternyata ketika kampanye partai politik di mulai strategi pemisahan partai politik se-ideologi untuk wilayah Kalimantan Selatan sangat berhasil dalam meredam konflik

kampanye partai politik.

t

Prnsrmninru

Konrnkn Polirik

fenomena politik baru bermunculan pasca selesainya pemilihan umum tahun 2004, salah satunya yaitu munculnya gerakan kontrak politik dengan para elit politik yang dipelopori oleh para mahasiswa dan organisasi lembaga swadaya masyarakat, yang tergabung dalam kelompok KAMMI, GMNI, Cempar, DEMA Unlam, BEM Fakultas dll.

Gerakan kontrak politik ini hampir terjadi di seluruh wilayah Negara Indonesia, ibarat tumbuh subur bagaikan cendawan di musim hujan. Kontrak politik ini seperti trend politik baru yang melanda benteng-benteng kekuasaan yang arogan dan korup.

Ungkapan Lord Acton, power tend to corrupt, absolutely power to corrupt. Menjadi sesuatu pembenar lagi dalam realitas kehidupan politik Indonesia pasca reformasi. Tentunya dengan realitas seperti ini perlu suatu bentuk kontrol di luar lembaga eksekutif dan parlemen yang tidak mudah terkontaminasi kekuasaan yang corrupt.

Kontrak politik ini meliputi para elit politik yang ada di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah. Para elit politik yang berada di tampuk kekuasaan kepresidenan,

&* @*;k toot t &A./, €t"l** &*;a @* 64i*a

kursi kekuasaan kepala daerah dan kursi kekuasaan di lembaga-lembaga legislatif.

Fenomena kontrak politik ini sebagai counter balik dari realitas-realitas politik pasca reformasi yang menunjukkan euforia, kekuasaan dan perebutan kekuasaan oleh para elit politik, yang secara sengaja melupakan aspirasi rakyat dan kedaulatan rakyat.

Salah satu ladang subur euforia kekuasaan tersebut adalah daerah-daerah yang pasca pemberlakuan otonomi daerah berparadigma baru yang memperlihatkan arus balik

kekuasaan dari pusat ke daerah. Arus balik kekuasaan ini menjadikan lembaga legislatif lokal sebagai benteng kekuasaan kedaulatan rakyat.

Namun realitas yang terjadi benteng kekuasaan ini dihuni oleh para corruptor politik yang tidak bertanggung

jawab, memainkan kekuasaan yang ada demi kepentingan kelompok dan kepentingan pribadi. Ibaratnya benteng kekuasaan ini secara sengaja membentuk rantai korupsi politik besar-besaran yang melibatkan seluruh lembaga penting di daerah termasuk kepala-kepala daerah.

Kontrak politik sebagai pertanda bahwa kelompok mahasiswa telah menemukan gerakan baru yang lebih bernuansa pembelaan kepentingan rakyat tanpa terlibat pada

proyek kekuasaan. Ini sekaligus bukti semangat reformasi yang pernah dinyalakan .pada obor-obor kedaulatan rakyat untuk meruntuhkan rezim orde baru yang berkuasa selama 32 tahun lamanya ternyata tetap terus menyala sampai sekarang dengan tema semangat baru kontrak politik.

t

'%,/,; &.,y.il:' 8e7*, a/'k g/%oti*/'* dh d&'d' a'//';

Walaupun gerakan kontrak politik tidak selalu berhasil

dan mendapat tempat di elit politik tetapi ini tetap sebagai

suatu bentuk upaya penyadaran dan kesadaran akan nasib

bangsa Indonesia di masa akan datang. Selamat menyemai-

kan kontrak politik.

Khusus wilayah Kalimantan Selatan gerakan kontrak

politik meliputi daerah HSU, Kabupaten Banjar, Kab' Tanah

Laut, Kotamadya Banjarmasin dan Propinsi Kalimantan

Selatan. Untuk gerakan kontrak politik di wilayah ini dipelopori oleh KAMMI, dll.

Tetapi khusus untuk legislatif propinsi gerakan kontrak

politik mengalami sedikit kegagalan dikarenakan adanya isu

kelompok pelopor pecah atau tidak bersatu dikarenakan ada

LSM, seperti gempar dan GMNI yang melakukan deal politik

dengan elit politisi legislatif tersebut dengan tindakan melepas atau memberi laluan keluar mereka dari gedung

DPRD.

Sedangkan legislatif di beberapa daerah lainnya cenderung berhasil dan kontrak politik dibangun dengan kesepakatan tertentu. Upaya ini cukup berhasil dikarenakan para pelopor gerakan menyodorkan kontrak politik pada saat mereka selesai pelantikan dan ini cukup efektif untuk mengumpulkan mereka- Para pelopor memaksa politisi ini menyetujui kontrak politik karena jika tidak mereka tidak bisa keluar dari lembaga DPRD tersebut (terkurung)

DPRD Kota Banjarmasin gerakan kontrak politik dilakukan hanya oleh KAMMI yang berbeda kontrak dengan daerah lainnya berupa para politisi DPRD Kota Banjarmasin

@* ?*;&, coot d; &Glr4 €;"V* &*ar@*6*r*

melakukan kontrak politik selama 100 hari setelah menjabat. Mekanismenya sebelum kontrak politik dibuat para politisi membacanya dan apabila setuju dengan poin tersebut para politisi lalu membubuhkan tanda tangan.

\$

Kuorn ,O%
Pnnlemrn Bnqi Penrmpunn Dnennh

,^q akta menunjukkan, Perempuan di hampir seluruh
V\elahan dunia tidak terwakili secara proporsional

dalam politik. perempuan menduduki hanya 14,3 o/o dari seluruh anggota parlemen. Negara-negara Skandinavia (Swedia, Norwegia, dan Denmark) memiliki tingkat keterwakilan perempuan paling tinggi, yaitu mencapai 40Vo,

sedangkan jumlah terendah diduduki oleh negara-negara

Arab, sekitar 4,60/o. (Internasional Idea, 2002).

Keterwakilan perempuan di daerah propinsi Kalimantan

Selatan sangat rendah pada pemilu 1999, beberapa data menunjukkan hampir disetiap parlemen daerah hanya sekitar 0 - 10 0/6 keterwakilan perempuan di parlemen daerah. Persoalannya mungkin mengapa keterwakilan perempuan di parlemen daerah itu rendah? Kalau dicari

alasanya ada berbagai argumentasi yang bisa menjelaskannya.

Apabila ditelusuri melalui kebijakan politik pemerintah memang tidak ada dukungan yang penuh terhadap keterlibatan politik perempuan dalam parlemen (memang

terasa diskriminatif UU pemilihan Umum tahun 1999 belum

menjamin keterlibatan politik perempuan. Apalagi UU

t

&* ?^;k eoot t o%L/, €ay.* &*a" @* 6*li,a

pemilu sebelumnya (masa orde baru) lebih tidak mendukung keterlibatan perempuan dalam politik. posisi perempuan pada waktu itu sangat diprioritaskan dan disubordinasikan melalui kerangka lembaga yang dibentuk penguasa pemerintah.

Secara fakta, keterlibatan perempuan dalam politik pada masa orba maupun sesudahnya masih sedikit. Keterlibatan politik ini lebih dikarenakan kemampuan sumber daya manusianya dan hubungan koneksitas. Kita mungkin masih ingat nama-nama Marwah Daut, Aisah Amini, H Indahparawansa dll. Dan juga berapa perempuan yang ada di MPR/DPR yang terpilih melalui hubungan koneksitas sebagai keluarga, anak pejabat dll. Mungkin bagi orang yang mendambakan kuantitas keterwakilan persoalan ini suatu hal biasa namun bagi orang yang berpandangan kualitas keterwakilan maka ini sesuatu yang menyimpang.

Kemudian lagi sudah berapa perempuan yang aktif di luar lembaga parlemen atau melalui parlemen jalanan menyuarakan tuntutan-tuntutan turunkan harga barang, persamaan hak, sebut saja tokohnya seperti karlina laksono dll. Atau demo-demo yang isunya mendadak seperti penggusuran, pengambilalihan lahan.

Ternyata perempuan jika dihitung dengan angka tidak kalah hebatnya dengan pihak laki-laki dalam mengumbar wacana merah-putih., hitam-putih dalam perpolitikan Indonesia. Berarti tidak pantas rasanya perempuan diperlakukan diskriminatif terhadap pengelolaan negara atau melalui anggapan hanya laki-laki (strong) yang mampu mengelola negara.

%"& A,*?"/r' &8*, ' a,y'f,; g'"i*/i^ dli 6{*J^'l' o'/ln

Kalau saja anggapannya ini yang mendominasi maka perempuan akan merasa lama atau terus beruang menuntut

keterlibatan dalam politik yang lebih luas. Dan sudah dapat dipastikan tidak akan pernah tercapai keterwakilan luas itu atau akan sangat lama jika tanpa didukung oleh kebijakan politik pemerintah.

Perjuangan yang tidak sia-sia oleh para aktivis perempuan untuk memperbesar partisipasi politik perempuan khususnya didalam parlemen dengan disetujuinya UU pemilu oleh DPR, yang salah satu pasalnya

mengenai kuota 30 Persen bagi perempuan di parlemen'

Prestasi yang luar biasa, sekaligus mengejutkan oleh

karena partai politik mayoritas di lembaga legislatif pada

awalnya menolak kuota 30 % kemudian pada hari dead

line 23 Pebruari 2003 berbalik arah menyetujui kuota tersebut. Keberhasilan ini tidak terlepas dari perjuangan para perempuan yang ada di PDI-P secara gencar meyakinkan partainya untuk menerima usulan kuota 30olo

parlemen ini.

Kesukacitaan dan kegembiraan ini diungkapkan oleh Sutjipto dari Centre For Electoral Reform (Cetro) (Kompas, 23

Pebruari 2003) yang menyatakan, Pencapaian ini merupakan

kemenangan perjuangan Perempuan dibidang politik formal

meskipun baru pada tahap paling awal.

Namun fenomena kegembiraan dan kesadaran partisipasi politik ini hanya terjadi di Pusat dan oleh perempuan yang berada di Pusat. Lalu bagaimana arti 30/0 ini bagi perempuan yang berada di daerah: dianggap sebagai

sebuah cambuk memacu kreatifitas atau menganggap hal

&* 3.-;A zoot /; a%/.! e^;. * €*:az@* E*/,;.*;

biasa saja dikarenakan begitu kuatnya rantai kultural yang mengikat mereka.

Persoalan kultural merupakan persoalan yang sangat klasik dalam dunia perempuan untuk kesetaraan gender. Apapun bentuk upaya peningkatan kesetaraan gender akan

selalu berhadapan dengan persoalan-persoalan ini. Tetapi paling tidak kebiiaan kuota 30olo ini mempunyai kekhasan sendiri bagi penciptaan peluang aktifitas politik perempuan.

Menurut Isra (Kompas, 24 pebruari 2003), sepintas kuota keterwakilan perempuan dapat dinilai sebagai langkah progresif yang dilakukan beberapa kekuatan partai politik di DPR. Tetapi kalau dilihat dari perspektif perumusan norma hukum, pasal 65 ayat (1) tidak mempunyai kekuatan imperatif yang dapat memaksa parpol terikat memenuhi kuota 30yo. Kata "dapat", tidak lebih dari dorongan untuk parpol agar memperhatikan keterwakilan perempuan. Apalagi bila didalami, tidak ada sanksi yang dapat dijatuhkan kepada parpol yang tidak berupaya memenuhi kuota 30olo. Pasal ini memang sangat ambiguitas dan ini dapat menjadi senyata bagi parpol (didominasi laki-laki) untuk tidak menialankan kuota keterwakilan ini.

Persoalan-persoalan kultural atau yang lainnya di daerah ini merupakan kendala keterlibatan perempuan dalam politik. Sehingga upaya-upaya terwujudnya kuota 30olo keterwakilan perempuan sangat tergantung pada link kerjasama yang bersifat mutualisme simbiosis antara perempuan-perempuan dan partai politik. Adanya solidaritas yang muncul antar perempuan yang tidak berbasis kepentingan sempit dan

'gl"A A*y.*, &&*, ar'{'a g/Q)"1".1;* dh d*I^"d afl.i

kerelaan partai politik untuk memberi peluang dan memberdayakan perempuan secara politik.

Bagaimanapun daerah-daerah merupakan salah satu basis demokrasi karena menghubungkan antara rakyat yang

ada di propinsi-kabupaten-kecamatan dan desa, sehingga peran kesadaran politik perempuan sangat berpengaruh besar atau penyumbang besar dalam perubahan pada tatanan struktur masyarakat dan politik di daerah.

Mungkin saia kuota 30olo parlemen ini menjadi menarik dikarenakan adanya peluang kebijakan yang secara resmi mensertakan keterlibatan perempuan dalam politik. Paling tidak para perempuan akan lebih mudah menciptakan peluang-pelung kesetaraan gender lainnya dengan berada atau didalam lembaga keputusan politik dan pengawas pemerintahan.

Apalagi kenyataan politik yang sangat mendukung berupa sekitar 5l o/o pemilih dalam pemilu adalah perempuan. Real politik ini iika dikelola secara profesional merupakan ladang yang subur bagi peningkatan partisipasi politik perempuan dan sekaligus secara sadar merupakan

harga tawar yang tinggi bagi perempuan.

Memang dalam proses tahapan pemilihan umum 2004 di Kalimantan Selatan masih menuniukkan bahwa periuangan perempuan dalam politik masih paniang, di mana hampir semua partai politik menempatkan calon perempuan pada daftar tetap calon sementara (DTCS) pada urutan-urutan nomer sepatu,/nomer tidak iadi.

Namun hasil akhir pada pemilu 2004 cukup menggem-
birakan, dimana menunfukkan teriadi perubahan komposisi

&@* 3*;/* t o ol /; o%,(ot' €;,7* €*;aa @* 64,aa

keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, teriadi penyebaran keterakilan perempuan dibandingkan dengan hasil pemilu 1999. Hasil pemilu 1999 menuniukkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif hanya berada pada 4 kabupaten sedangkan hasil pemilu 2004 menun-
iukkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif berada pada 11 kabupaten.

Golongan Putih

OD ada setiap putaran pemilihan umum golput (golongan 1-/ putih) merupakan fenomena yang selalu hadir. Dan

sering dianggap sebagai bayangan problem dari demokrasi. Bagi negara Indonesia, golput merupakan persoalan klasik,

golput kadang-kadang tumbuh subur bagai cendawan di musim

huian dan kadang-kadang mati pertumbuhan (tidak dihiraukan).

Golput sepertinya respon atas penyelenggaraan pemilu di suatu negara. (apakah demokratis atau tidak demokratis).

Isu golput yang selalu muncul pada setiap pemilu, pertama

kali dilontarkan oleh Arief Budiman pada pemilu 1971. Saat melancarkan aksi tidak memilih menielang pemilu 1971, karena menganggap pemilu 1971 tidak demokratis dan tidak mencerminkan adanya kedaulatan rakyat. Kemudian mengaiak

rakyat untuk tidak memilih atau datang ke bilik suara tetapi mencoblos bagian yang putih (di luar tanda gambar partai politik) dari kartu suara. Para pengikut aiakan ini kemudian dikenal dengan sebutan golput (golongan putih). (Asa, 1999).

Pada masa pemerintahan Orde baru atau sepaniang penyelenggaraan pemilu orde baru, golput berkembang biak

dengan subur dan terus meningkat dari waktu ke waktu. Hal ini terjadi dikarenakan pemilu pada masa orde baru dianggap

&* 3n*;1" Boot A; &/*I €;"V* €*:a; @* 6,,/*;*;

kurang demokratis dan mengebiri hak politik rakyat.

Dalam kerangka teoritis politik, golput sering dipotret dalam istilah perilaku pemilih. Oleh karena itu golput dianggap sebagai bagian dari pemilu, rerapi diasumsikan sebagai hak individu yang menolak ikut berpartisipasi dalam pemilu. Namun penggunaan hak pemilih yang tidak ikut pemilu tetap dianggap sebagai individu tersebut melakukan pilihan dalam pemilu dengan tidak ikut pemilihan umum.

Untuk wilayah Kalimantan Selatan data t pU Kalsel (2004) menunjukkan jumlah pemilih sekitar 2.212.430 dan

jumlah golput sekitar 462.284 pada pemilu anggota legislatif di semua daerah pemilihan yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

Jumlah golput di Kalimantan Selatan ini cukup tinggi, apabila di persenkan dengan total jumlah pemilih mencapai sekitar 20,90/o. Jumlah ini melampaui jumlah golput pada pemilu 1992 yang mencapai sekitar 16,560/o.

Jumlah golput ini tidak termasuk surat suara yang rusak/ keliru mencoblos yang jumlahnya sekitar 26.468 serta surat suara tidak sah yang jumlahnya sekitar 180.932.

Meningkatnya jumlah golput pada pemilu legislatif 2004 di wilayah Kalimantan Selatan tersebut cukup mengejutkan karena pemilu 2004 merupakan pemilu pada masa reformasi yang diistilahkan dengan pemilu demokratis.

Meningkatnya jumlah golput ini merupakan pekerjaan rumah bagi para penyelenggara pemilu dan pihak akademis untuk berupaya melakukan penyempurnaan-penyempurnaan penyelenggaraan pemilu, sehingga pemilu yang demokratis memang terbagun di ranah lokal Banjar.

EvElunsi

Kinenin KPU Perulu z00F.

,-q e cara legalistik berdasarkan UU No. 12 Tahun 2003J tentang Pemilihan Umum, KPU merupakan satu-satunya lembaga resmi yang menyelenggarakan pesta pemilihan umum di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Oleh karena itu sebagai lembaga resmi KPU bersifat nasional, tetap dan mandiri.

Sifat-sifat yang melekat dalam lembaga KPU ini

menyebabkan KPU berdiri pada posisi independen terhadap lembaga-lembaga lainnya dan kepentingan-kepentingan di luar KPtl.

Kemudian berdasarkan struktur organisasi penyelenggara pemilu terdiri atas KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota yang memiliki sekretariat. KPU Provinsi adalah penyelenggara pemilu di tingkat provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara pemilu di tingkat Kabupaten/Kota.

Dalam penyelenggaraan pesta pemilu KPU membentuk PPK, PPS, dan KPPS untuk wilayah dalam negeri sedangkan untuk wilayah luar negeri dibentuk PPLN dan KPPSLN.

Berdasarkan pengaturan lembaga KPU dalam Keputusan KPU No. 622 dan 677 tahun 2003 memperlihatkan

&* ?*/* zoot t e%/" ./, ery* €*ta; @* V-h:*;

kemudahan dan kesederhanaan, tetapi dalam realitasnya menimbulkan beberapa persoalan-persoalan yang serius, seperti uraian di bawah ini:

Dalam sistem kerjanya KPU tersebut, salah satunya bersifat komando atau sentralistik. Artinya KpU pusat merupakan sentral dari semua keputusan yang dibuat dan ditaati atau berlaku terhadap KPU di provinsi dan KpU Kabupaten/Kota.

 **Plagiarism detected: 0,02%** <http://ar.mian.fisip-unmul.ac.id/si...>

id: 76

KPU Provinsi dan KpU Kabupaten/Kota

merupakan kepaniangan tangan dari KpU pusat dalam menyelenggarakan pesta pemilihan umum di daerah.

Sebenarnya sistem kerja bersifat komando atau sentralistik ini mempunyai dua sisi positif dan sisi negatif. Satu sisi sifat komando atau sentralistik ini mengandung unsur positif, seperti ketertiban pelaksanaan, kesatuan komando keputusan, hubungan kerja yang kuat dll. Tetapi juga sifat ini mengandung unsur negatif, seperti kekakuan/ ketidakfleksibel kineria sistem, beban anggaran yang ringgi, keterlambatan antisipasi masalah yang muncul, dll.

Dan berdasarkan sifat ini penyelenggaraan pesta pemilihan umum sangat diwarnai oleh persoalan-persoalan unsur negatif dibandingkan unsur positifnya, seperti peristiwa-peristiwa terlambatnya distribusi pengadaan kotak suara dan surat suara, pengambilan keputusan yang terlambat, di mana kedua peristiwa ini menimbulkan bertambahnya beban anggaran KpU.

Lebih spesifik, khusus di Kalimantan Selatan pesta

penyelenggaraan pemilu 2004

 Plagiarism detected: 0,02% <http://ar.mian.fisip-unmul.ac.id/si...>

id: 77

oleh KPU provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota

menunjukkan munculnya beberapa
problem-problem, seperti di tabel berikut ini:

t

%"/i A*.y.4i, &&-, o, //a g%"tuA- dlt d, ll*"A e, /{"i.

Tabel Problem Yang Muncul Pada Pemilu 2004

Data: diolah 2004

Beberapa problem di atas pemicunya berasal dari KPU
pusat sendiri tetapi juga berasal dari

 Plagiarism detected: 0,02% <http://ar.mian.fisip-unmul.ac.id/si...>

id: 78

KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota

di Kalsel. Yang jelas dari problem yang
muncul ini diperlukan perbaikan mekanisme sistem di KPU
sehingga di masa akan datang problem-problem ini menjadi
berkurang.

t

Distribusi kertas suara yang memakan waktu lama

Tuntutan kenaikan honor petugas Pemungutan suara

8. I, Kerenggangan hubungan KPU dan Panwaslu

i- K"r'd"kl"rgk"p* f"rilit* p"rnifi f, p"ry" "dr"g
*cat

iil j.ri"di"y" iPs k"l"bih" f".irin

Evnlnusi

Kinenin Pnnwnslu Klnsel

@fialan segi pengembangan keorganisasian posisi/ Panwaslu sebagai organisasi pengawas pemilu
menunjukkan kecenderungan perkembangan yang sangat
baik. Hal ini dikarenakan terjadinya perubahan-perubahan
politik yang lebih kondusif bersemainya benih-benih
demokrasi.

Masih terbayang posisi panwaslu pada masa orde baru
yang kinerjanya dibawah kendali besar kekuasaan rezim
yang memerintah. Kemudian panwaslu pada pemilu t999

yang kinerjanya masih dibayangi kondisi transisi politik dan posisi negara dalam keadaan lemah.

Pada tataran realitas politik panwaslu sangat terlihat berbeda dengan generasi sebelumnya yang lebih banyak dikoptasi oleh kepentingan-kepentingan politik tertentu dan keterbatasan sumber daya manusia. Dibandingkan pada saat sekarang Panwaslu memiliki independensi yang kuat serta sumber daya manusia yang cukup untuk mengemban tugas-tugas pengawasan pemilu.

Pertanyaan yang menarik saat ini apakah panwaslu sekarang cukup dapat dikategorikan sebagai organisasi yang

&* 3*;k zoot d; &/,"il &^7*- €*;a,@* V^1,;*"

efektif? Dengan asumsi tersedianya person (manusia), peralatan (sarana) dan sumber dana serta perubahan lingkungan politik dari masa sebelumnya.

Secara sederhana proses sebuah organisasi digambarkan dengan adanya aspek masukan (input) kemudian aspek proses sistem organisasi yang berakhir dengan aspek keluaran (output). Proses alur organisasi ini dapat menjadi tolak ukur atau basis analisis bagi kinerja paswaslu.

Aspek input

Aspek input meliputi input (masukan) berupa rekrut-

men anggotanya dan data pelanggaran. Keanggotaannya sudah jelas disebutkan dalam UU No. 12 tahun 2003 tentang pemilihan umum. Pasal 20 - 126, yang menyebutkan secara garis besarnya panitia pengawas pemilu provinsi dibentuk oleh panitia pengawas pemilu pusat, yang berjumlah 7 orang, yang terdiri dari unsur kepolisian negara, kejaksaan, perguruan tinggi, tokoh masyarakat dan pers.

Memang apabila disimak pasal pemilu diatas mengandung

2 sisi. Satu sisi menunjukkan kebaikan, seperti dalam hal rekrutmen mengandung unsur yang berbeda dan mewakili unsur yang ada di masyarakat dan beberapa anggota tersebut berasal dari lembaga yang menindak pelanggaran sehingga diharapkan akan memudahkan urusan-urusan di pengadilan. Sisi lainnya rekrutmen anggota khususnya adanya teriadinya rangkap jabatan yang otomatis juga akan berdampak pada optimalisasi kerja individu tersebut.

Kemudian realitas Panwaslu Kalsel dari sudut jumlah anggota awal semula 6 (enam) orang kemudian menjadi 5

%"/i A*?"/i &8*, a/{.: g%"ha. dt d*n^./, a,/{";

(lima) orang tentunya ini dapat berpengaruh pada efektivitas kinerja yang dilakukan. Hal ini dikarenakan posisi 7 (tujuh) orang sebenarnya akan lebih memungkinkan para anggota untuk melakukan tugas dan fungsi secara profesional dan efektif .

Secara logikanya jumlah anggota 5 orang akan menanggung beban kerja yang seharusnya diemban 7 orang sehingga bisa dibayangkan akan terjadi 1 orang merangkap beban kerja lainnya, yang otomatis akan terjadi ketidak-optimalan fungsi-fungsi di panwaslu kalsel.

Dari masukan data pelanggaran sudah jelas juga mekanismenya yang disebutkan dalam UU No. 12 tahun 2003 tentang pemilihan umum. Pasal 127-132, yang menyebutkan secara garis besar panwaslu menerima laporan pelanggaran pemilu dari warga negara, pemantau pemilu dan peserta pemilu. Yang kemudian diproses sesuai prosedur yang berlaku.

Data pelanggaran menyangkut aplikasi sarana peralatan yang digunakan untuk akses data, kemampuan anggota dalam menanganinya dan sumber dana yang digunakan. Beberapa kekurangan (dana) dalam hal ini dapat sia panwaslu teriebak pada sikap memilah-milah kasus pelanggaran, seperti melihat pada keterlibatan siapa orangnya dan kerumitan kasus tersebut sehingga mengambil langkah pintas yang penting ada kasus pelanggaran yang ditangani.

Sesuai sifatnya panwaslu hanya sebagai lembaga yang menunggu laporan pelanggaran dari warga negara atau pemantau pemilu lainnya. Namun dalam hal ini panwaslu

&* ?*,il*, 0 04 li a/GLI €;^l* &*;az @* V*y';*a

Kalsel cukup agresif mampu menangani kasus-kasus seperti izasah palsu dan masalah kesehatan calon anggota legislatif dibandingkan panwaslu sebelumnya.

Selain itu realitas pembentukan panwaslu setelah KpU sebenarnya bisa menghambat jumlah masukan data pelanggaran, di mana panwaslu terbentuk ketika pemilu sudah berjal;an beberapa tahapan.

Aspek proses

Aspek proses meliputi hubungan fungsi antara divisi panwaslu dan hubungan panwaslu dengan lembaga lainnya. Hubungan fungsi antara divisi yang dimaksud hubungan struktur kerjanya dan anggota yang ada di panwaslu sedangkan hubungan panwaslu dengan lembaga

lain maksudnya posisi panwaslu dengan lembaga lainnya, seperti KPU.

Dalam hal proses sistem organisasi panwaslu Kalsel menerapkan pembagian struktur ke dalam tiga bidang, yaitu bidang tindak lanjut pelanggaran, pengawasan dan penyelesaian sengketa. Bidang-bidang ini dibentuk sesuai dengan jumlah orang yang ada di panwaslu.

Di panwaslu kalsel bidang-bidang kerja ini diemban oleh 5 orang sehingga rangkap jabatan dan over beban kerja setiap orang menjadi tinggi. Sedangkan hubungan antar anggota cukup baik dikarenakan tidak ada konflik dan perebutan di panwaslu kalsel

Sedangkan dari sudut hubungan dengan lembaga lainnya, seperti KPU menunjukkan posisi lembaga panwaslu

lemah, berdasarkan UU No. 12 tahun 2003 tentang pemilu,

pasal 120*121 menyebutkan panwaslu dibentuk oleh KPU dan panwaslu bertanggung jawab kepada KPU.

Pasal-pasal di atas sebenarnya dapat mengekang kinerja

panwaslu sehingga panwaslu tidak optimal kerjanya dikarenakan adanya benturan rentang kendali dan administratif dengan KPU, misalnya KPU sebagai pihak yang

berwenang mengganggu penyelesaian administratif yang telah diproses panwas.

Aspek output

Aspek output (keluaran) menyangkut produk atau hasil

yang dicapai. Untuk panwaslu berupa berapa jumlah tindak

lanjut pelanggaran, berapa jumlah pengawasan dan berapa

jumlah penyelesaian sengketa yang telah dicapai.

Dalam hal ini panwaslu kalsel telah menindak pelanggaran sebanyak 90 perkara, yang terdiri dari 2 perkara masih dipenyidik, 6 perkara masuk di persidangan pengadilan, 72 perkara sudah diputuskan pengadilan, dan 10 perkara yang oleh penyidik di SP3 kan.

Perkara-perkara yang diselesaikan panwaslu kalsel tersebut cukup beragam, seperti pemalsuan keterangan pendidikan, sebaran gelap, pencoblosan lebih satu kali, dll. Walaupun cukup banyak perkara yang diselesaikan panwaslu kalsel tetapi masih ada beberapa yang belum

maksimal dilakukan, seperti tidak adanya kasus money politik dan pemakaian mobil dinas..

Knirik

Trnhndnp UU Prmilu 200+

-/Yfritik

yang dimaksud adalah kritik terhadap UU

U\$^titihan uinum 2004, yaitu uu No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan umum. Kritik ini disampaikan karena realitas pelaksanaan UU pemilu ini, khususnya pasal-pasal nya melahirkan kesenanganan dan ketidakadilan politik

bagi masyarakat.

Selain itu kritik ini disampaikan demi pembangunan

politik Indonesia pada masa-masa yang akan datang.

Walaupun tetap disadari realitas sekarang bahwa UU pemilu

ini sebagai bagian dari produk reformasi atau perubahan secara gradual / bertahap dari proses politik di Indonesia.

Oleh karena keyakinan akan reformasi ini maka kritik disampaikan terhadap UU pemilu ini agar mendapat respon dari fihak-fihak pengambil keputusan sehingga pemilu pada masa yang akan datang menunjukkan perubahan yang lebih

cerah bagi proses pemilihan umum.

Untuk memudahkan pemaparan kritik ini maka kritik dibangun berdasarkan urutan pasal-pasal dan ayat-ayat yang

terdapat di dalam undang-undang pemilihan umum disertai dengan komentar-komentar rasional, sebagai berikut:

&* g*;/, zoot li of{LJ, gA* €"*** @on 6*y'n*

UU No. 12 tahun 2003 tentang pemilu:

Pasal 9 ayat (1), yang menyebutkan „untuk dapat

mengikuti pemilu berikutnya, partai politik peserta pemilu harus memperoleh sekurang-kurangnya 30% jumlah kursi DPR atau 40% jumlah kursi

 **Plagiarism detected: 0,02%** <https://wilyhikaru22.blogspot.com/2...>

id: 79

DPRD Provinsi yang tersebar sekurang-kurangnya di

tzz jumlah provinsi seluruh Indonesia atau 40% jumlah

 **Plagiarism detected: 0,02%** <https://wilyhikaru22.blogspot.com/2...>

id: 80

kursi DPRD Kabupaten/Kota yang tersebar

sekarang-kurangnya Zz jumlah kabupaten/kota seluruh Indonesia ".

Untuk penguatan keterwakilan rakyat yang berbasis demokratis, pasal 9 di atas perlu ditinjau kembali dengan dilakukannya revisi terhadap persyaratan partai politik yang ikut pemilu di masa yang akan datang. Revisi tersebut dapat dilakukan dengan menaikkan ambang batas persyaratan partai politik yang ikut pemilu akan datang sebesar 5 - 6 o/o. Sehingga diharapkan dengan ambang batas ini jumlah partai politik yang ikut pemilu akan datang men jadi berkurang dari jumlah sekarang. Dengan berkurangnya jumlah partai politik dalam pemilu akan datang akan mendorong atau menciptakan kompetisi program antar partai yang sangat kuat berbasis kerakyatan. Dan apabila dibandingkan dengan negara lainnya, seperti Taiwan, Norwegia dll, ambang batas partai politik di Indonesia dengan 3 - 4 o/o cukup rendah karena di beberapa negara sudah menggunakan standar kisaran 6 - 7o/o.

Pasal It mengenai syarat dukungan bagi calon anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah). Persyaratan calon DpD ini memang semangatnya dibangun atas keterwakilan wilayah provinsi sehingga pengaturannya syarat lebih

%" /i & "" .?"1;, &8*, er' {.; g' %ol*/;* oil; dU*./, o,ff;.

banyak pada wilayah provinsi. Namun persyaratan ini perlu ditinjau ulang untuk dilakukan revisi-revisi karena persyaratan ini terlalu kaku yang ditambah dengan peraturan berikutnya dimana pengujian calon DPD berdasarkan sampel daerah.

Persyaratan calon DPD menjadi tidak efektif disebabkan fasilitas pendukung di daerah yang belum canggih, misalnya penggunaan KTP bervariasi antar daerah (seperti ada KTP yang sudah komputerisasi dan ada KTP yang tidak komputerisasi atau KTP sementara), KTP sementara akan menyulitkan dalam pengujian keabsahannya sehingga sering terjadi KTP yang kadaluarsa dan tumpang tindih antar penduduk. Sehingga disarankan untuk pemilihan umum akan datang persyaratan calon DPD berdasarkan kartu pemilih sehingga memudahkan untuk pengujian keabsahan-nya. Selain itu ditiadakannya peraturan tambahan mengenai pengujian calon DPD dengan sampel daerah karena pengujian sampel ini tidak menjamin keadilan bagi calon DPD dan memberi peluang manipulasi antar calon DPD

dengan lembaga KPU dalam penentuan sampel daerah.

Bagian enam pasal 43 mengenai pengadaan dan pendistribusian surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan pemilu. Pengadaan surat suara menggunakan konsep

sentralisasi, yang artinya pengadaan surat suara dilakukan oleh KPU pusat kemudian didistribusikan ke daerah provinsi. Sistem sentralisasi pengadaan surat suara pada pemilu ini cukup beresiko tinggi karena menyebabkan keterlambatan-keterlambatan dan pembengkakan anggaran pengiriman. Kondisi ini terjadi disebabkan kondisi geografis

t

&* hmilo 2004 1' &G/'/' &'y* &with@*6^fuxa

yang berpisah daratan oleh laut dan adanya tempat-tempat

terpencil yang sulit dijangkau transportasi darat dan laut'

Sehingga selain terjadi keterlambatan pengiriman juga

membengkaknya biaya karena dalam proses distribusi surat

suara itu menggunakan jalur udara yang biayanya lebih

mahal, seperti penggunaan helikopter dll'

Sisi lainnya bentuk surat suara itu tidak menjamin

kerahasiaan dan keterwakilan pemilih penyandang cacat

dikarenakan tidak menggunakan huruf braille atau huruf

yang dapat dimengerti mereka sehingga kebiasaannya para

pemilih penyandang cacat menggunakan bantuan fihak lain

yang belum tentu jelas independensinya'

Pasal 53 mengenai pendaftaran pemilih yang meng-

gunakan cara Petugas aktif dan pemilih yang aktif mendaftar'

Penggunaan cara ini sebenarnya menimbulkan kelemahan

atau ketidakefektifan apabila pada keadaan pemilih yang

pasif, pekerjaan yang heterogen dari pemilih' dan geografis

yang kepulauan. Yang mengakibatkan ketidak akuratan data

pemilih. Sehingga disarankan untuk pendaftaran pemilih

menggunakan cara Petugas pemilih aktif saia untuk

mengeliminasi ketidakakuratan data pemilih' dan sebaiknya

petugas pemilih bukan berasal dari lembaga BPS tetapi

petugas PPS atau PPK yang bekerjasama dengan fihak RT'

Kemudian kekurangan pasal 53 ini tidak mencantumkan

atau membedakan warna kartu pemilih antara pemilih yang

fisik sempurna dengan Penyandang cacat sehingga

kebiasaan terjadi pada saat pemungutan suara di mana

pemilih tuna rungu tidak mendengar ketika dipanggil

sehingga kehilangan hak suaranya'

"/,;&".g./,;, &&*, o,{k g'Q}"|^"/;. dl dll^,4 a/{"i

Pasal 60 mengenai persyaratan calon anggota DPR, DPD,

DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten /Kota khususnya bagian c mengenai "domisili calon di wilayah negara Indonesia" dan bagian e mengenai "pendidikan calon yang

serendah-rendahnya SMA atau sederajat".

Khusus bagian c pada satu sisi memang menjamin kebebasan asal wilayah calon dan kesatuan negara Indonesia

namun pada sisi lainnya domisili ini juga dapat menyebabkan

melemahnya posisi keterwakilan calon tersebut khususnya

keterwakilan secara daerah. Dimana orang-orang yang

menjadi anggota DPR pusat bisa saia bukan orang yang

berasal dari daerah yang diwakilinya atau pemilihnya.

Khusus bagin e syarat pendidikan ini menimbulkan kerumitan tertentu, seperti istilah SMA atau sederaiat. Di mana departemen pendidikan nasional yang ada di daerah tidak akurat memiliki data mengenai sekolah yang sederaiat

dengan SMA sehingga banyak kejadian yang muncul negenai kebsahan iiazah ini.

Pasal 65 ayat (1) "pengaiuan calon

 **Plagiarism detected: 0,03%** <https://belajarpkndenganhendri.word...>

id: 81

anggota DPR, DPRD
Provinsi, DPRD Kabupaten /Kota

untuk setiap daerah
pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan

sekurang-kurangnya 30o/o". Ayat (1) di atas sebenarnya kurang meniamin keterwakilan perempuan dalam pemilu. Istilah memperhatikan kurang memiliki dorongan kuat bagi partai politik untuk pengikutsertakan calon perempuan dalam pemilu sehingga dalam pemilu 2004 tadi calon perempuan kurang diperhatikan dan mendapat porsi urutan

terbawah dalam susunan calon.

Pasal 65 ayat (2) "setiap partai politik mengaiukan calon

K

t

,9* 9*;/,. c o o t A: e7{,t "L e;,V* &***" 9 * 6,,1l*t,

sebanyak-banyaknya t20o/o dari jumlah kursi di daerah pemilihan". Ayat (2) ini sebenarnya bermakna ganda dan sangat bias bagi efektifitas dan demokratisasi, dimana pada saat pemilu 2004 dikarenakan t20o/o iumlah calon pada saat iumlah partai banyak akan menyebabkan besarnya kertaS suara dan banyaknya calon sehingga dapat saia membingungkan pemilih dalam penentuan calon-calonnya.

Pasal 71 ayat (3) "kegiatan kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu selama 3 (tiga) minggu
ayat ini memperlihatkan pembatasan-pembatasan terhadap kampanye peserta pemilu. Pada posisi peserta pemilu yang banyak dan kondisi geografis yang berkepulauan aturan pembatasan pemilu yang pendek dapat menyebabkan menjadi sebuah dilemma dikarenakan kreatifitas para calon dalam berkampanye tidak optimal dan mungkin saia para calon akan terperangkap untuk malas berkampanye.

Pasal 84 ayat (1) "pemberian suara untuk

 Plagiarism detected: 0,03% <https://belajarpkndenganhendri.word...>

id: 82

anggota DpR,
DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota

dilakukan dengan mencoblos salah satu tanda gambar partai politik peserta pemilu dan mencoblos satu calon dibawah tanda gambar....". ayat ini masih menunjukkan kekuasaan partai politik dan keterwakilan partai politik bukan kekuasaan calon dan keterwakilan calon. Sehingga terlihat pola lama masih dimainkan dengan lebih mengedepankan partai politik dan tidak calonnya.

Pasal 107 ayat (2) "penetapan calon terpilih

 Plagiarism detected: 0,03% <https://belajarpkndenganhendri.word...>

id: 83

anggota DpR,
DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota

.....berdasarkan iumlah kursi yang diperoleh partai politik dengan ketentuan: calon yang mencapai angka BPP ditetapkan sebagai calon terpilih

t
'g)"* g*?"', &&*, o,r'k g%'i*di* db dlln /, a,//4i

dan calon yang tidak mencapai angka BPP berdasarkan nomor urut pada daftar calon.....". Ayat ini pun sebenarnya kurang melegitimasi keberadaan calon dan merugikan calon dikarenakan suara-suara yang diperoleh calon akan kandas

dengan mekanisme berdasarkan nomor urut calon sehingga calon yang mendapat suara 3.000 akan kalah atau tidak menjadi anggota DPRD dengan nomor urut 5 dibandingkan calon dari partai yang sama yang walaupun iumlah suaranya

2.000 tetapi menduduki peringkat nomor 1.

f
Dnfirmn Fusrnkn

Admosoedirdjo, Praiodi, 1976. Dasar-Dasar Administrasi Manajemen dengan Office management, Cuning Agung, Jakarta.

Andrian, Charles n 1992. Perubahan Politik dan Perubahan Sosial, Tiara Wacana, Yogyakarta.

Arifin, A, 1984. Strategi Komunikasi, Amico, Bandung.

Asfar, Muhammad, 2002, Model-Model Sistem Pemilihan Di Indonesia, Pusat Studi Demokrasi dan HAM, Surabaya.

Blondel, Jean. Comparative Government: An Introduction, Prentice-Hall, New Jersey, 1995.

Budiardio, Meriam, 1991. Dasar-Dasar Ilmu Politik, PT. Cramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Budiardio, Meriam, 1996. Demokrasi Di Indonesia - Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila, PT. Cramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Cipto, Bambang, 1996. Prospek dan Tantangan Partai Politik, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Doob, LW 1950. Public Opinion and Propaganda, Hanny Holt & Co, New York.

Duverger, Maurice, 1967. Political Parties: Their Organization and Activities In Modern State, Methum, London.

&* @*;k eool il; oKr/r"/, €ay.* e*";d, @* 6.,p*;

Fathurrahman & Sobri, 2002. Pengantar Ilmu politik, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.

Frederich, Carl ;, 1967. Constitutional Government and Democracy: Theory and Practic In Europe and Amerika, Waltham Mass Company.

Caffar, Affan, 1999. Politik Indonesia Tiansisi Menuiu Demokrasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Cibson, James L dkk, 1992. Organisasi Dan Manaiemen perilaku, Struktur, Proses, Peneriemah Dioeban W, penerbit Airlangga, Jakarta.

Huntington, Samuel, 1984. Tertib Politik, Peneriemah Sahat S, Ralawali Press, Jakarta.

Indrawiiaya, Adam I, 1989. Perilaku Organisasi, Sinar Baru, Bandung.

Kasnawi, M T & Rasyid T, 1999. Kekuaran-Kekuaran Sosial politik

Indonesia, Universitas Terbuka, Jakarta.

Miquail, Dennis M & Windahl, 1993. Communication Models: For

The Study Of Mass Communication, Logiman Co, New York.

Miquail, D, 1987. Mass Communication Theory: an introduction,

Sage Publication, London.

Nimmo, Dan, 1993. Politic Communication, Good year publishing

Co.

Rodee, C C dkk, 2000. Pengantar Ilmu Politik, Penerjemah Zulkifli

H, RaiaGrafindo Persada, Jakarta.

Sarbaini, Syahrial dkk, 2002. Sosiologi Politik, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sastropoetro, RA S, 1991 . Propaganda, Alurnni, Bandung.

Slagian, Sondang B 1985. Filsafat Administrasi, Gunung Agung,

Jakarta.

Steers, R.ichard M, 1985. Efektivitas Organisasi, penerjemah

Magdalena I, Penerbit Airlangga, Jakarta.

t

%,a; &*y.la &&*, o.r'L; g%"b"a. afu: d*,t^,/, e//*

Surbakti, Ramlan, 1999. Memahami Ilmu Politik, PT Cramedia

Widiasarana Indonesia, Jakarta.

Subekti, Valina Singka, 1998. Electoral Law Reform as A Prerequisite

, to Create Democratization in Indonesia, Jakarta.

Venus, Antar, 2004. Managemen Kampanye, Sembiosa Rekatama,

Yogyakarta.

Windahl, S, 1992. Using Communication Theory, Sage Publications,

London.

Jurnal Laboratorium Ilmu Politik UI, Evaluasi Pemilu Orde Baru,

Mizan, Bandung.

UU No. 31 tahun 2002 tentang Partai Politik.

UU no. 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum.

B. Pos, 20 Februari 2004.

' Kompas, 23 Februari 2003.

International Idea, Stockholm, Sweden, 2003.

Asa, Khairiadi, 1999, Multipartai dalam Perspektif Lokal; Suatu

Tinjauan Dinamika Politik di Kalsel. Cria Kertiyasa, Jakarta.

, Poerwantana, P. K. 1994. Partai Politik di Indonesia, Rineka Cipta,
Jakarta.



Plagiarism Detector
Your right to know the authenticity!